



LAPORAN 3 TAHUN
PEMERINTAHAN JOKO WIDODO - JUSUF KALLA

#kerja3ersama

DAFTAR ISI

PEMERATAAN YANG BERKEADILAN 6

- Mengapa Pemerataan Yang Berkeadilan? 7

BAGIAN I: PEMBANGUNAN EKONOMI DAN PENINGKATAN PRODUKTIVITAS 8

- IKHTISAR 9

Lima Indikator Ekonomi Positif 10

- Kemiskinan Menurun 10
- Pertumbuhan Ekonomi Stabil 11
- Inflasi terkendali 11
- Ketimpangan Pendapatan Menurun 12
- Pengangguran Menurun 12
- Utang Luar Negeri Terkendali 13
- Koordinasi Pengelolaan Fiskal dan Moneter 14
- Indeks Daya Saing Global Meningkat 15
- Menuju Era Ekonomi Emas Indonesia 2045 15

Perbaikan Peringkat Investasi Ringankan APBN Untuk Pembangunan Rakyat 16

- Perbaikan Ekonomi Indonesia Diakui Dunia Internasional 16
- Capaian Paket Kebijakan Ekonomi I-XV 17
- Paket Kebijakan Ekonomi 18
- Kebijakan yang Mendorong Investasi 18
- Realisasi Investasi Meningkat 19
- Terjadi Keseimbangan Investasi Asing di Indonesia 20
- Perbaikan Kemudahan Berusaha Terus Dilakukan 20

Membangun Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru 21

- Menggerakkan Ekonomi Melalui Pengembangan Kawasan 21
- Komitmen Menyelesaikan Proyek Listrik 35.000 MW 22
- Ketersediaan Listrik Hingga ke Seluruh Pelosok 22
- Meningkatkan Daya Saing dan Produktivitas 23
- StadionGBK dan Jakabaring Terus Dipersiapkan untuk Asian Games 2018 24
- Pariwisata Menjadi Primadona 26
- Bantuan Permodalan untuk Membesarkan Sektor Ekonomi Kreatif 25
- Meningkatnya Peringkat Daya Saing Pariwisata Indonesia 26

Peningkatan Produktivitas Melalui Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 27

- Iklim Ketenagakerjaan yang Kondusif 27
- Perlindungan Terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI) 28
- Desa Migran Produktif 29
- Penurunan Angka Pengangguran 30
- Pelatihan dan Pendidikan Vokasi, Sertifikasi, serta Pelibatan Industri 31
- Jumlah Lulus Sekolah Meningkat, Jumlah Putus Sekolah Menurun 32
- Pendidikan Nasional dengan Prestasi Internasional 33
- Perbaikan Produktivitas Dunia Riset dan Akademis 34
- Jumlah Tenaga Kerja Asing Terpantau dan Terkendali 35

Membangun Poros Maritim Indonesia 36

- Tol Laut Menurunkan Harga 36
- Perikanan Budidaya Meningkatkan 37
- Sentra Kelautan Terus Diperbanyak 37
- Asuransi Untuk Nelayan 38
- Penegakan Kedaulatan Maritim 38

BAGIAN II: PENGENTASAN KEMISKINAN DAN KEBIJAKAN AFIRMATIF 39

- IKHTISAR 40

Membangun Indonesia adalah Membangun Manusia Indonesia 41

- Indeks Pembangunan Manusia 41

Pemenuhan Kebutuhan Dasar adalah Jalan Mengatasi Kemiskinan 42

- Bantuan Sosial bagi Masyarakat 42
- Pelayanan Kesehatan Semakin Merata dan Mudah 43
- Kesehatan untuk Generasi Mendatang 45
- Perbaiki Kualitas Kesehatan Ibu dan Anak 44
- Mengabdikan Melalui Pelayanan Kesehatan 46
- Pengendalian Harga Pangan 47
- Perbaiki Irigasi 47
- Pembangunan Rusunawa untuk Pekerja 48
- Perumahan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah 49
- Subsidi Energi untuk Yang Benar-Benar Membutuhkan 50
- Penanganan Kebencanaan 51

Membangun Dari Desa 52

- Jumlah Dana Desa Meningkatkan 52
- Dampak Sosial dan Ekonomi Dana Desa 53
- Strategi Mengatasi Ketimpangan Kota dan Desa 54
- Menghadirkan Listrik di Desa 55
- Pengakuan terhadap Hutan Adat 56
- Kredit Murah untuk Rakyat 57
- Mendorong Kebangkitan UMKM 58
- Pembentukan Bank Wakaf 59
- Komitmen Meningkatkan Pelayanan Jamaah Haji 60

Pemberdayaan dan Perlindungan Kelompok Rentan 61

- Luas Pemanfaatan Hutan Produksi 61
- Kepastian Hak Atas Tanah 62
- Pemberdayaan Melalui Perhutanan Sosial 63
- Strategi Percepatan Kelembagaan Perhutanan Sosial 63
- Pemberdayaan Perempuan 64
- Perlindungan Anak 65
- Komitmen terhadap Kaum Disabilitas 66

Memberdayakan dan Menyetarakan Pembangunan di Papua & Papua Barat 67

- Membangun Papua 67
- Indikator Makroekonomi Papua 68
- Pelayanan Kesehatan di Papua 69
- Untuk Kesejahteraan Papua 70
- Pembangunan Listrik di Pedesaan di Papua & Papua Barat 71
- Percepatan BBM Satu Harga di Papua 72
- Dampak Pembangunan Infrastruktur dan BBM 1 Harga 73
- Pembangunan Infrastruktur Jalan Trans Papua 74

BAGIAN III: MENEKAN KETIMPANGAN ANTAR WILAYAH 75

‣ IKHTISAR 76

Aceh Hingga Papua Yang Kaya, Terhubung Secara Nyata 77

- Komitmen Mengatasi Kesenjangan Antar Wilayah 77
- Penyebaran Proyek Strategis Nasional (PSN) 78

Konektivitas yang Menghubungkan Setiap Jengkal Wilayah Nusantara 79

- Pemerataan Proyek di Seluruh Indonesia 79
- Berbagi Peran Antara Pemerintah dan Swasta 80
- Tiga Reformasi untuk Percepatan Infrastruktur 81
- Konektivitas Mendorong Peningkatan Jumlah Penumpang 82
- Menembus Isolasi Perbatasan 83
- Revitalisasi Pasar Perbatasan 84
- Palapa Ring Mempersatukan Indonesia 85

Pembangunan Indonesia Sentris Berkelanjutan 86

- Pengembangan Daerah Pariwisata Baru 86
- Pembangunan Kawasan Industri dan Kawasan Ekonomi Khusus Luar Jawa 87
- 26 Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) 88
- Pembangunan di Beranda Terdepan 89
- Peningkatan Investasi Luar Jawa 90

Merawat Alam Indonesia Bersama 91

- Penurunan Jumlah Titik Panas 91
- Strategi Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan 92

BAGIAN IV: STABILITAS POLITIK DAN KEAMANAN, KEADILAN HUKUM, DAN PEMAJUAN KEBUDAYAAN 93

‣ IKHTISAR 94

Stabilitas Politik dan Terwujudnya Rasa Aman 95

- Indeks Demokrasi Indonesia 95
- Masyarakat Lebih Bahagia 96

Hukum yang Adil dan Hadir 97

- Jaminan Atas Hak-Hak Fundamental 97
- Apresiasi Dewan HAM PBB 98
- Komitmen Pemenuhan Hak Sipil dan Politik 98
- Penanganan Kasus HAM di Papua 99
- Kabupaten dan Kota Peduli HAM 100
- Reformasi Hukum 101
- Penegakan Keadilan dan Perlindungan Hukum 102
- Penyalahgunaan Narkoba Menurun 103

Birokrasi Pemerintahan yang Bersih dan Melayani 104

- Indeks Persepsi Korupsi dan Indeks Perilaku Anti Korupsi 104
- Penyelamatan Kerugian Negara 105
- Reformasi Pelayanan Lalu Lintas 105
- Penurunan Tingkat Kecelakaan Mudik Lebaran 1438 Hijriah 106
- Langkah-Langkah Memperbaiki Layanan 107
- Instansi Pemerintahan yang Terus Berbenah 108
- Akses Informasi dan Penanganan Keluhan Publik 109

Membangun Stabilitas Politik dan Keamanan 110

- Pilkada yang Aman dan Demokratis 110
- Penanggulangan Radikalisme dan Terorisme 111
- Upaya-Upaya Melindung WNI di Luar Negeri 112
- Membangun TNI yang Profesional dan Pembentukan Kader Bela Negara 113
- Pengamanan Perbatasan 114
- Industri Pertahanan Dalam Negeri 114
- Kepemimpinan dalam Diplomasi Internasional 115
- Prestasi dan Capaian Diplomasi Internasional 116
- Diplomasi Politik dan Kemanusiaan 117

Penguatan Pendidikan Karakter dan Nilai Budaya yang Beragam 118

- Pluralisme 118
- Revolusi Mental 119
- Perluasan dan Pemerataan Akses Kebudayaan 120
- Budaya Indonesia Menembus Eropa 121

PEMERATAAN YANG BERKEADILAN

“ Kita harus kerja keras mati-matian dalam rangka menurunkan angka kesenjangan kita. Baik kesenjangan antar wilayah, kesenjangan antara kaya dan miskin, yang ini menjadi sebuah *concern* besar pemerintah kita ke depan. ”

Presiden Joko Widodo

dalam Sidang Kabinet Paripurna
di Istana Kepresidenan Bogor, 4 Januari 2017

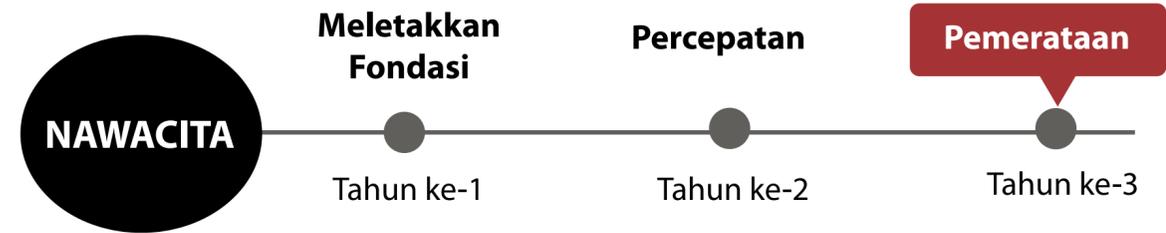
MENGAPA PEMERATAAN YANG BERKEADILAN ?



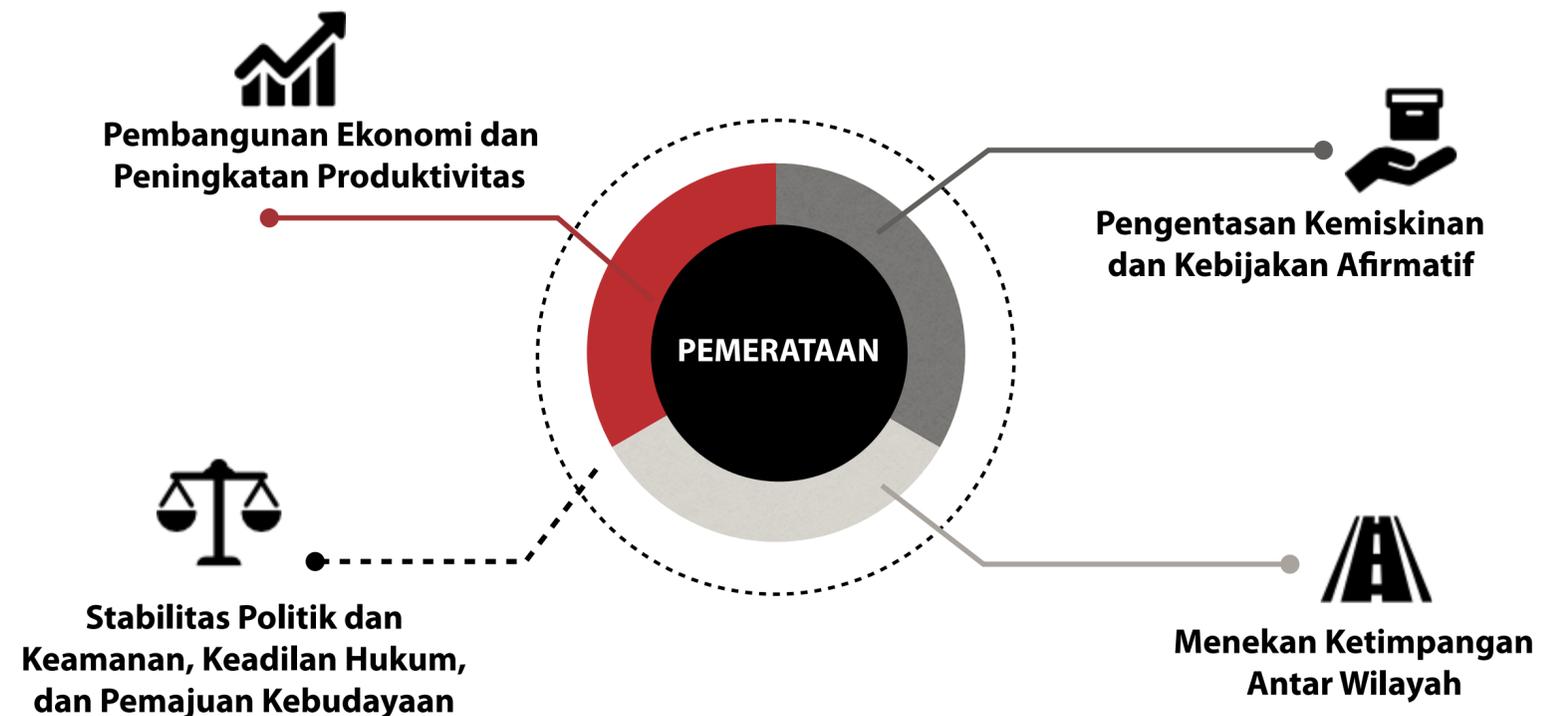
Pada tahun ketiga, Pemerintah bergerak lebih maju lagi, fokus pada kebijakan pemerataan ekonomi yang berkeadilan. Tahun 2017 ini adalah tahun kerja bersama untuk pemerataan ekonomi yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pada tahun ketiga, Pemerintahan berfokus pada kebijakan pemerataan yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebab Pemerintah ingin seluruh rakyat Indonesia, di seluruh pelosok tanah air bisa merasakan manfaat dari pembangunan. Serta kita tidak ingin kesejahteraan hanya dinikmati oleh seseorang atau sekelompok orang.

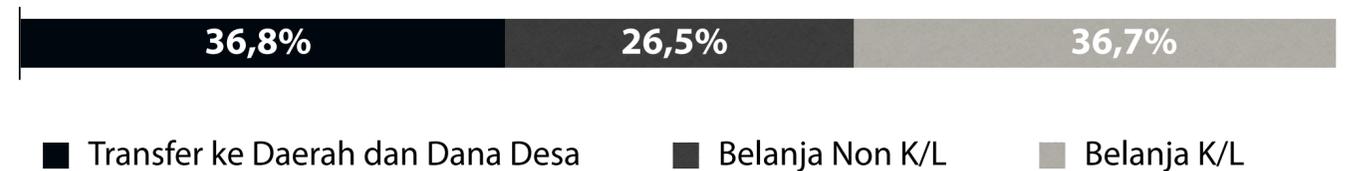
Fokus di tahun ketiga ini adalah kelanjutan dari fokus tahun pertama saat Pemerintah meletakkan fondasi pembangunan nasional yang kokoh melalui transformasi fundamental perekonomian dan meletakkan kembali paradigma Indonesia Sentris. Kemudian berlanjut fokus pada tahun kedua dengan Pemerintah mendorong percepatan pembangunan nasional, baik pembangunan infrastruktur fisik, mempercepat pembangunan sumber daya manusia, serta meningkatkan daya saing untuk mengejar ketertinggalan dengan negara lain. ■



4 ASPEK PEMERATAAN JOKOWI -JK



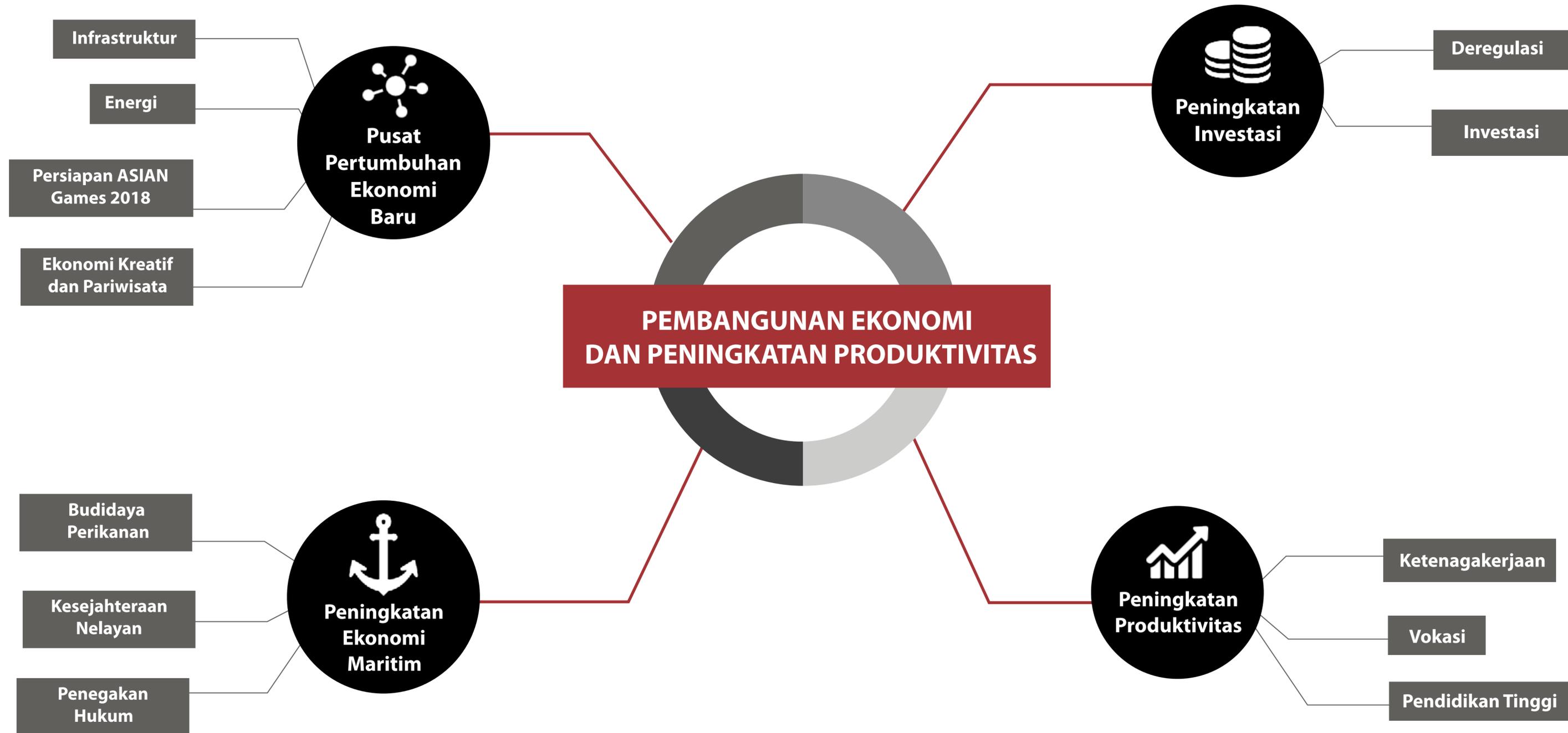
ALOKASI APBN 2017



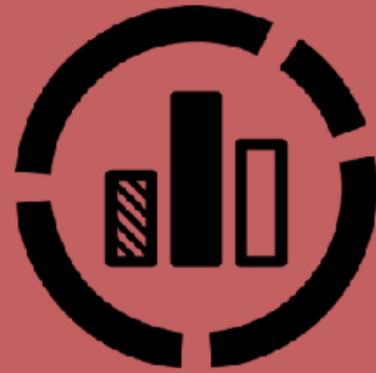
BAGIAN I

PEMBANGUNAN EKONOMI DAN PENINGKATAN PRODUKTIVITAS

IKHTISAR



LIMA INDIKATOR EKONOMI POSITIF



Dalam tiga tahun terakhir ini, Pemerintah fokus untuk memerangi kemiskinan, menekan ketimpangan, dan mengurangi pengangguran.

Dalam tiga tahun terakhir ini, berkat kerja bersama seluruh komponen bangsa maka Indonesia telah berhasil menurunkan angka kemiskinan, ketimpangan pendapatan, dan tingkat pengangguran. Bahkan pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap stabil dan inflasi terkendali.

Untuk terus menguatkan keberhasilan tersebut, maka didorong terjadinya Peningkatan Investasi, Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru, dan Peningkatan Produktivitas.

Peningkatan Investasi diperlukan sehingga APBN dapat lebih leluasa digunakan untuk kepentingan lain rakyat yang sama pentingnya seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP), Program Keluarga Harapan (PKH), Dana Desa, dan lainnya.

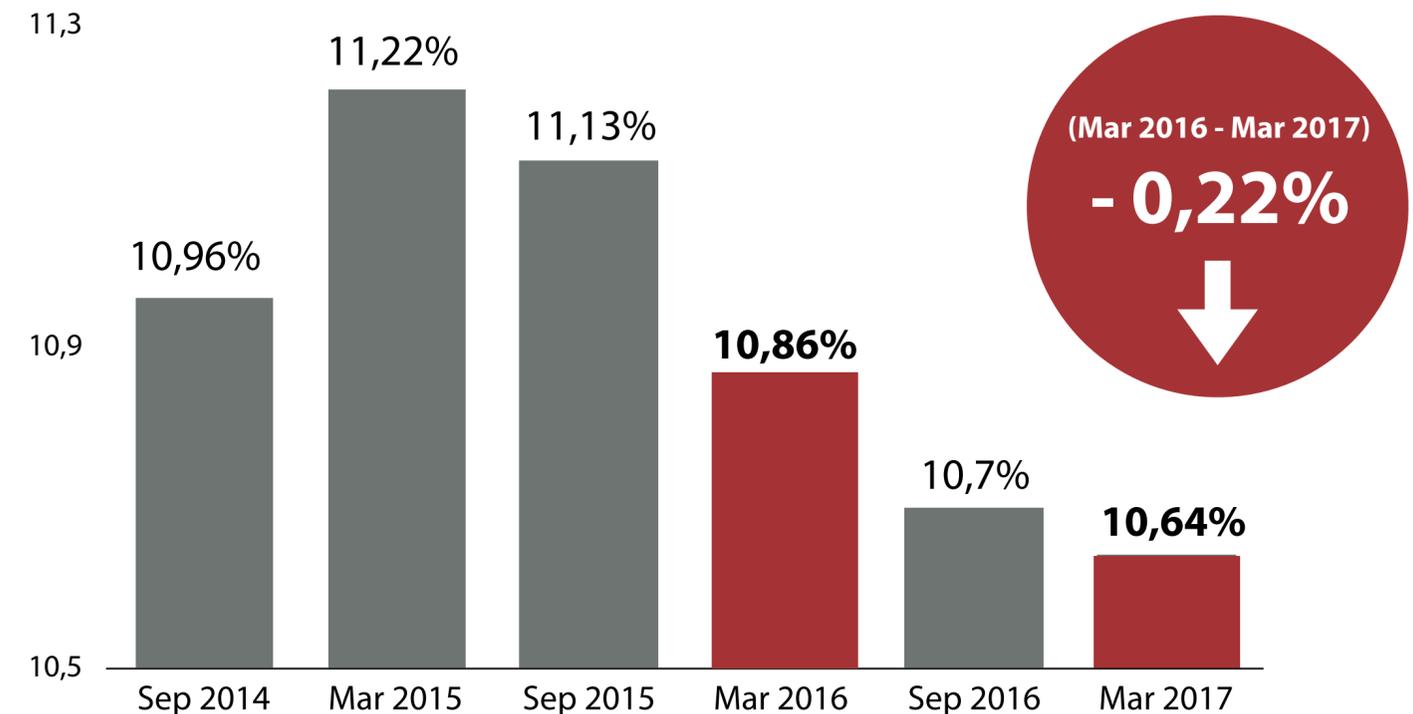
Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru diperlukan untuk mewujudkan pembangunan yang Indonesia Sentris, sehingga terwujud pemerataan ekonomi yang berkeadilan.

Peningkatan Produktivitas dilakukan melalui perbaikan kualitas Sumber Daya Manusia sehingga dapat bersaing di tingkat global. ■

Indikator I KEMISKINAN

KEMISKINAN MENURUN

Jumlah penduduk miskin di Indonesia per Maret 2017 sebanyak 27,77 juta orang atau 10,64% dari seluruh penduduk. Diperlukan program yang tepat sasaran dan tepat waktu untuk terus menurunkan jumlah penduduk miskin.

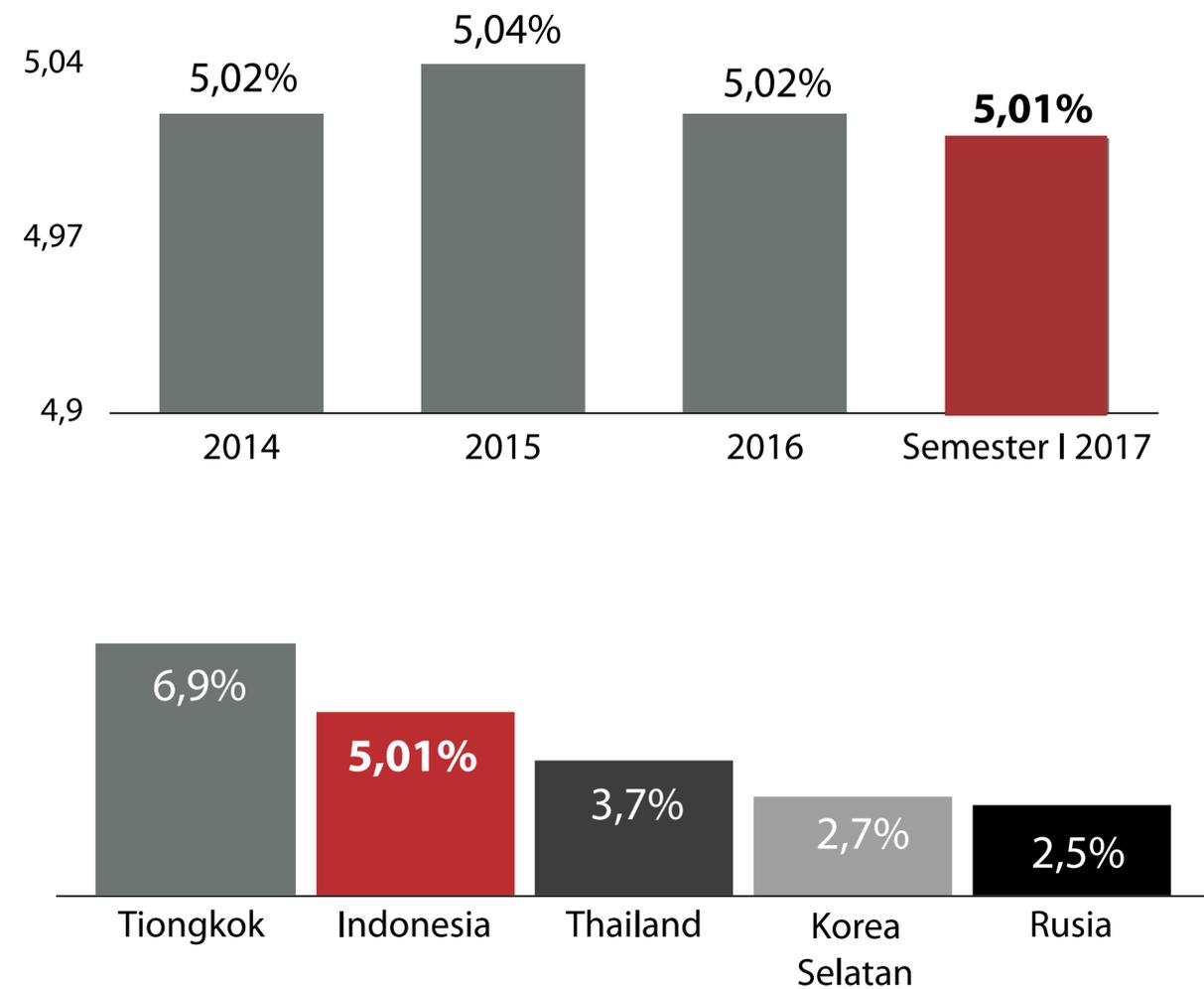


Sumber: BPS

Indikator II PERTUMBUHAN EKONOMI

PERTUMBUHAN EKONOMI STABIL

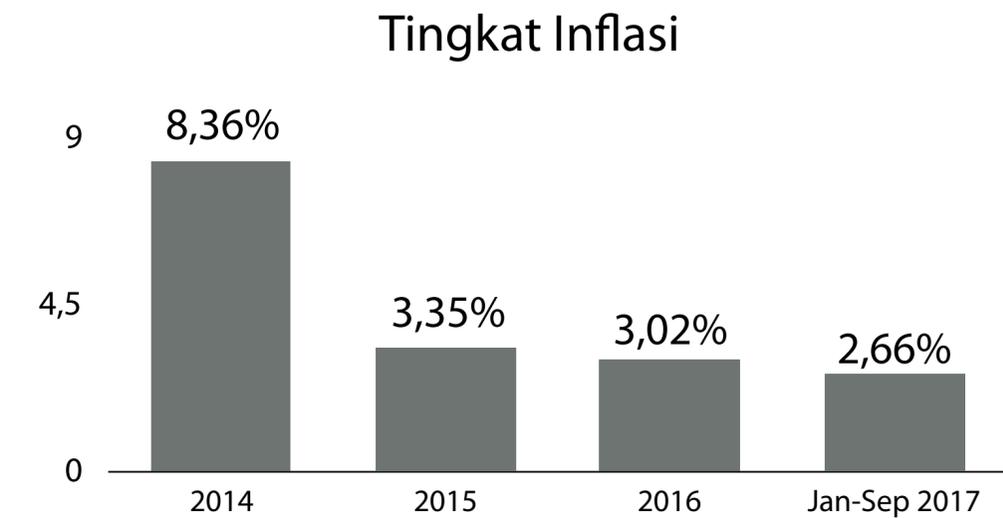
Di tengah melambatnya pertumbuhan perekonomian global, ekonomi Indonesia tumbuh 5,01% pada Semester I 2017.



Indikator III INFLASI

INFLASI TERKENDALI

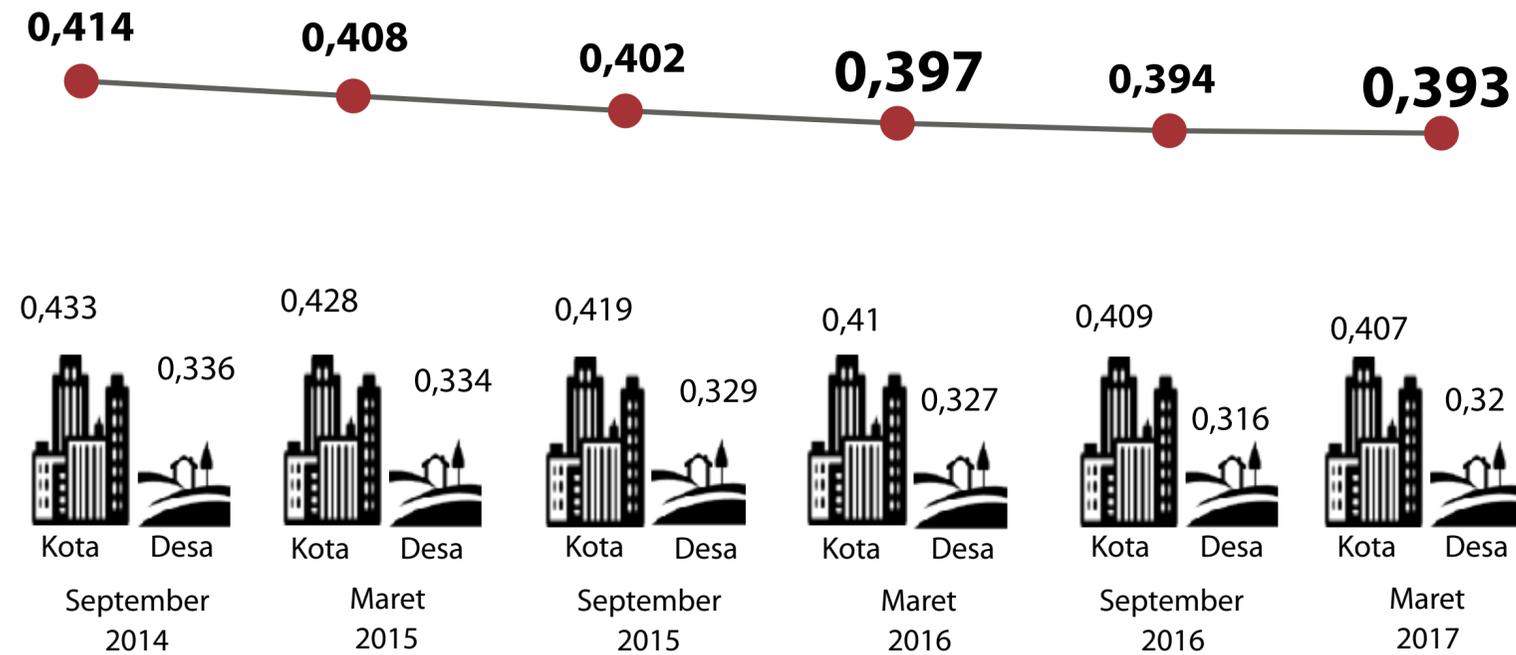
Stabilitas harga terkendali. Hingga September 2017, tingkat inflasi sebesar 2,66% (y-o-y).



Indikator IV
KETIMPANGAN

KETIMPANGAN PENDAPATAN MENURUN

Tingkat ketimpangan pendapatan yang diukur dengan Rasio Gini turun menjadi 0,393 per Maret 2017.



● : Perkotaan & Pedesaan



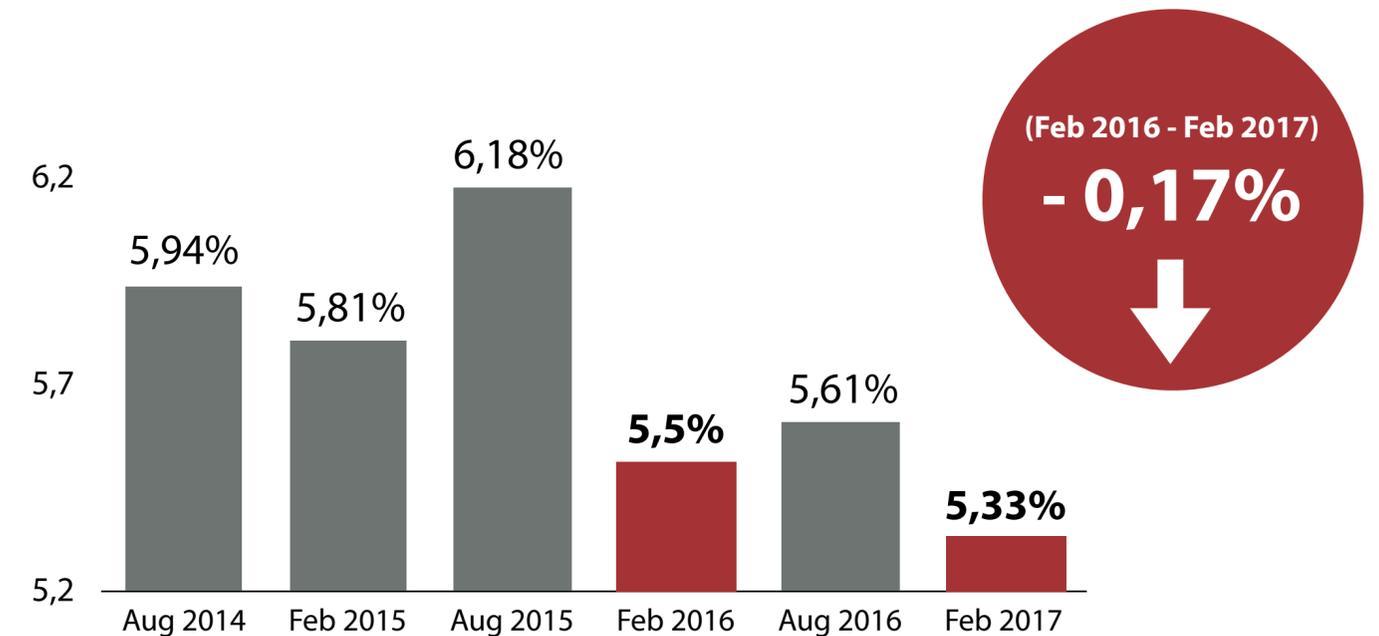
: Kota

: Desa

Indikator V
PENGANGGURAN

PENGANGGURAN MENURUN

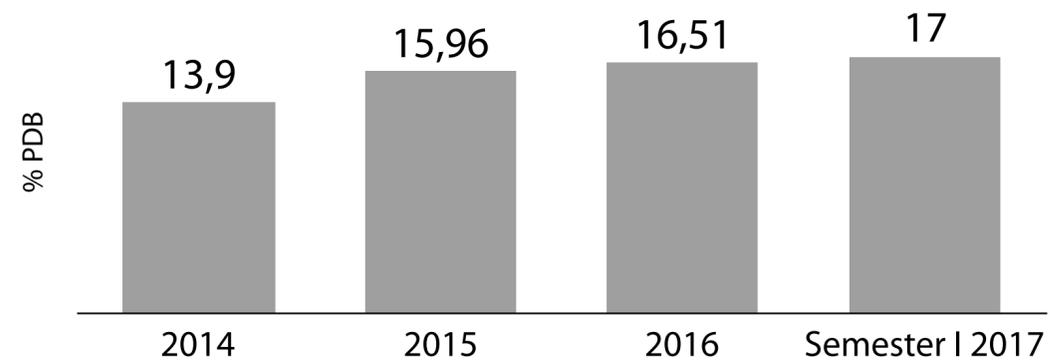
Tingkat pengangguran per Februari 2016 tercatat sebesar 5,33% atau sebanyak 7,01 juta orang. Penciptaan lapangan kerja baru di sektor-sektor potensial terus didorong lebih optimal.



UTANG LUAR NEGERI TERKENDALI

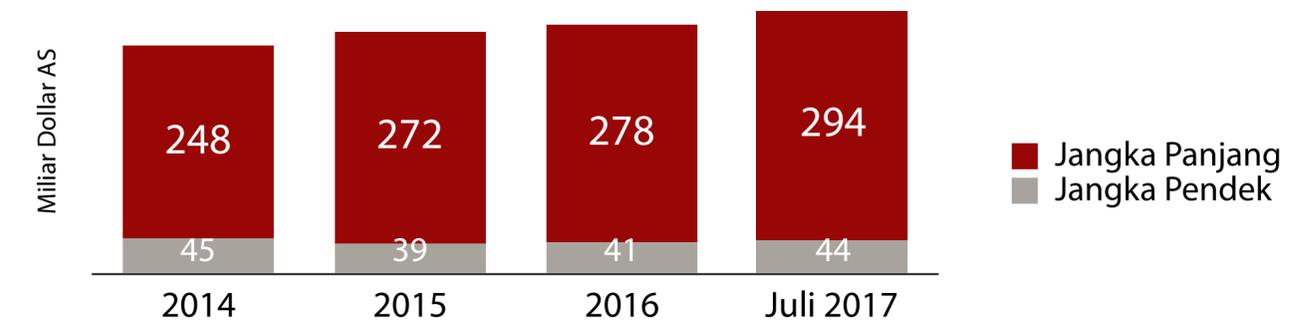
Pemerintah mengelola utang luar negeri (ULN) secara hati-hati dengan kemampuan membayar yang membaik.
Batas maksimal utang adalah 60% dari PDB (UU 17/2003 tentang Keuangan Negara).

Rasio ULN Pemerintah terhadap PDB



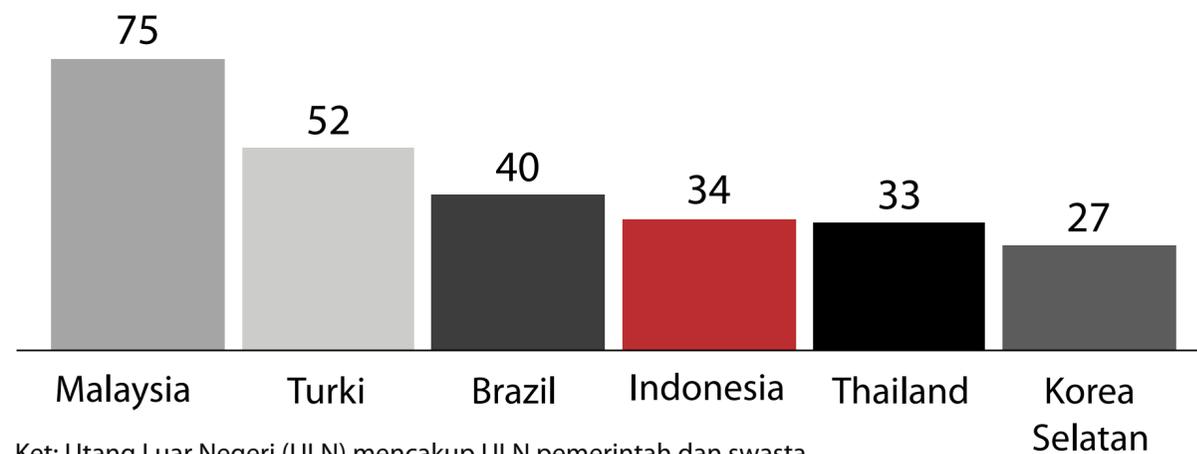
Ket: Utang Luar Negeri (ULN) mencakup ULN pemerintah.

Utang Luar Negeri didominasi oleh utang jangka panjang



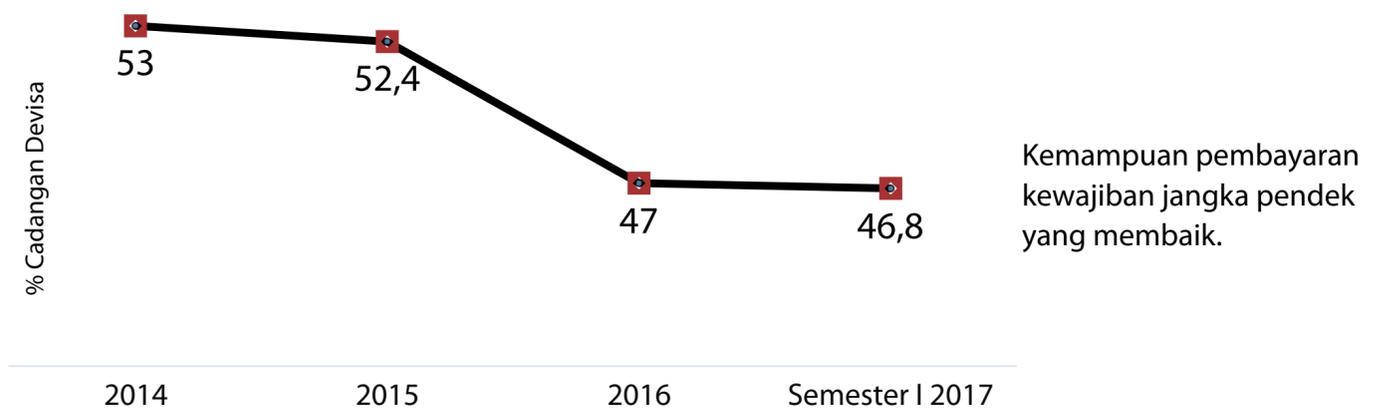
Ket: Utang Luar Negeri (ULN) mencakup ULN pemerintah dan swasta

Rasio ULN/PDB beberapa Negara, Semester I 2017 (%)



Ket: Utang Luar Negeri (ULN) mencakup ULN pemerintah dan swasta

Rasio Utang Luar Negeri Jangka Pendek terhadap Cadangan Devisa (%)



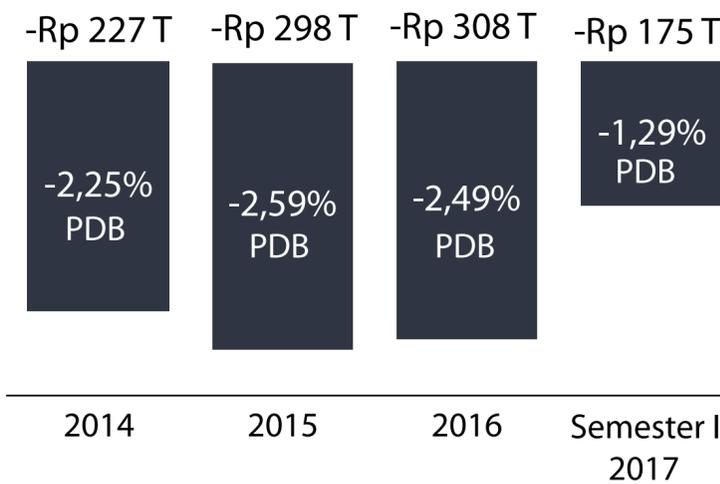
Kemampuan pembayaran kewajiban jangka pendek yang membaik.

Ket: Utang Luar Negeri (ULN) mencakup ULN pemerintah dan swasta

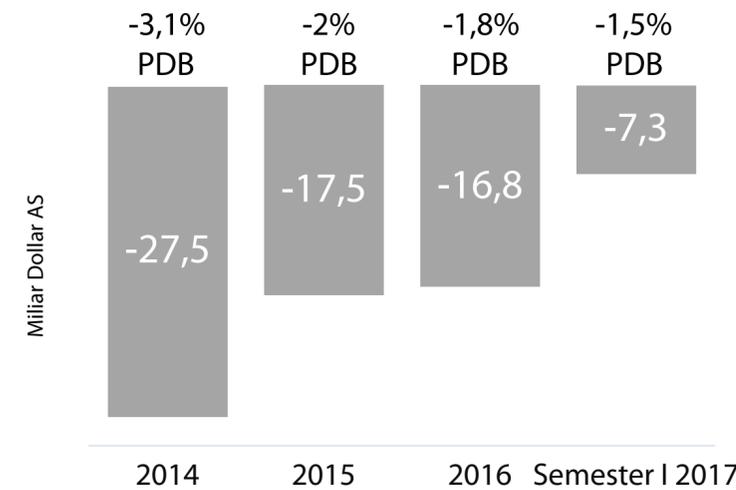
Sumber: Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, *Euromoney*, dan Bank Sentral masing-masing negara

KOORDINASI PENGELOLAAN FISKAL DAN MONETER

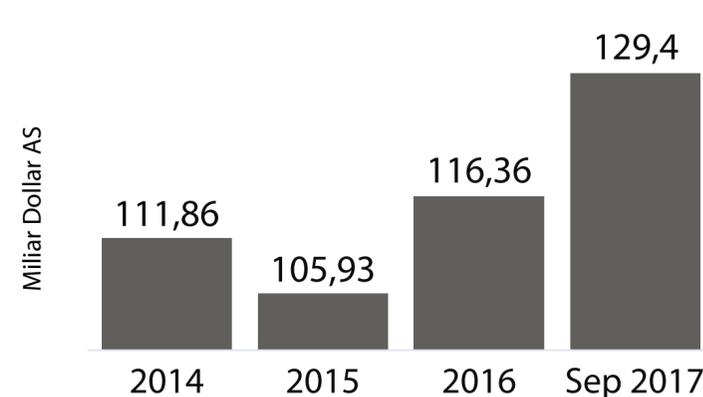
Indikator-indikator di bawah ini menunjukkan bahwa fundamental pengelolaan fiskal maupun moneter Indonesia berada dalam posisi aman. Hal ini terjadi karena adanya koordinasi yang baik antara Pemerintah dengan Bank Sentral.



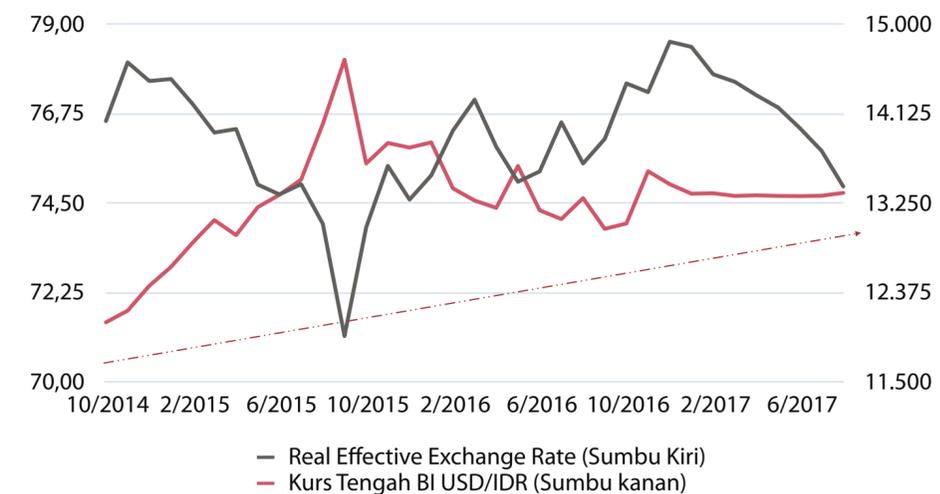
Defisit APBN terkontrol. Dengan APBN yang ekspansif, defisit terjaga di bawah 3%.



Defisit neraca transaksi berjalan tercatat terus turun.



Pada September 2017, cadangan devisa tercatat sebesar 129,4 miliar USD, tertinggi sepanjang sejarah.

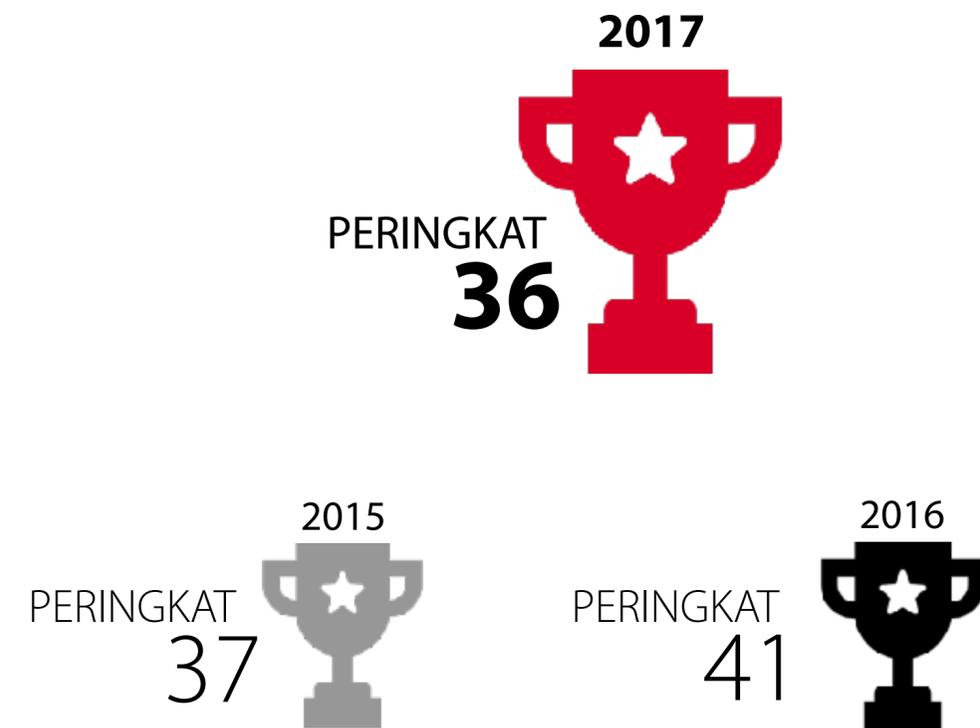


Nilai tukar rupiah terhadap dollar AS stabil.

Sumber: Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan

INDEKS DAYA SAING GLOBAL MENINGKAT

Indeks Daya Saing Global Indonesia naik ke peringkat 36 pada tahun 2017 dibandingkan dengan tahun sebelumnya.



Sumber: *World Economic Forum*

MENUJU ERA EKONOMI EMAS INDONESIA 2045

Pembangunan ekonomi adalah sebuah upaya berkelanjutan yang harus terus menerus ditingkatkan demi terciptanya kemajuan pada berbagai bidang khususnya terkait aspek kesejahteraan rakyat.

PROYEKSI LEMBAGA FINANSIAL GLOBAL

| | Peringkat PDB | Tahun |
|------------------------------|---------------|-------|
| Standard Chartered Bank | 5 | 2030 |
| PricewaterhouseCoopers (PwC) | 5 | 2030 |
| | 4 | 2050 |
| McKinsey Global Institute | 7 | 2030 |

PROYEKSI PEMERINTAH INDONESIA

| | 2014 | 2045 |
|---------------------------------|------|-------|
| PDB per Kapita (US\$ per tahun) | 4900 | 29000 |
| Peringkat pendidikan (PISA) | 431 | 520 |
| Peringkat daya saing | 30 | 11 |
| Peringkat daya tarik investasi | 40 | 15 |
| Jumlah penduduk (juta jiwa) | 270 | 318 |

Sumber: Kemenko Perekonomian



PERBAIKAN PERINGKAT INVESTASI RINGANKAN APBN UNTUK PEMBANGUNAN RAKYAT

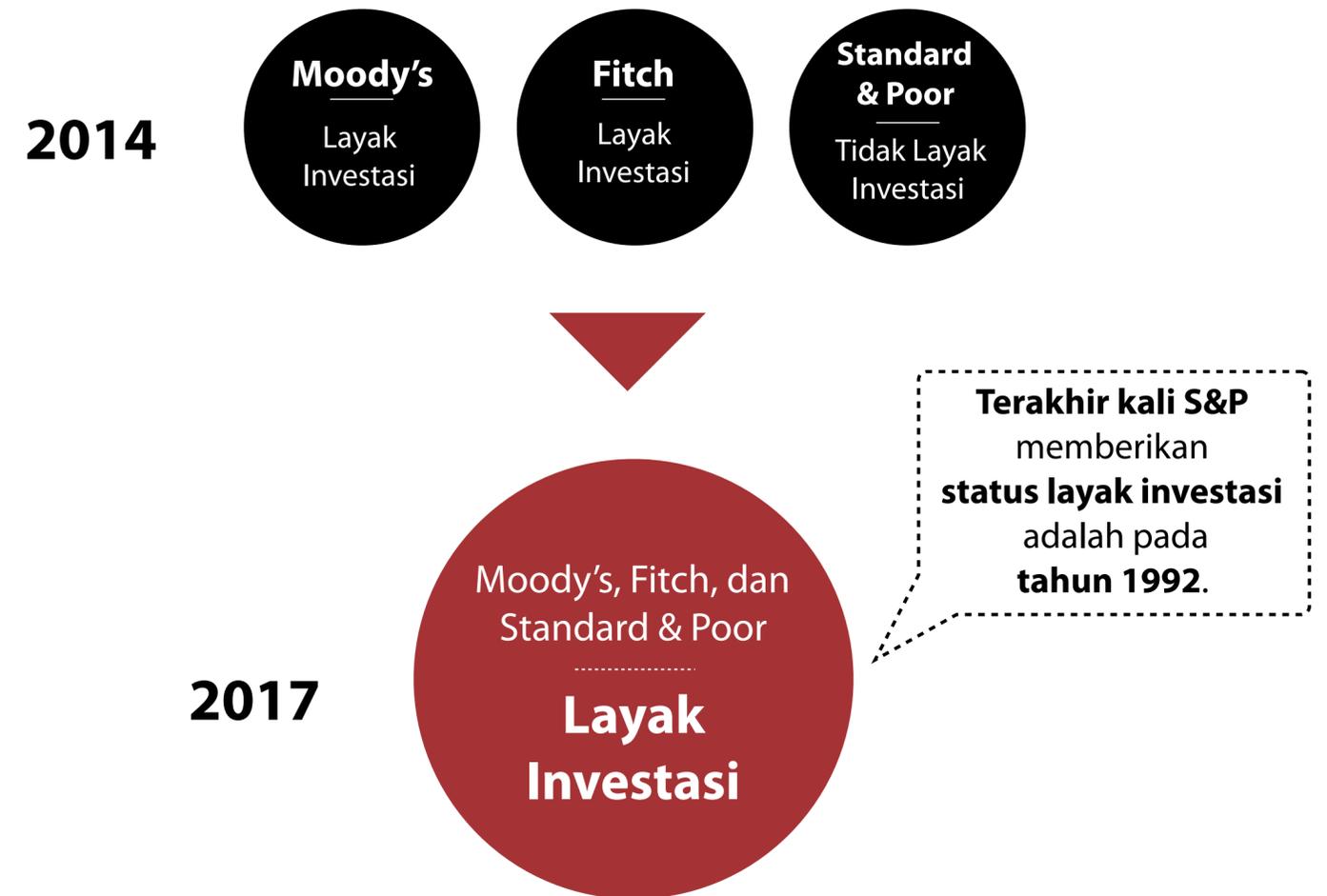
Peningkatan investasi diperlukan sehingga APBN dapat lebih leluasa digunakan untuk kepentingan lain rakyat yang sama pentingnya seperti KIP, PKH, Dana Desa, dan lainnya.

Melalui peningkatan investasi di berbagai sektor, diharapkan APBN dapat dialokasikan untuk belanja-belanja lain yang lebih produktif dan berorientasi kepada kesejahteraan rakyat. Peningkatan keterlibatan pihak swasta, baik dalam maupun luar negeri dalam berinvestasi akan menciptakan lapangan kerja baru dan dampak ekonomi yang lebih luas.

Untuk itu, dalam 3 tahun terakhir, Pemerintah terus membenahi fundamental perekonomian Indonesia. Termasuk melalui 15 paket kebijakan ekonomi. Berkat kerja keras berbagai pihak dalam melakukan perbaikan struktural, Indonesia telah mendapat status "layak investasi" dari tiga Lembaga Pemeringkat Internasional. Peningkatan realisasi investasi juga turut bersumbangsih pada penyerapan tenaga kerja. ■

PERBAIKAN EKONOMI INDONESIA DIAKUI DUNIA INTERNASIONAL

Pada tahun 2017 Indonesia dikategorikan sebagai negara dengan peringkat Layak Investasi. Khusus penilaian oleh *Standard and Poor (S&P)*, peringkat itu baru kembali diperoleh setelah beberapa tahun.



CAPAIAN PAKET KEBIJAKAN EKONOMI I-XV

Pemerintah mengeluarkan paket kebijakan ekonomi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan investasi. Sejumlah regulasi dicabut, digabung, dan disederhanakan.



Sumber: Kemenko Perekonomian

PAKET KEBIJAKAN EKONOMI

Paket-paket kebijakan ekonomi dikeluarkan secara spesifik untuk mencari jalan keluar yang tepat di masing-masing sektor.



PAKET I

Daya saing industri nasional, PSN, investasi properti

PAKET II

Perizinan izin investasi, tax holiday

PAKET III

Tarif Listrik

PAKET IV

Kesejahteraan Pekerja

PAKET V

Revaluasi Aset, Pajak Berganda, dan Bank Syariah

PAKET VI

Kawasan Ekonomi Khusus

PAKET VII

Industri Padat Karya

PAKET VIII

Satu Peta, Kilang Minyak, Bea suku cadang pesawat

PAKET IX

Infrastruktur Ketenagalistrikan, Stabilisasi Harga Daging

PAKET X

UMKM

PAKET XI

Kredit Usaha, Farmasi

PAKET XII

Kemudahan Berusaha di Indonesia

PAKET XIII

Rumah murah

PAKET XIV

E-commerce

PAKET XV

Usaha & Daya Saing Penyedia Logistik

KEBIJAKAN YANG MENDORONG INVESTASI

Enam paket kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan menaikkan produktivitas.

PERPRES KEMUDAHAN BERUSAHA

PUSAT LOGISTIK BERIKAT (PLB)

Telah diresmikan 34 PLB (per 12 April 2017), antara lain sektor otomotif, pertambangan, minyak dan gas, dll.

REVISI DNI (PERPRES NO. 44/2016)

Implementasi DNI sudah ada 527 perusahaan yang memanfaatkan, rencana investasi USD 12,926 miliar.

PEMUDAHAN BERUSAHA BAGI USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM)

Memangkas izin, prosedur, waktu, dan biaya dalam 10 indikator Kemudahan Berusaha.

INSENTIF FISKAL

Tax Allowance telah dimanfaatkan 25 perusahaan dengan lama pengurusan rata-rata 13,4 hari (sebelumnya 2 tahun).

PERIZINAN INVESTASI 3 JAM

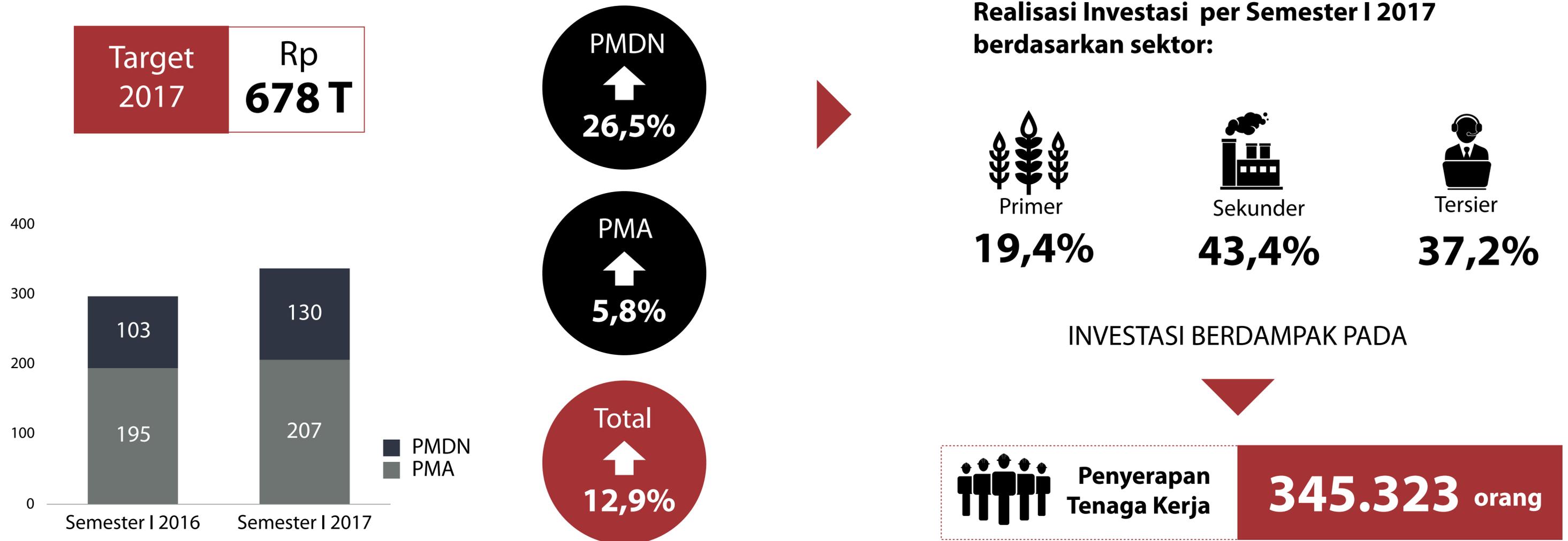
Telah dimanfaatkan 284 perusahaan dengan nilai investasi Rp219 Triliun, dan serapan tenaga kerja Indonesia 170.657 orang (per Feb 2017).

PEMBIAYAAN EKSPOR

Pembiayaan *National Interest Account* mencapai USD 93,9 Juta dan KURBE mencapai Rp10,5 Triliun (per Feb 2017).

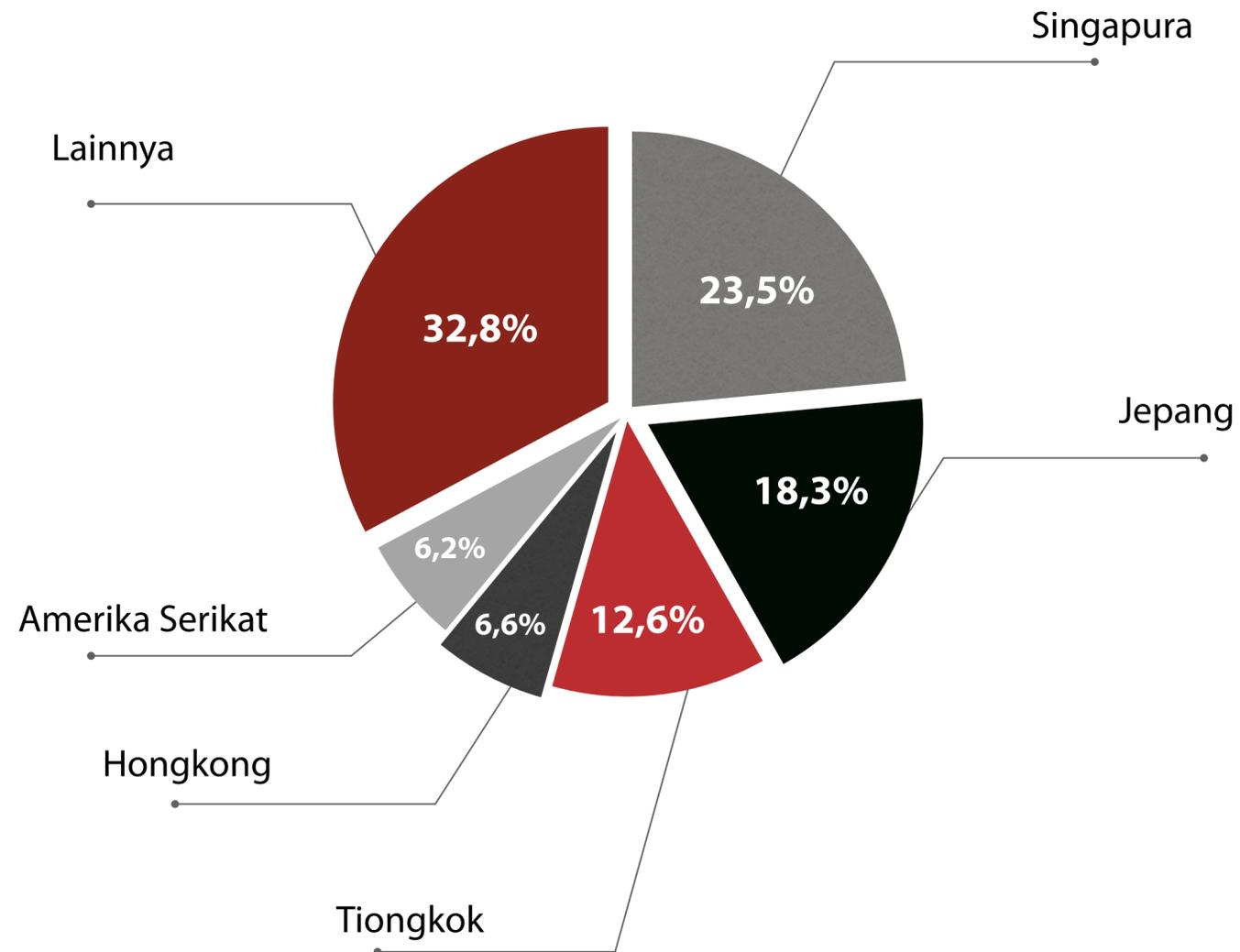
REALISASI INVESTASI MENINGKAT

Realisasi investasi pada Semester I 2017 mencapai Rp337 triliun atau 49,6% dari target 2017.
Bila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya, terjadi kenaikan sebesar 12,9%.



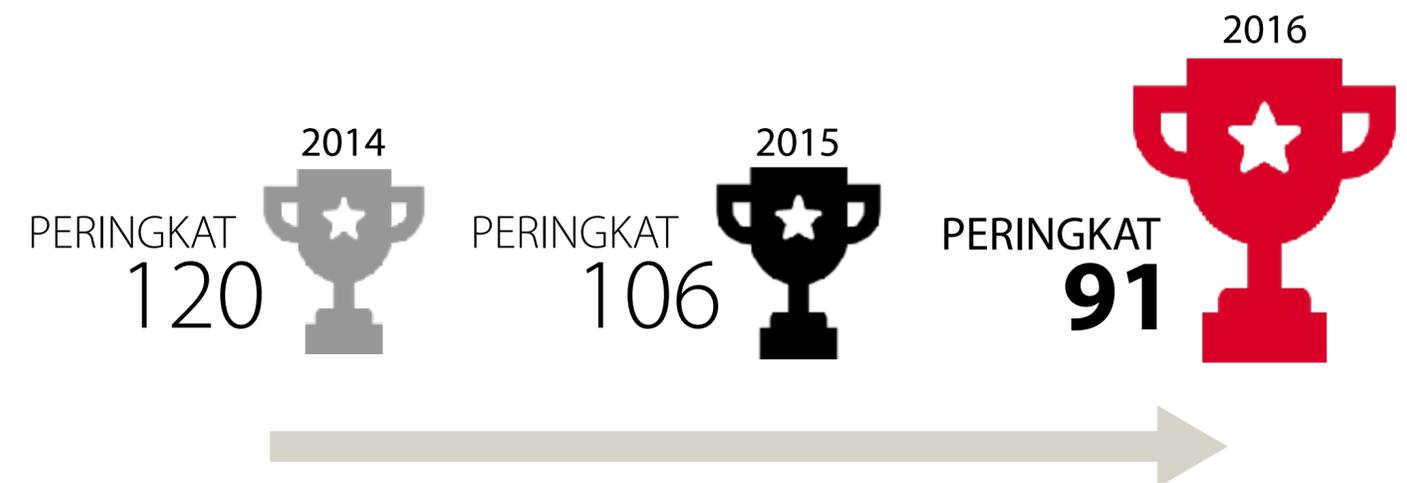
TERJADI KESEIMBANGAN INVESTASI ASING DI INDONESIA

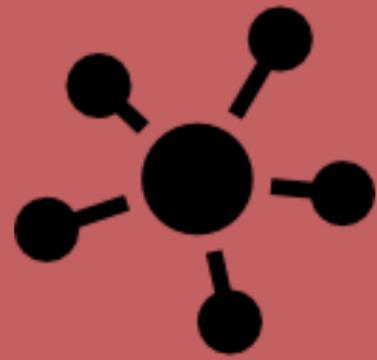
Tak ada negara asal investasi yang terlalu dominan dalam menanamkan modalnya di Indonesia, dengan sektor tujuan investasi yang beragam.



PERBAIKAN KEMUDAHAN BERUSAHA TERUS DILAKUKAN

Kemudahan berusaha terus meningkat. Indonesia berada di peringkat 91 dari 190 negara (2016), naik 29 peringkat sejak tahun 2014.





MEMBANGUN PUSAT- PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI BARU

Demi mempercepat pembangunan dan kesejahteraan, pemerintah mendorong munculnya berbagai pusat pertumbuhan ekonomi baru secara merata

Komitmen tersebut ditunjukkan dengan mendorong pembangunan infrastruktur di berbagai wilayah, memastikan ketersediaan energi, serta menyiapkan sejumlah kawasan industri.

Hal ini dapat meningkatkan efisiensi dan daya saing produk-produk barang dan jasa. Dengan cara itu, masyarakat sekitar dapat ikut menikmati sekaligus berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi produktif tersebut.

Berbagai pusat kegiatan ekonomi yang didorong antara lain, sektor ekonomi maritim, ekonomi kreatif, serta pariwisata – khususnya destinasi wisata baru. Selain itu, perhatian pun diberikan bagi pengembangan ekonomi umat serta kawasan perbatasan dan 3T (terdepan, terluar dan tertinggal).

Penyelenggaraan Asian Games 2018 di Jakarta dan Palembang turut berkontribusi pada peningkatan ekonomi masyarakat setempat karena Indonesia akan menerima kunjungan kontingen dan wisatawan mancanegara. ■

MENGGERAKKAN EKONOMI MELALUI PENGEMBANGAN KAWASAN

Pengembangan kawasan untuk mendorong geliat ekonomi dilakukan secara merata di seluruh wilayah Indonesia.



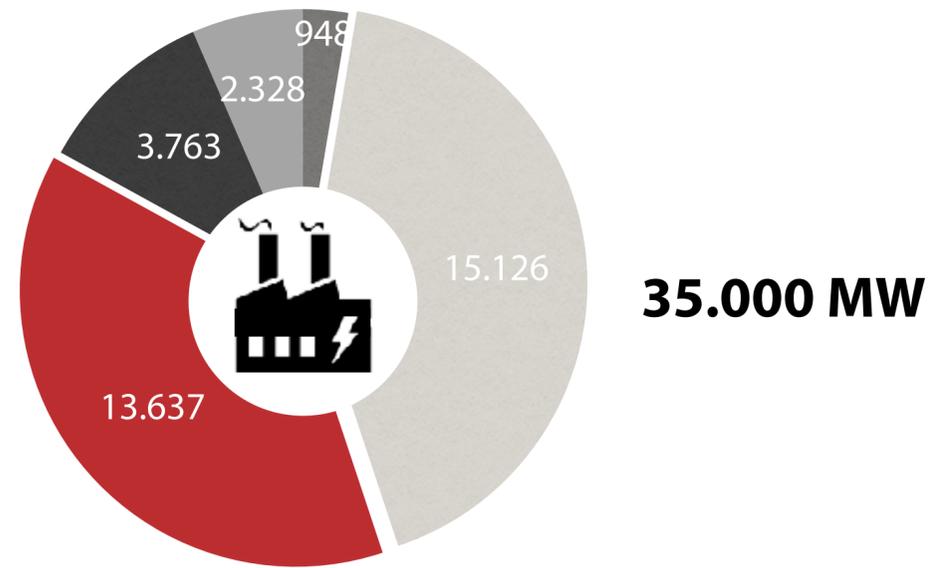
Keterangan:

- › KEK : Kawasan Ekonomi Khusus
- › KI : Kawasan Industri
- › DPP : Destinasi Pariwisata Prioritas
- › PKSN : Pusat Kegiatan Strategis Nasional

Sumber: KPPIP

KOMITMEN MENYELESAIKAN PROYEK LISTRIK 35.000 MW

Pemerintah memastikan bahwa seluruh paket 35.000 MW akan memasuki tahap konstruksi selambat-lambatnya pada tahun 2019, sehingga produktivitas di berbagai sektor dapat terus dipacu.



- 948 MW sudah beroperasi
- 15.126 MW dalam tahap konstruksi
- 13.637 MW sudah selesai Power Purchase Agreement (PPA) *
- 3.763 MW dalam tahap pengadaan
- 2.328 MW dalam tahap perencanaan

* termasuk PLTU Jawa 9 dan 10 (2x1000 MW)

KETERSEDIAAN LISTRIK HINGGA KE SELURUH PELOSOK

Listrik terbukti meningkatkan produktivitas. Oleh karena itu, Pemerintah menargetkan rasio elektrifikasi mencapai 100% pada tahun 2024.



TERDAPAT **12.000 DESA** YANG BELUM TERALIRI LISTRIK DENGAN BAIK, **2500 DESA** DIANTARANYA BELUM TERALIRI LISTRIK SAMA SEKALI (GELAP GULITA)



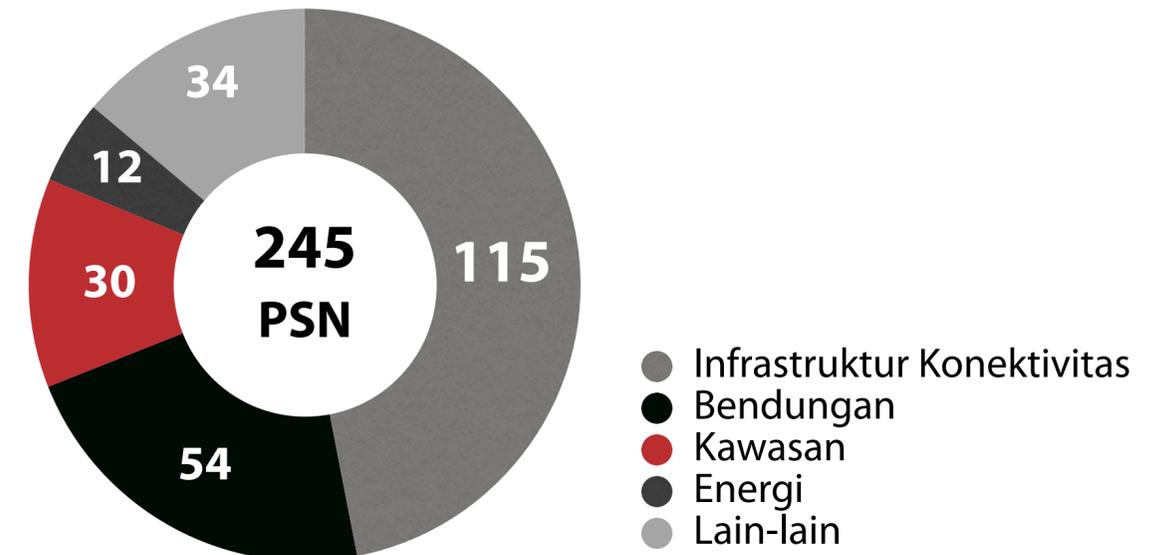
Sumber: Kementerian ESDM

MENINGKATKAN DAYA SAING DAN PRODUKTIVITAS

Pembangunan jalan, bandar udara, pelabuhan, dan jalur kereta api menciptakan konektivitas antar wilayah, sehingga kelak akan mendukung daya saing dan produktivitas ekonomi nasional.



Klasifikasi Sektor yang dibangun pada 245 PSN per Juni 2017 berdasarkan Perpres No. 58 Tahun 2017



Ket:

Perpres 58/2017, terdapat 55 proyek + 1 program sebagai PSN senilai Rp. 1.206 Triliun, sehingga kini terdapat 245 proyek + 2 program sebagai PSN.

STADION GBK DAN JAKABARING TERUS DIPERSIAPKAN UNTUK ASIAN GAMES 2018

Setelah sukses menjadi tuan rumah pada tahun 1962, Asian Games 2018 harus menjadi penanda kebangkitan Indonesia dalam berbagai bidang, khususnya ekonomi.

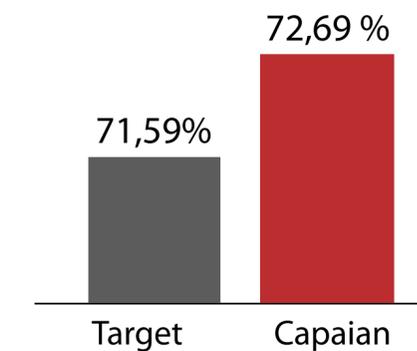


18th ASIAN GAMES
**Jakarta
Palembang
2018**

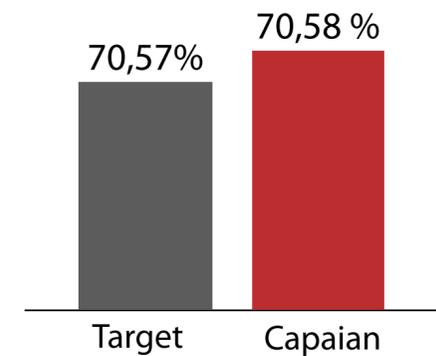
STADION JAKABARING



GELORA BUNG KARNO



JAKABARING SPORT CITY



*Ket: Capaian hingga September 2017

STADION GELORA BUNG KARNO



STADION UTAMA
Progres: 87,84%



STADION RENANG
Selesai



LAPANGAN HOKI
Selesai



ISTORA
Progres: 93,85%



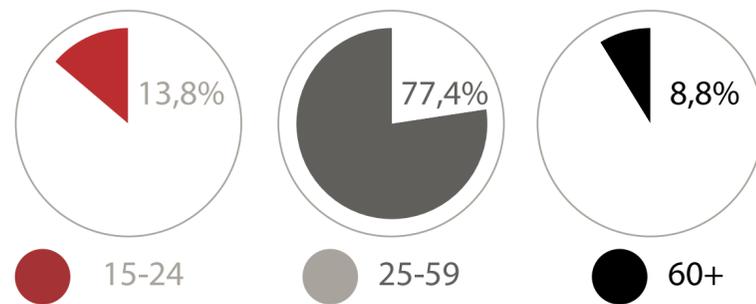
KAWASAN GBK ZONA 2
Progres: 45,69%

Sumber: Kementerian PUPERA

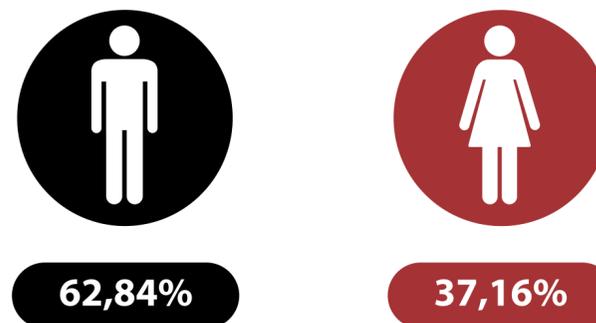
BANTUAN PERMODALAN UNTUK MEMBESARKAN SEKTOR EKONOMI KREATIF

Pemerintah tidak ragu untuk memberikan bantuan permodalan di sektor ini karena besarnya potensi ekonomi kreatif. Sektor inilah yang paling memberi kesempatan kerja kepada orang muda dan kaum perempuan.

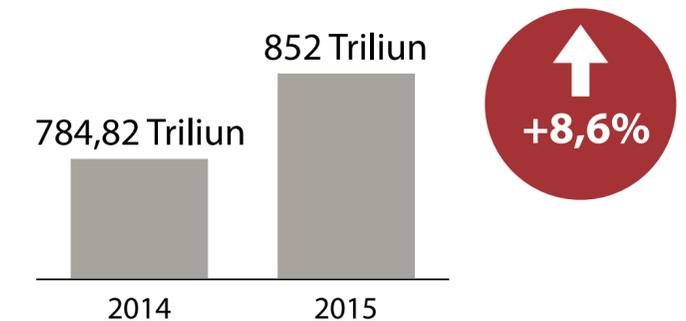
**STATUS UMUR
TENAGA KERJA INDONESIA 2015**



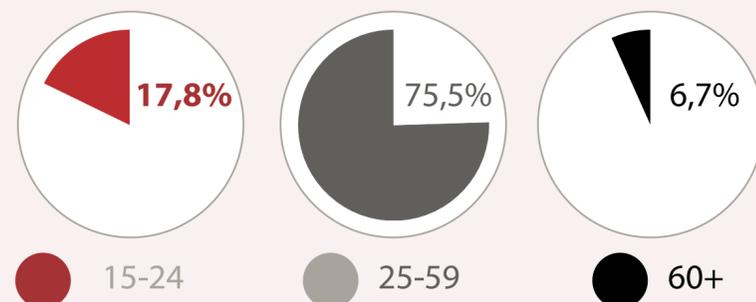
**STATUS GENDER
TENAGA KERJA INDONESIA 2015**



**KONTRIBUSI EKONOMI KREATIF
PADA PDB INDONESIA**



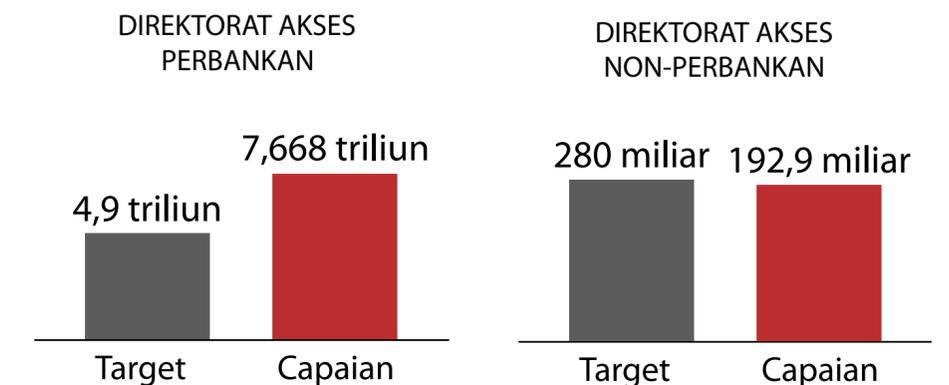
EKONOMI KREATIF



EKONOMI KREATIF



**PERMODALAN SEKTOR EKONOMI KREATIF
(2016-2017)**



TOTAL CAPAIAN: Rp 7,6 T + Rp 192,9 M = Rp 7,86 Triliun

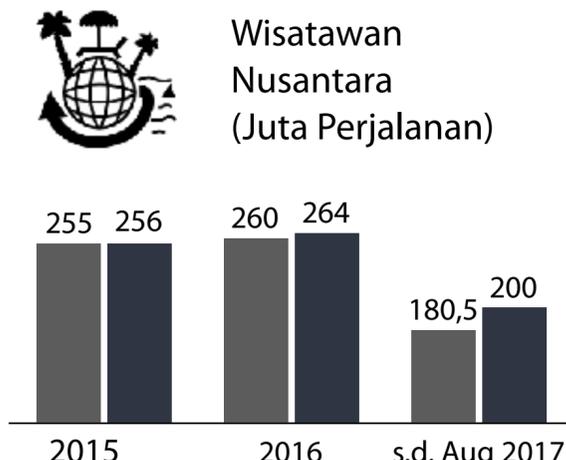
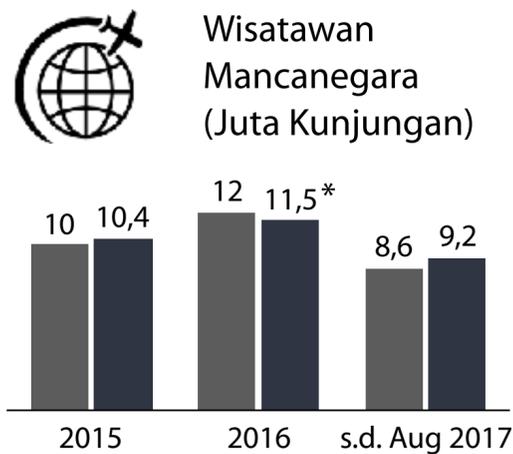
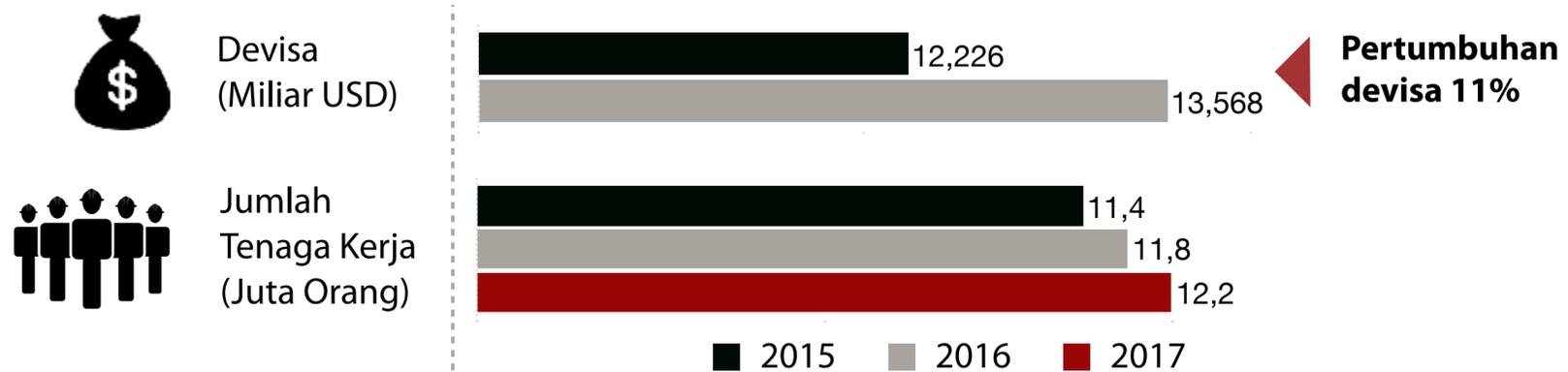
Sumber: BEKRAF

PARIWISATA MASIH MENJADI PRIMADONA

Dari tahun ke tahun sektor pariwisata terus menjadi andalan Pemerintah dalam memberikan kontribusi positif untuk menggerakkan perekonomian nasional.

Perbandingan Pertumbuhan Kedatangan Wisman (Jan-Aug 2017)

| | | |
|---------------|-----------|-------------|
| INDONESIA | ASEAN | GLOBAL |
| 25,68% | 7% | 6,4% |



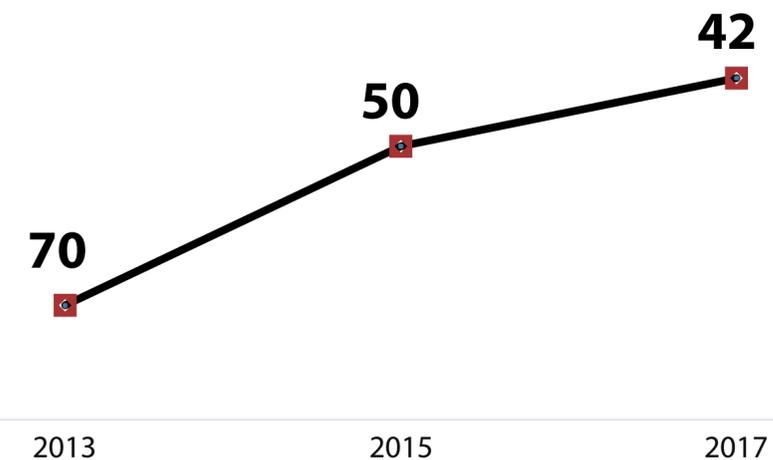
* Belum mencakup 4% total wisman Jan-Des 2016 (11.519.275 -> 12.023.971)

■ TARGET ■ CAPAIAN

MENINGKATNYA PERINGKAT DAYA SAING PARIWISATA INDONESIA

Dengan berbagai upaya komprehensif, mulai dari peningkatan pelayanan hingga promosi destinasi-destinasi baru pariwisata, maka daya saing pariwisata kita pun terus membaik.

Indeks Daya Saing (WEF)



PENGHARGAAN WONDERFUL INDONESIA

- 2016: *Wonderful Indonesia* mendapatkan **46 penghargaan** di **22 negara**
- 2017: *Wonderful Indonesia* mendapatkan **21 penghargaan** di **10 negara**

Sumber: Kementerian Pariwisata



PENINGKATAN PRODUKTIVITAS MELALUI PERBAIKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber Daya Manusia berkualitas diperlukan untuk meningkatkan produktivitas pada pusat- pusat pertumbuhan ekonomi.

Modal terpenting dalam pembangunan ekonomi adalah sumber daya manusia yang berkualitas. Tanpa memperhatikan faktor yang satu ini, kualitas pembangunan ekonomi tentu takkan mengalami peningkatan.

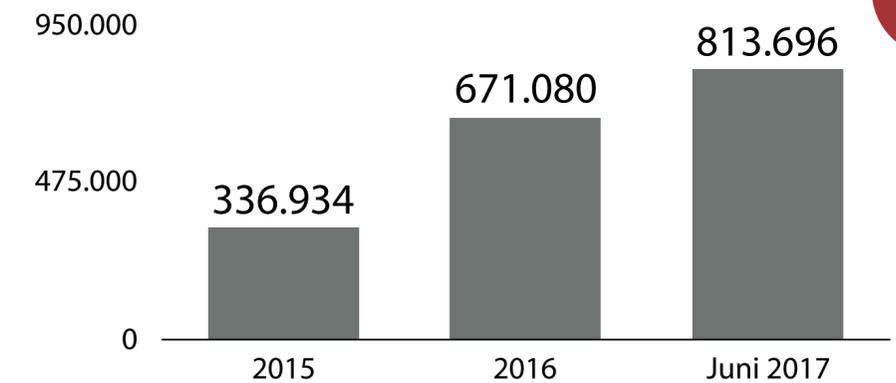
Produktivitas dalam pembangunan ekonomi pun sangat ditentukan oleh sumber daya manusia yang berkualitas. Oleh karena itu, pengembangan sumber daya manusia menjadi salah satu strategi yang penting untuk dijalankan.

Pemerintah juga meningkatkan kualitas pekerja melalui penyempurnaan program- program pendidikan vokasi untuk menjamin ketersediaan tenaga kerja Indonesia yang terampil dan siap bekerja. ■

IKLIM KETENAGAKERJAAN YANG KONDUSIF

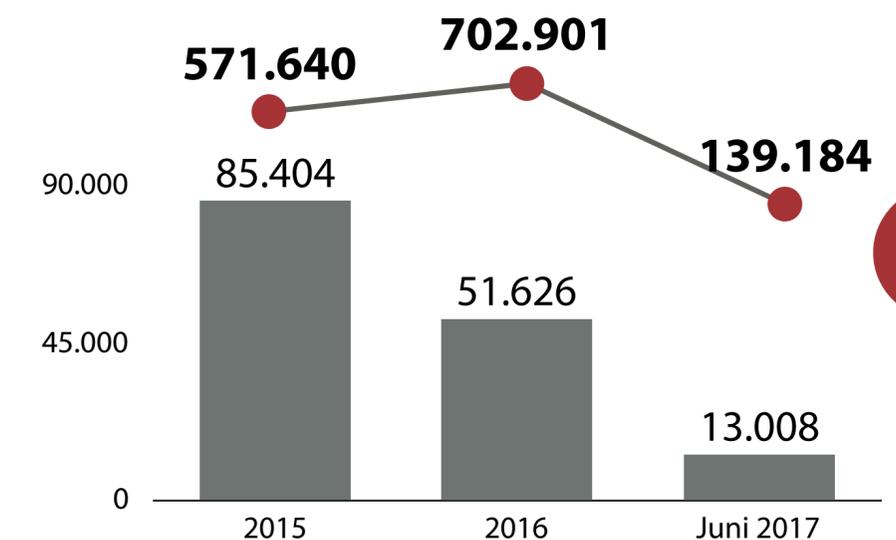
Pendekatan holistik, termasuk memberikan perlindungan yang memadai, telah meningkatkan produktivitas tenaga kerja Indonesia.

JUMLAH KEPESERTAAN ASURANSI TKI



MENURUNNYA JAM KERJA YANG HILANG

■ : Jumlah Tenaga Kerja
● : Jam yang Hilang



Sumber: Kementerian Tenaga Kerja

PERLINDUNGAN TERHADAP TENAGA KERJA INDONESIA (TKI)

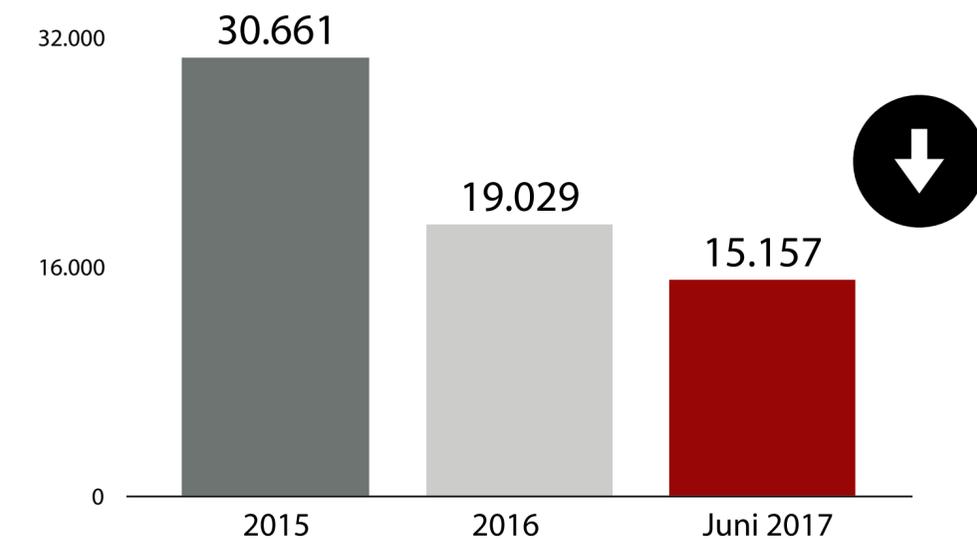
Pemerintah melakukan perlindungan secara komprehensif terhadap TKI, sehingga kasus-kasus yang menimpa TKI menurun.

PEMBENTUKAN 21 SATGAS TKI



Melalui satgas TKI, dalam kurun waktu 2015-2016 telah **dicegah 2.894 TKI Non-Prosedural**

PENURUNAN JUMLAH TKI BERMASALAH (orang)

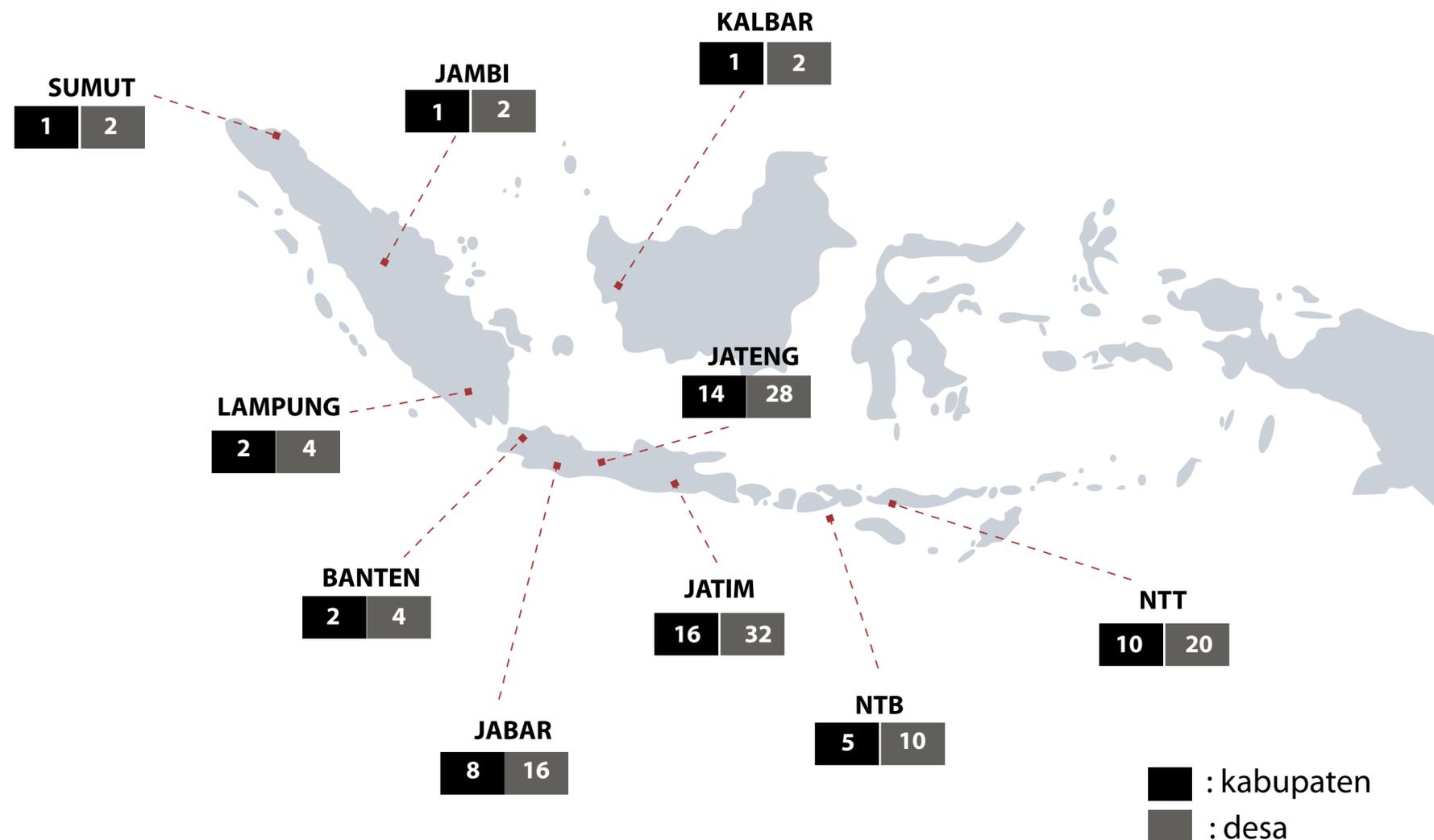


Sumber: Kementerian Tenaga Kerja

DESA MIGRAN PRODUKTIF

Pemerintah menjalankan program Desa Migran Produktif (Desmigratif) agar TKI dapat memberikan nilai lebih bagi desa asalnya, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan warganya.

SEBARAN DESMIGRATIF TAHUN 2017



Anak-anak buruh migran mengikuti Program Parenting Desa Migran Produktif



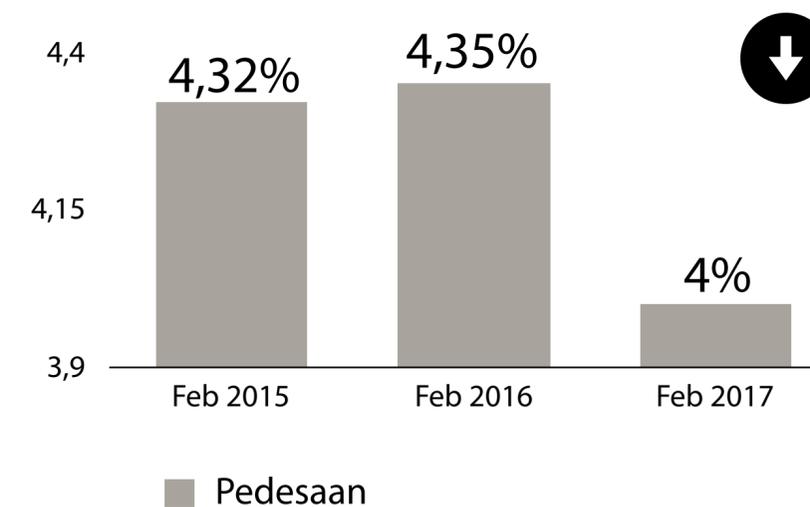
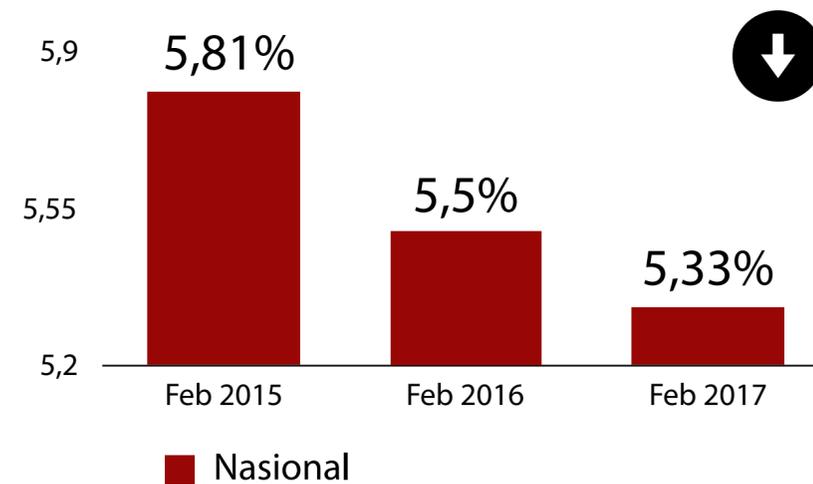
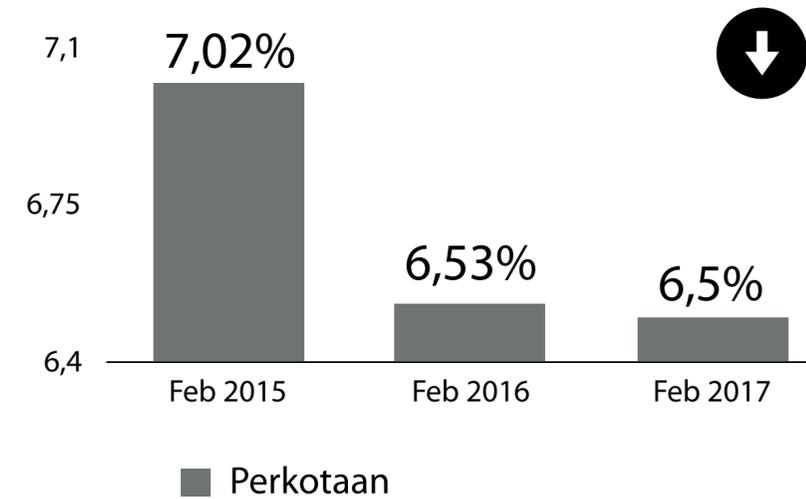
Pelatihan usaha produktif di Desa Kuripan dan Desa Kenanga

PENURUNAN ANGKA PENGANGGURAN

Jumlah pengangguran terus menurun baik di pedesaan maupun perkotaan, meskipun kita masih menghadapi tantangan ekonomi dari dalam dan luar negeri.



**PERSENTASE ANGKA PENGANGGURAN
2015-2017**

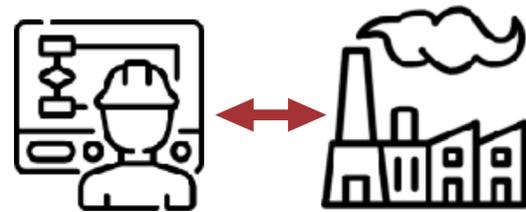


Sumber: BPS

PELATIHAN DAN PENDIDIKAN VOKASI, SERTIFIKASI, SERTA PELIBATAN INDUSTRI

Pemerintah menjalankan program pendidikan vokasi dan sertifikasi yang melibatkan ratusan perusahaan sebagai pembina SMK di berbagai provinsi.

LINK AND MATCH SMK DAN INDUSTRI



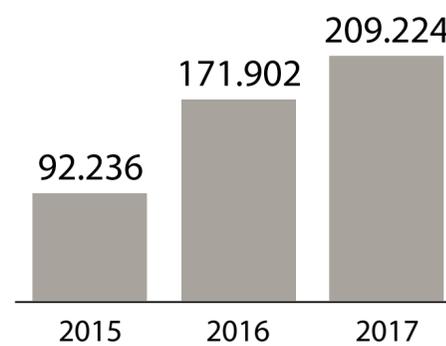
Sampai saat ini
terdapat 308 industri/ perusahaan yang membina **1.035 SMK**.

* SMK dengan prodi industri

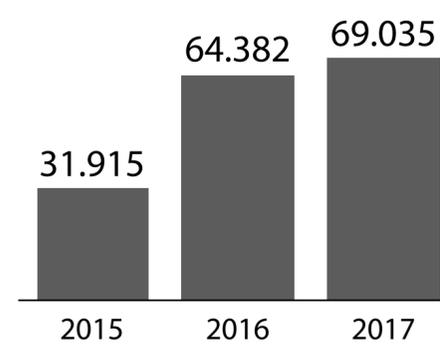


Targetnya tercapai **1 juta tenaga industri** yang **tersertifikasi kompetensi**.

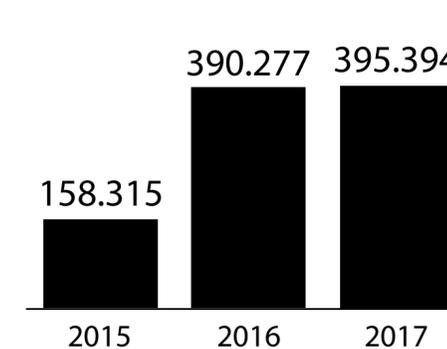
PELATIHAN (jumlah orang)



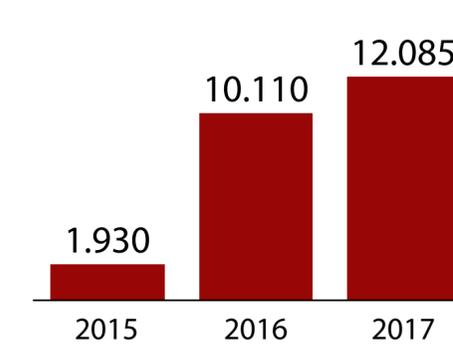
PEMAGANGAN (jumlah orang)



SERTIFIKASI (jumlah orang)



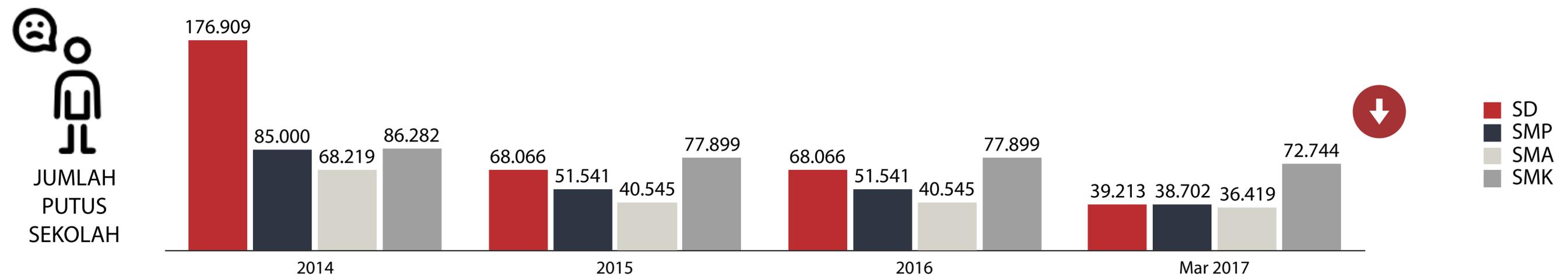
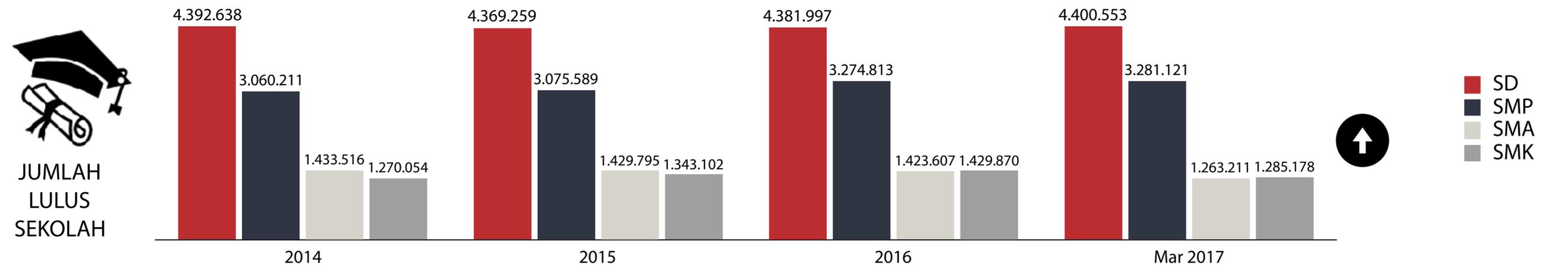
PRODUKTIVITAS (jumlah orang)



Sumber: Kementerian Tenaga Kerja

JUMLAH LULUS SEKOLAH MENINGKAT, JUMLAH PUTUS SEKOLAH MENURUN

Jumlah murid putus sekolah yang menurun serta jumlah murid lulus sekolah yang meningkat menjadi penanda penting bagi tercapainya akses dan kualitas pendidikan yang lebih baik.



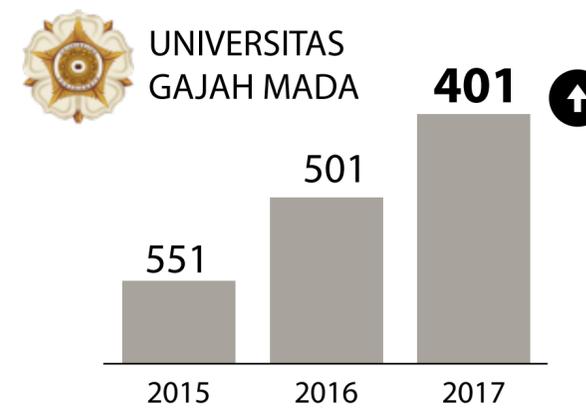
Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

PENDIDIKAN NASIONAL DENGAN PRESTASI INTERNASIONAL

Pemerintah berupaya mengatasi tantangan pendidikan tinggi nasional agar semakin banyak berprestasi pada tingkat internasional.



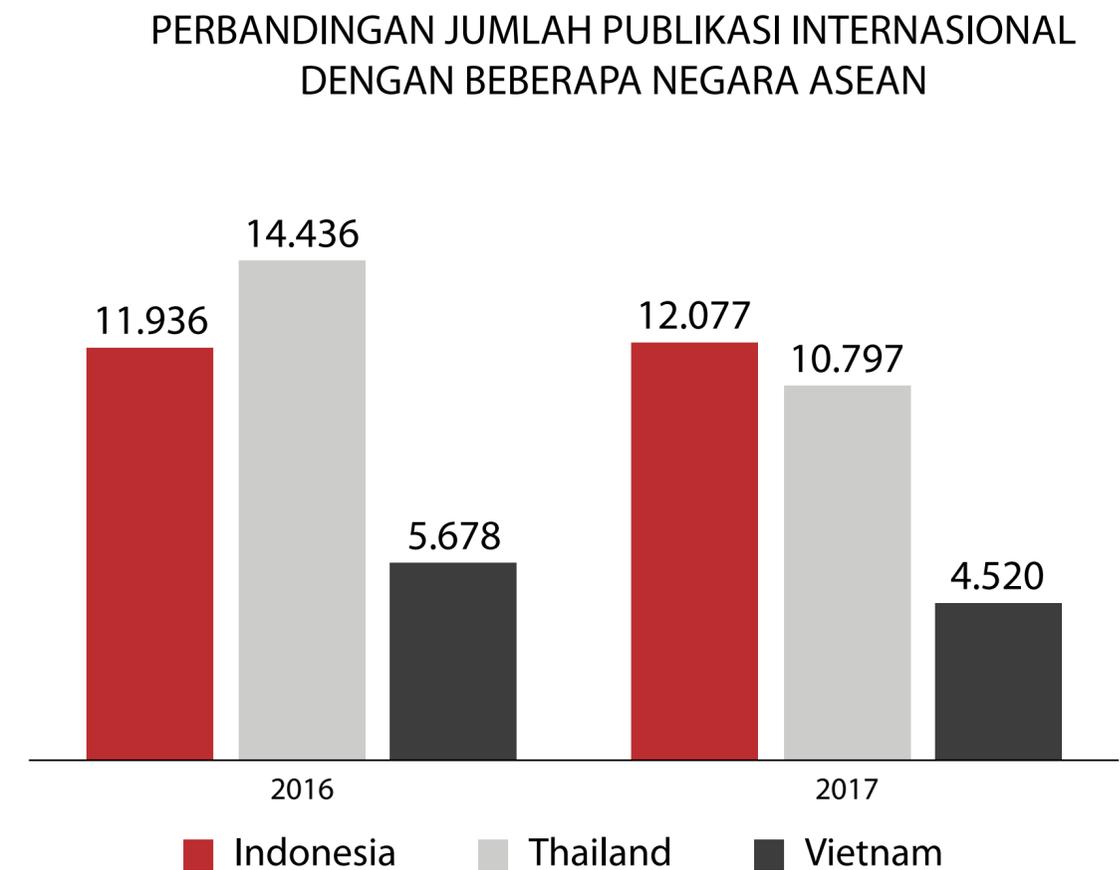
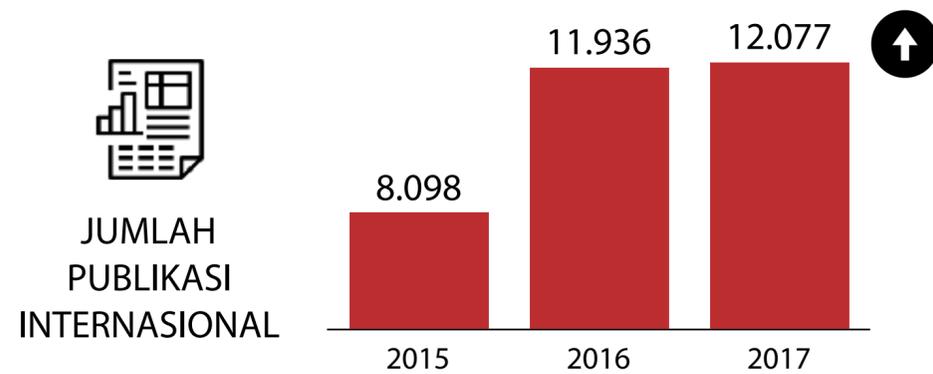
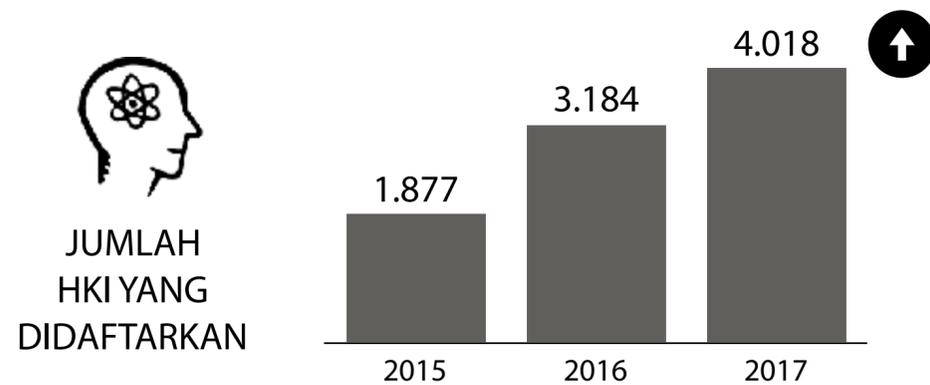
PERINGKAT UNIVERSITAS
BERDASARKAN
QS WORLD UNIVERSITY RANKING



Sumber: Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi

PERBAIKAN PRODUKTIVITAS DUNIA RISET DAN AKADEMIS

Pemerintah berupaya terus menerus untuk melakukan perbaikan kualitas pendidikan tinggi melalui perbaikan produktivitas hasil riset dan akademis Nasional.



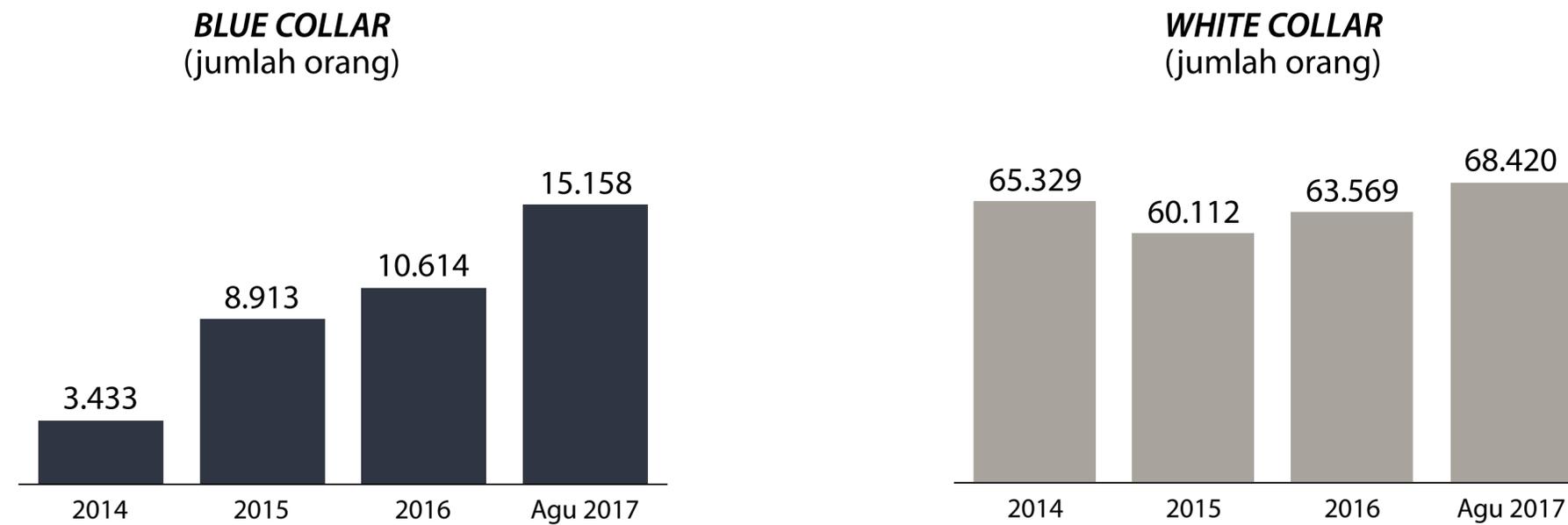
*capaian hingga Oktober 2017

Sumber: Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi

JUMLAH TENAGA KERJA ASING TERPANTAU DAN TERKENDALI

Pemerintah hanya memberikan izin kerja bagi tenaga kerja asing yang keahliannya khusus dan melarang yang hendak bekerja sebagai buruh kasar.

DAFTAR IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING (IMTA) YANG DITERBITKAN



Keterangan;

Blue Collar: Teknisi Terampil

White Collar: Profesional, Konsultan, Manajer, Direksi, *Supervisor*, dan Komisaris

(Menurut Permenaker 357/2013; Permanaker 359/2013; Permenaker 14/2015; Permenaker 15/2015)

Sumber: Kementerian Tenaga Kerja



MEMBANGUN POROS MARITIM INDONESIA

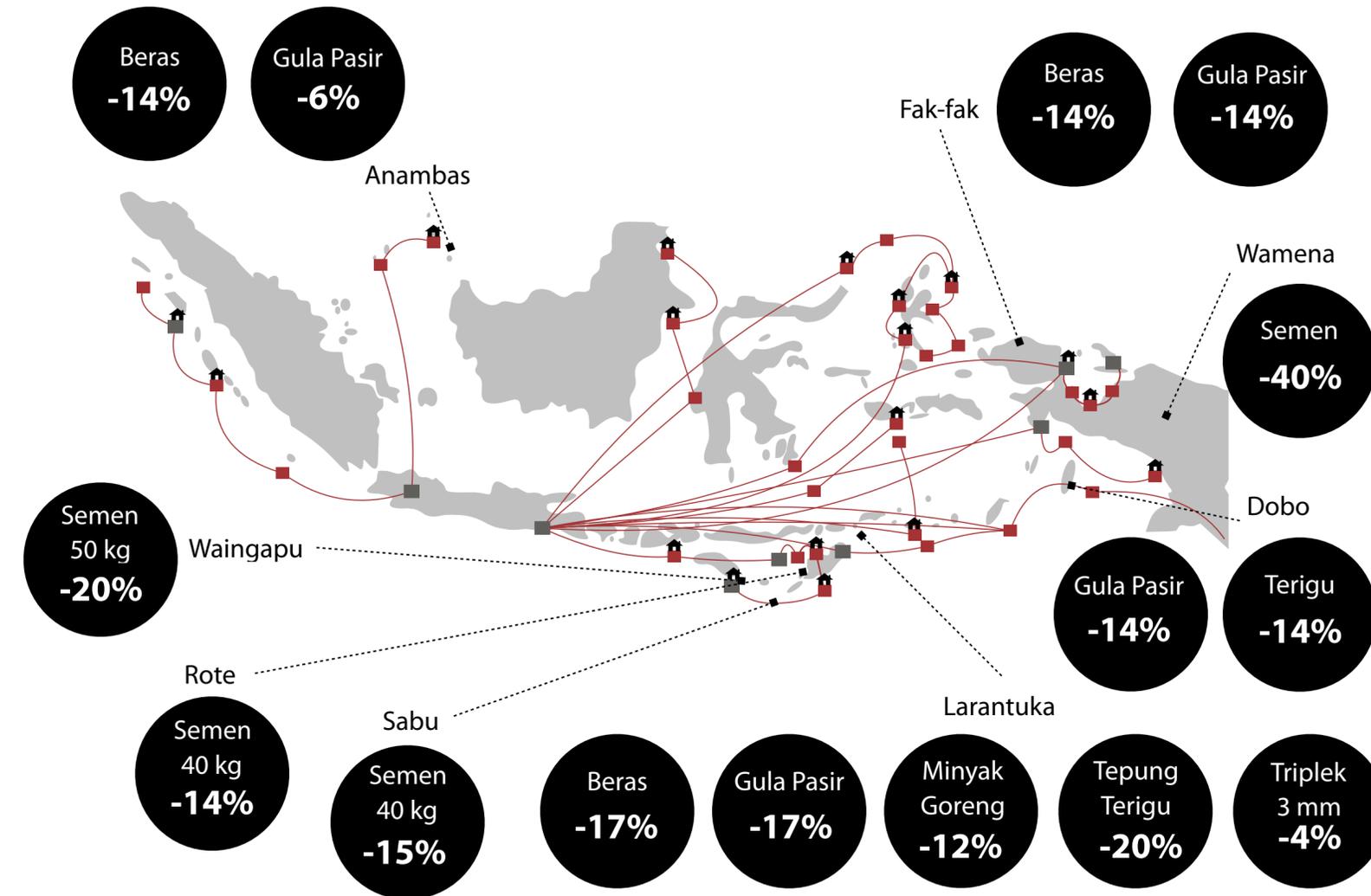
Tujuan membangun Poros Maritim Indonesia adalah untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Itulah mengapa Pemerintah membangun berbagai pelabuhan dan jalur tol laut. Sekaligus melindungi sumber daya laut kita dengan penegakan hukum dan penegasan kedaulatan atas laut.

Kita membangun Poros Maritim Indonesia dengan pembangunan pelabuhan dan tol laut, untuk menurunkan harga-harga barang di jalur yang dilalui. Nelayan dilindungi dengan penyediaan asuransi nelayan. Sumber daya maritim dilindungi dan kedaulatan atas laut ditegaskan.

Begitu juga berbagai potensi kelautan kita bangkitkan seperti industri pengolahan ikan, bioteknologi, pertambangan dan energi, wisata bahari, transportasi laut, jasa maritim, sumber daya pulau-pulau kecil, dan hutan mangrove. ■

TOL LAUT MENURUNKAN HARGA

Tol laut dan pengintegrasian moda transportasi logistik semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, khususnya dalam upaya mengendalikan harga berbagai kebutuhan bahan pokok.



10

Pelabuhan yang diusahakan
(PT. Pelabuhan Indonesia)

34

Pelabuhan yang tidak diusahakan
(Unit Pelaksana Teknis Kepelabuhanan
Kanwil Departemen Perhubungan)

19

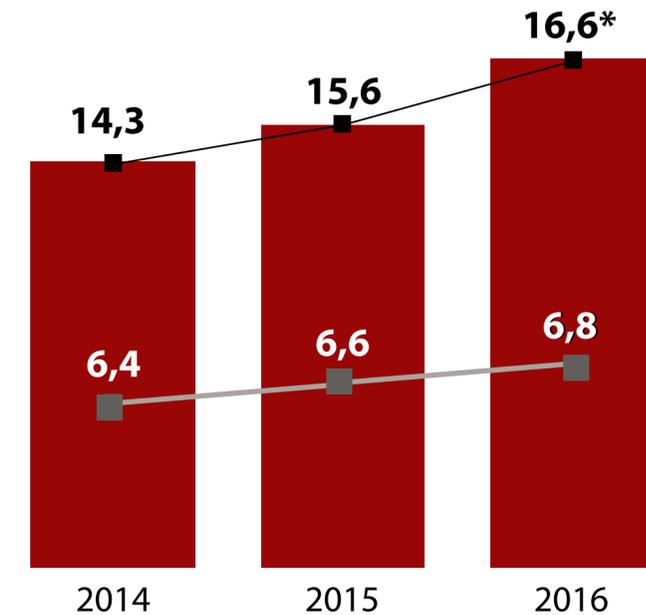
Rumah Kita
(Penyediaan area pergudangan untuk
menunjang program tol laut)

Sumber: Kementerian Perdagangan

PERIKANAN BUDIDAYA MENINGKAT

Tidak saja perikanan tangkap, perikanan budidaya menunjukkan kenaikan cukup signifikan. Pemerintah mendorong penggunaan pakan mandiri di sentra-sentra perikanan budidaya, sehingga mengurangi ongkos produksi dan impor pakan.

JUMLAH PRODUKSI IKAN (JUTA TON)

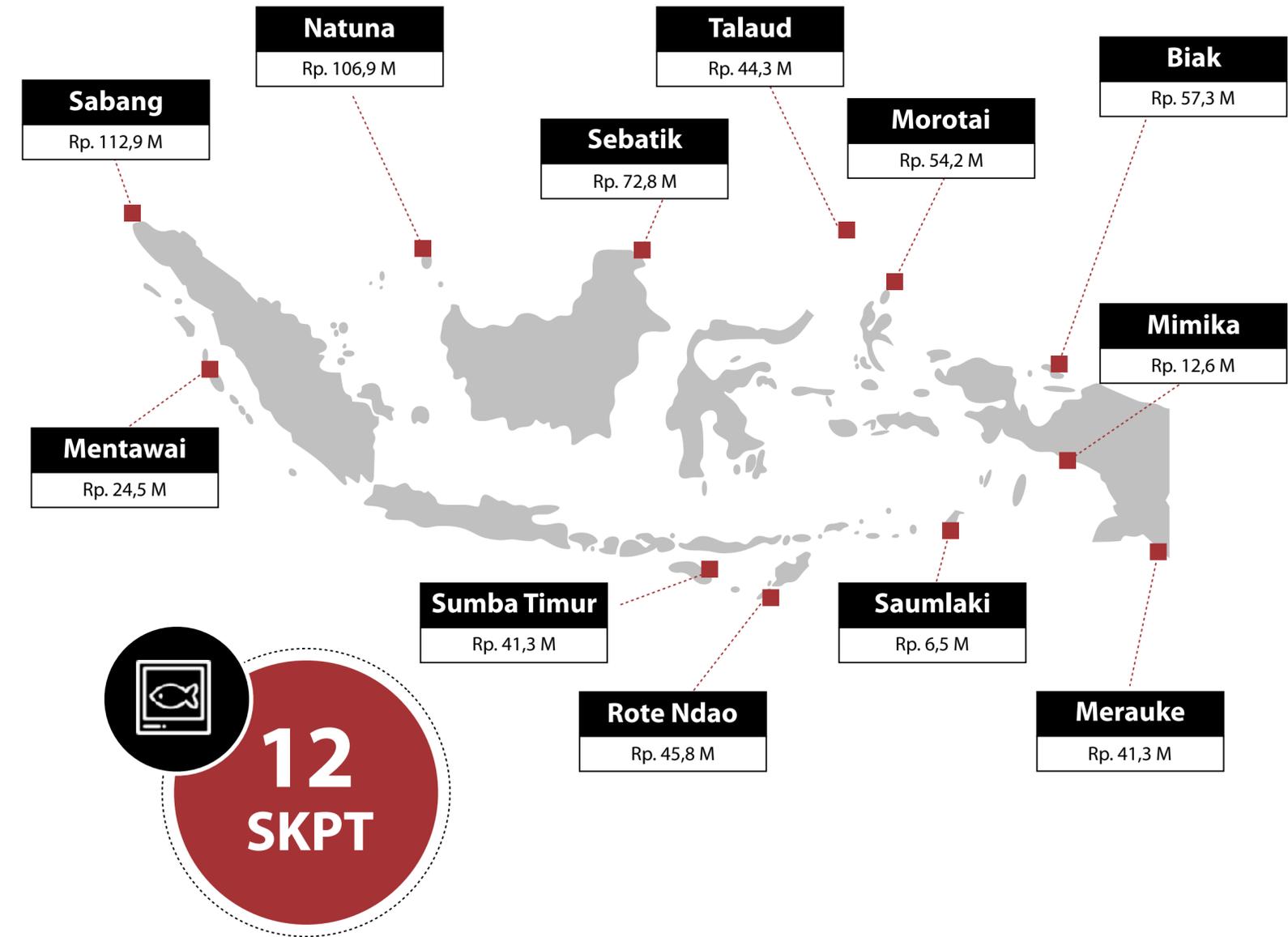


- Perikanan Budidaya
- Perikanan Tangkap
- * Angka sementara

Sumber: Kementerian Kelautan dan Perikanan

SENTRA KELAUTAN TERUS DIPERBANYAK

Pengembangan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) terus dipacu guna memperbanyak pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil.

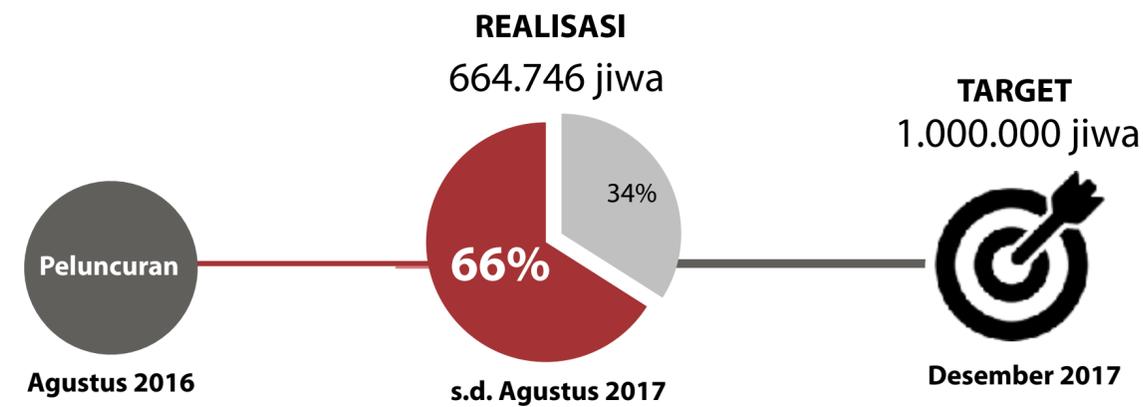


12 SKPT

Sumber: Kemenko Maritim

ASURANSI UNTUK NELAYAN

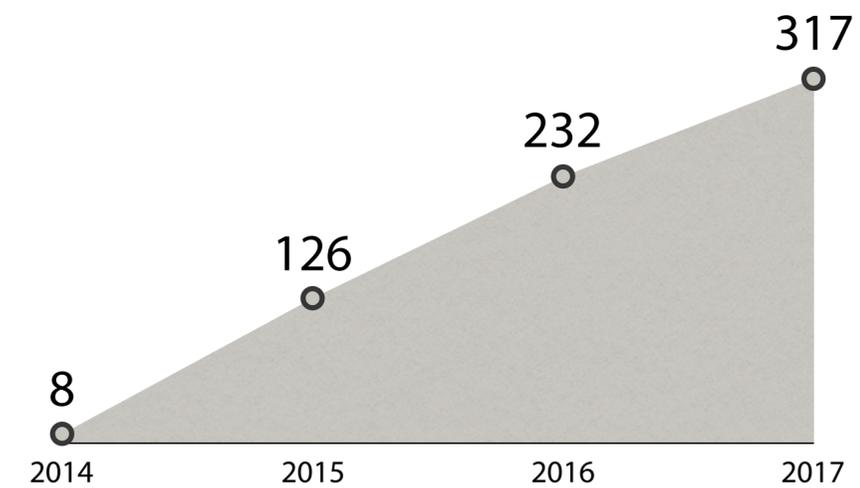
Pemerintah terus berupaya memberikan layanan perlindungan asuransi kepada para nelayan.



PENEGAKAN KEDAULATAN MARITIM

Menjaga sumberdaya laut menjadi prioritas utama Pemerintah agar kekayaan laut Indonesia dapat digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

PENENGGELAMAN KAPAL PENCURI IKAN (armada)



Sumber: Kementerian Kelautan dan Perikanan

BAGIAN II
PENGENTASAN KEMISKINAN DAN
KEBIJAKAN AFIRMATIF

IKHTISAR



MEMBANGUN MANUSIA INDONESIA



Pembangunan manusia Indonesia menunjukkan hasil dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Kenaikan IPM tersebut tidak terlepas dari kerja bersama kita dalam meningkatkan cakupan Program Kartu Indonesia Sehat (KIS), Program Kartu Indonesia Pintar (KIP), Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), dan program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) untuk anak balita dan ibu hamil.

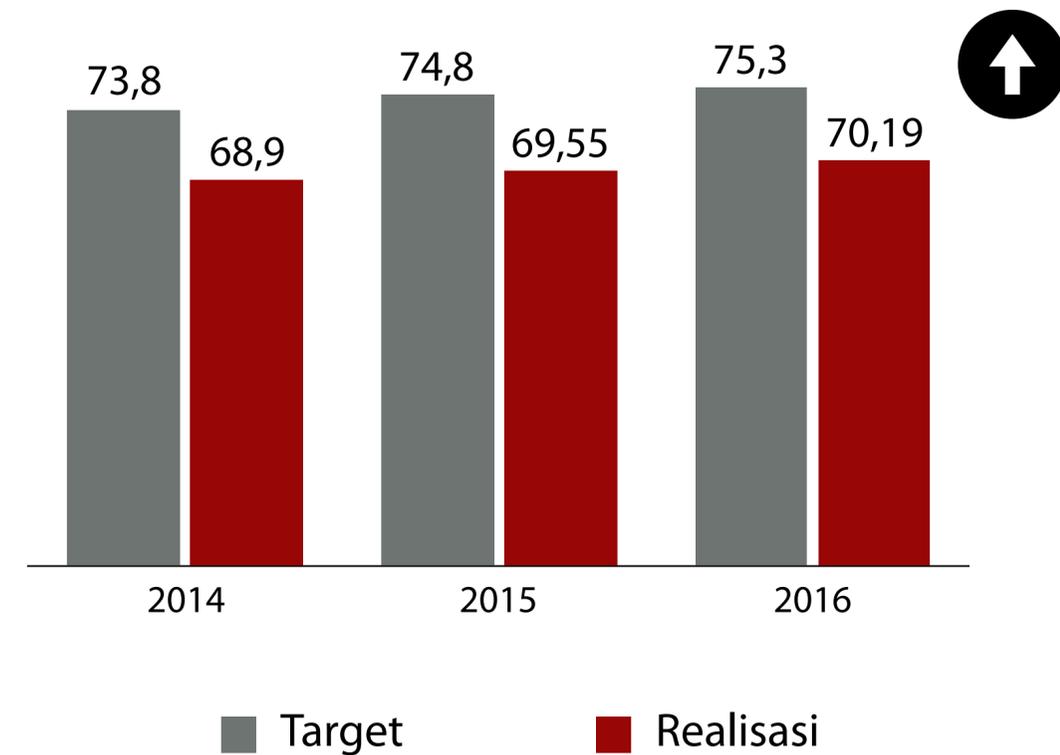
Pemerintah terus memastikan bahwa kebutuhan dasar seluruh warga negara dapat terpenuhi melalui peningkatan IPM dan kualitas hidup masyarakat. Termasuk kelompok masyarakat yang selama ini belum turut merasakan hasil pembangunan secara adil.

Kawasan-kawasan hutan diberdayakan untuk perbaikan ekonomi masyarakat sekitar. Perempuan dan anak juga turut disertakan dalam proses pembangunan agar dapat menikmati hasilnya.

Kesejajaran terus didorong agar hadir di wilayah Papua dan Papua Barat, sembari partisipasi masyarakatnya ditingkatkan. Berbagai kebijakan dan program dihadirkan untuk menekan ketimpangan dan ketidakadilan yang sebelumnya terjadi. Sekaligus untuk mengentaskan kemiskinan di wilayah tersebut. ■

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

Kualitas hidup manusia yang diukur berdasarkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menunjukkan tren meningkat. Pemerintah berkomitmen untuk memperbaiki angka-angka ini agar bisa lebih baik lagi.



Sumber: Badan Pusat Statistik



PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR ADALAH JALAN MENGATASI KEMISKINAN

Pangan yang cukup, papan yang layak, dan pakaian yang pantas, adalah kebutuhan dasar yang harus tersedia bagi setiap masyarakat. Penyediaan air bersih dan air minum adalah salah satu penunjangnya.

Pendidikan dan kesehatan yang dapat dinikmati seluruh masyarakat, serta perhatian khusus bagi kelompok termiskin terus diperkuat. Pemerintah juga terus memperkuat pelaksanaan jaminan sosial dengan fokus utama menurunkan angka kematian ibu dan anak, melindungi generasi baru dengan vaksin yang terjangkau, dan meningkatkan ketersediaan sanitasi.

Harga-harga pangan dijaga dan sistem produksinya ditingkatkan dengan penyediaan infrastruktur yang tepat dan kebijakan yang berorientasi pada peningkatan produktivitas.

Pemerintah juga membangun fasilitas perumahan bagi masyarakat yang paling membutuhkan. Subsidi energi, terutama listrik, terus diperkuat dengan menghadirkan kebijakan subsidi yang tepat sasaran. Sementara masyarakat yang mengalami gangguan bencana dilindungi, sehingga memastikan kehadiran Negara bagi masyarakat yang paling memerlukan. ■

BANTUAN SOSIAL BAGI MASYARAKAT

Pemerintah terus meningkatkan kualitas hidup seluruh masyarakat melalui bantuan pendidikan, kesehatan dan berbagai bentuk jaminan sosial lainnya.



Kartu Keluarga Sejahtera

| | |
|----------|-------------------|
| Anggaran | Rp 12,8 Triliun |
| Target | 6 Juta Keluarga |
| Capaian | 5,9 Juta Keluarga |



Kartu Indonesia Sehat

| | |
|----------|-----------------|
| Anggaran | Rp 25,5 Triliun |
| Target | 92,4 Juta Orang |
| Capaian | 92,2 Juta Orang |



Kartu Indonesia Pintar

| | |
|----------|-----------------|
| Anggaran | Rp 12,5 Triliun |
| Target | 18,9 Juta Siswa |
| Capaian | 8 Juta Siswa |

Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, BPJS Kesehatan

PELAYANAN KESEHATAN SEMAKIN MERATA DAN MUDAH

Pemerintah menargetkan peserta Jaminan Kesehatan Nasional akan mencapai 100 persen penduduk di tahun 2019. Sampai dengan tahun 2017 terdapat lebih dari 90 juta yang dibebaskan membayar iuran. Jumlah Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Rumah Sakit Provider pun terus ditingkatkan.

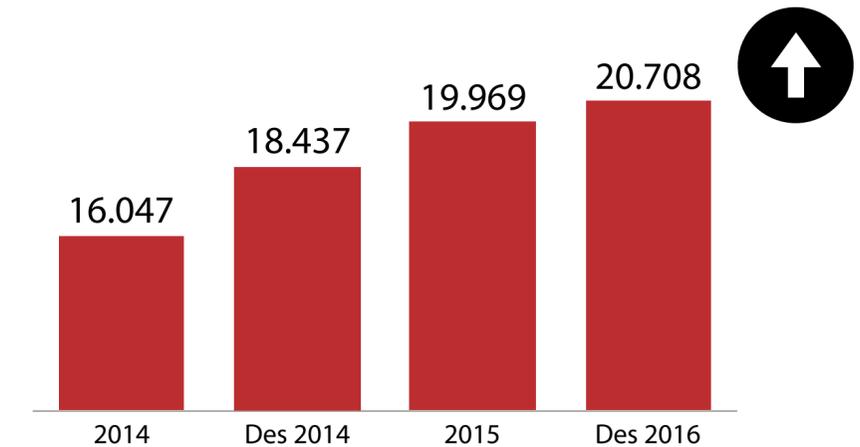


92.269.142

Jumlah penerima Kartu Indonesia Sehat yang dibebaskan dari iuran (s.d. Oktober 2017)



JUMLAH FKTP PROVIDER JKN (unit)

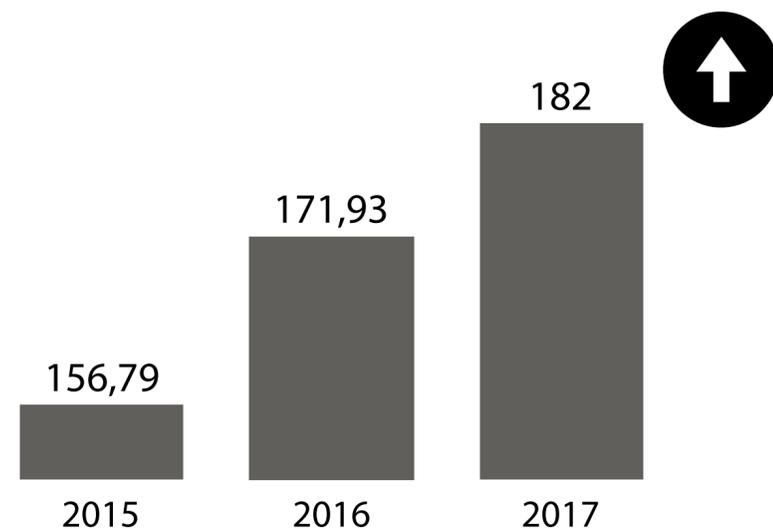


*FKTP : Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama



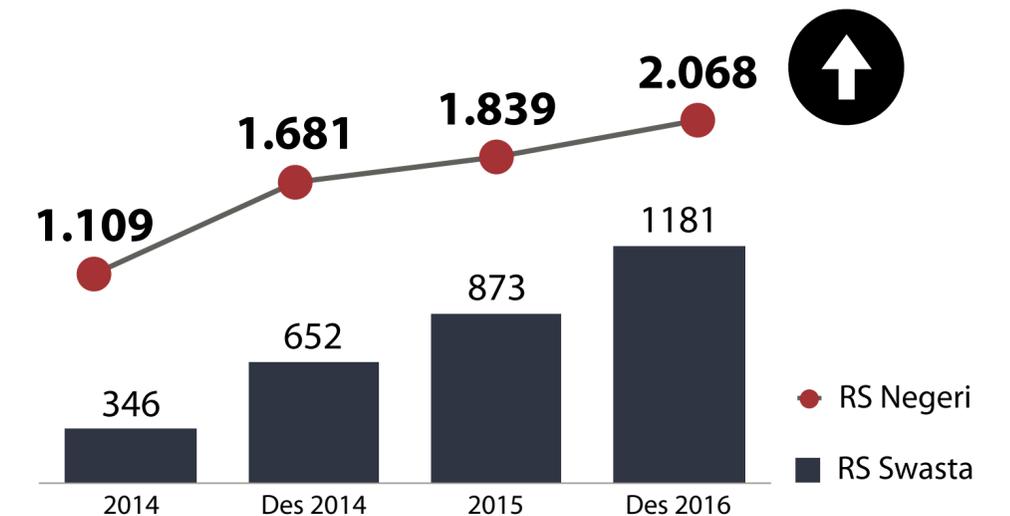
PESERTA JKN (DALAM JUTA JIWA)

*JKN : Jaminan Kesehatan Nasional



JUMLAH RS PROVIDER JKN (unit)

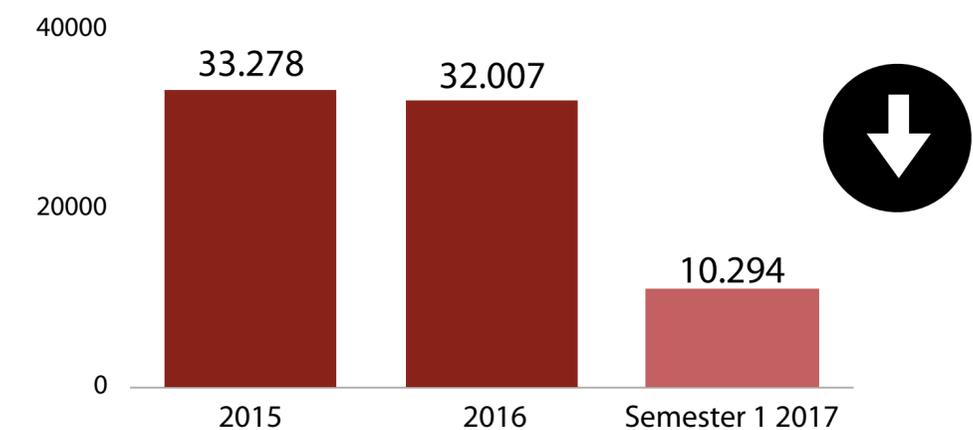
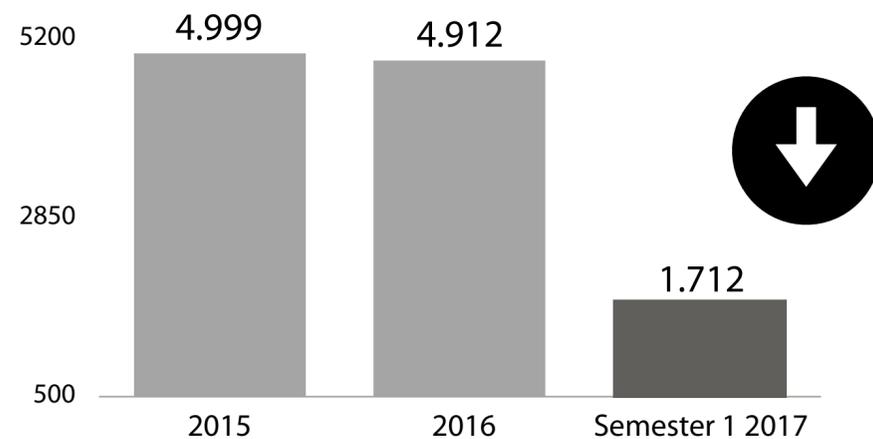
*RS: Rumah Sakit



Sumber: Kementerian Kesehatan

PERBAIKAN KUALITAS KESEHATAN IBU DAN ANAK

Secara bertahap, Pemerintah telah berhasil menurunkan angka kematian ibu dan anak serta balita *stunting*.



Keterangan:

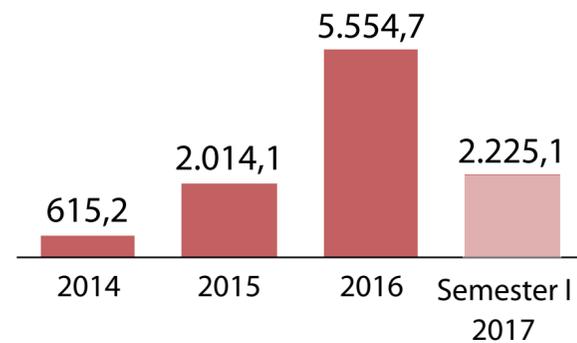
Stunting adalah kondisi di mana seorang anak memiliki tinggi badan lebih rendah dari standar usianya dengan gangguan perkembangan otak dan fisik yang disebabkan karena kekurangan gizi yang lama sejak dari janin sampai umur 2 tahun.

Sumber: Kementerian Kesehatan

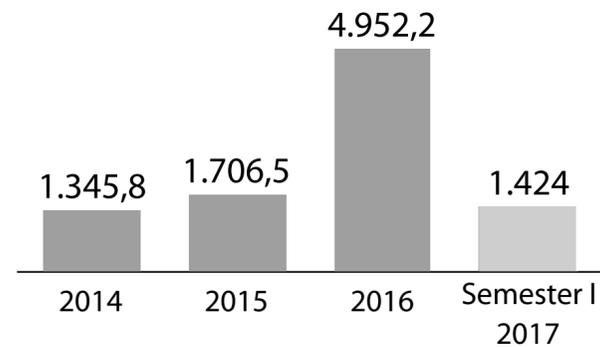
KESEHATAN UNTUK GENERASI MENDATANG

Ibu dan anak menjadi perhatian bukan semata-mata karena alasan kesehatan, tapi karena keduanya akan menjadi penentu kualitas generasi mendatang yang diharapkan bisa bersaing dan unggul.

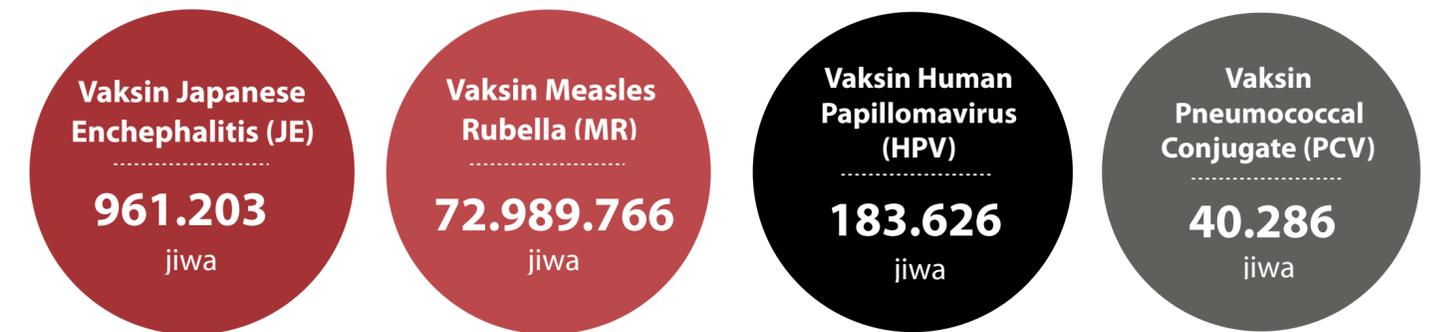
ALOKASI PMT UNTUK BALITA (Ton)



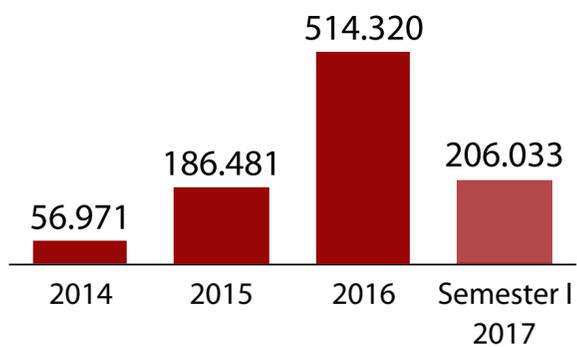
ALOKASI PMT UNTUK BUMIL (Ton)



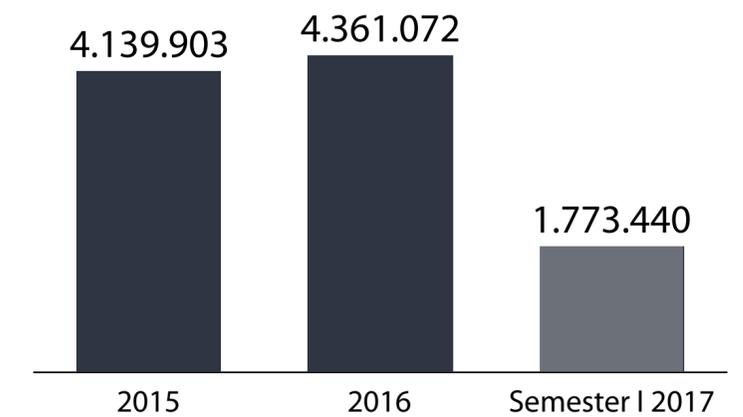
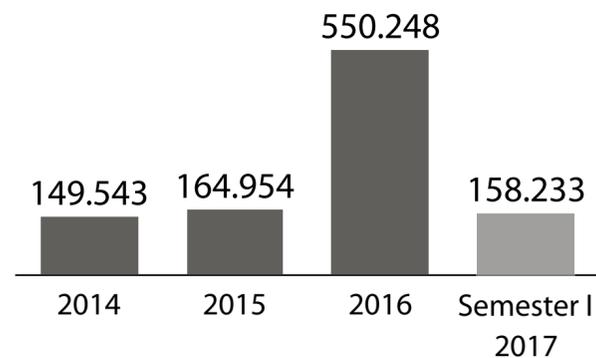
TARGET VAKSINASI 2017



BALITA PENERIMA PMT (jiwa)



BUMIL PENERIMA PMT (jiwa)



***BUMIL** : Ibu Hamil

***PMT : Pemberian Makanan Tambahan** adalah program intervensi Pemerintah bagi balita yang menderita kurang gizi dimana tujuannya untuk meningkatkan status gizi anak.

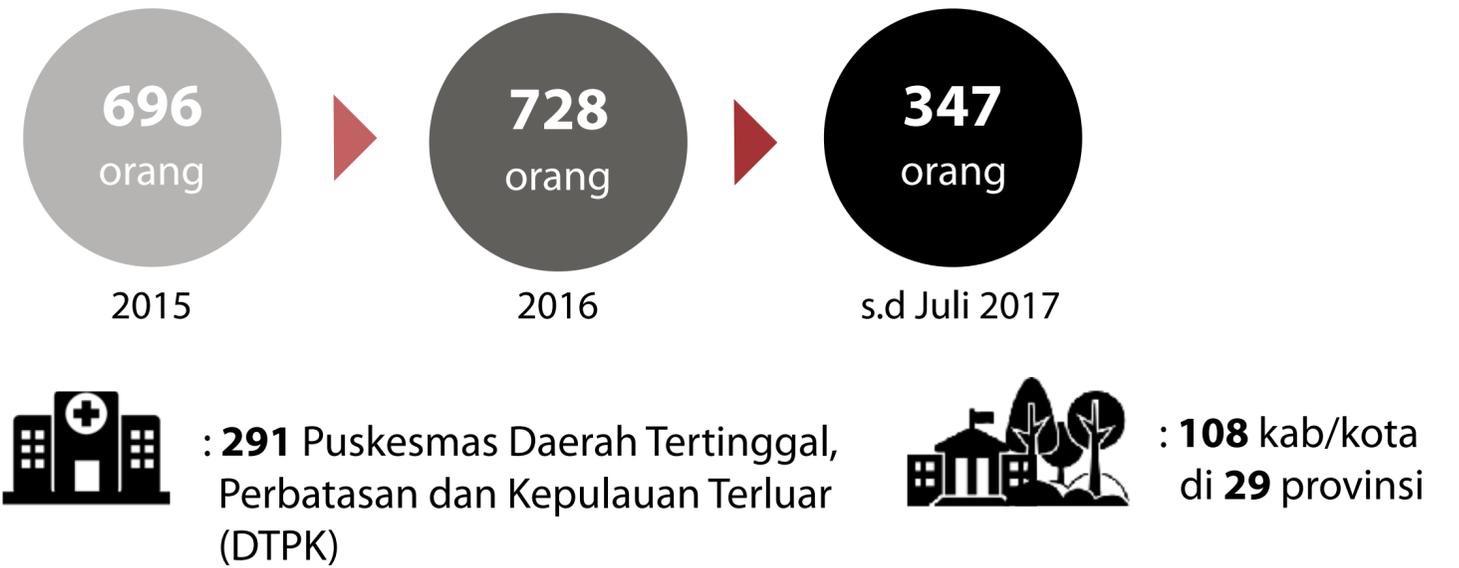
Sumber: Kementerian Kesehatan

MENGABDI MELALUI PELAYANAN KESEHATAN

Ketimpangan pelayanan kesehatan di berbagai wilayah perlu diatasi dengan penyediaan fasilitas kesehatan dan yang terpenting adalah tenaga kesehatan yang berkomitmen melayani sepenuh hati.



PENEMPATAN NUSANTARA SEHAT



WAJIB KERJA DOKTER SPESIALIS (WKDS)

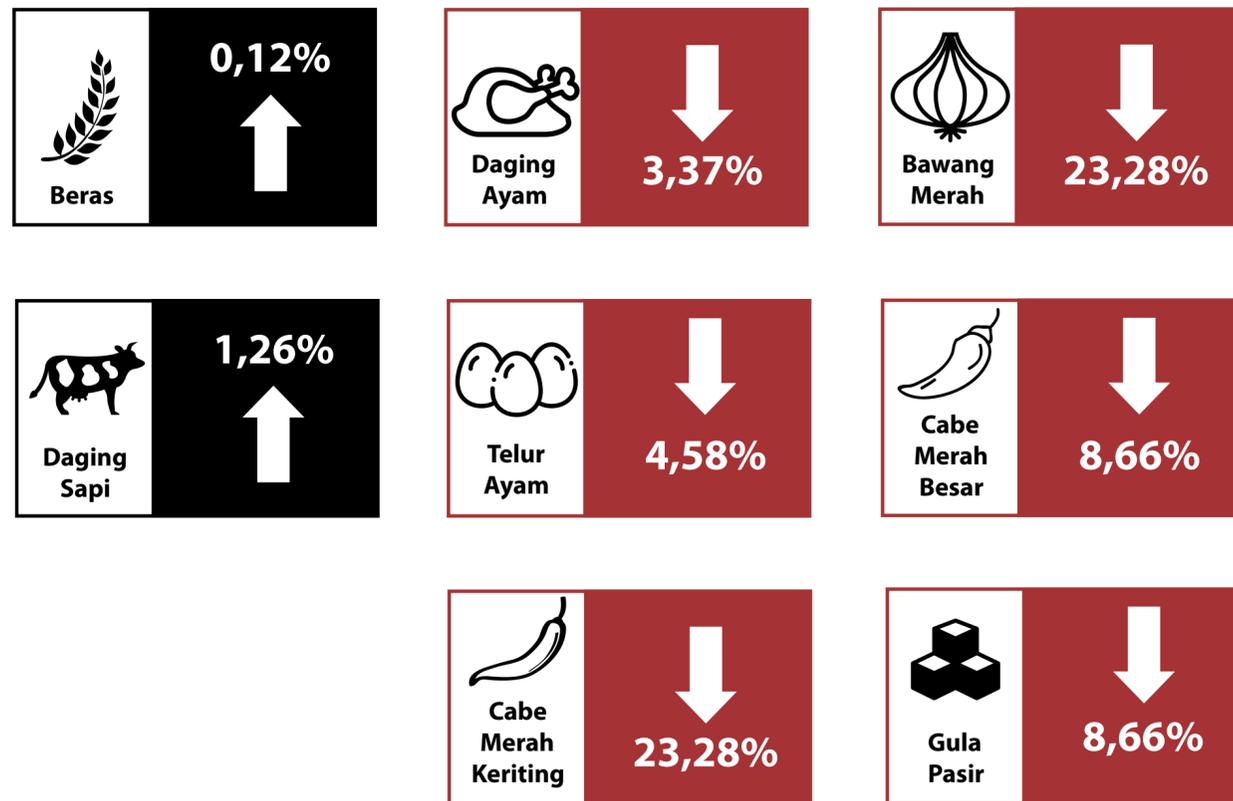


Sumber: Kementerian Kesehatan

PENGENDALIAN HARGA PANGAN

Agar masyarakat tak terlalu terbebani, Pemerintah berupaya mengendalikan harga pangan selama bulan Ramadhan.

PERKEMBANGAN HARGA KOMODITI PADA RAMADHAN 2017

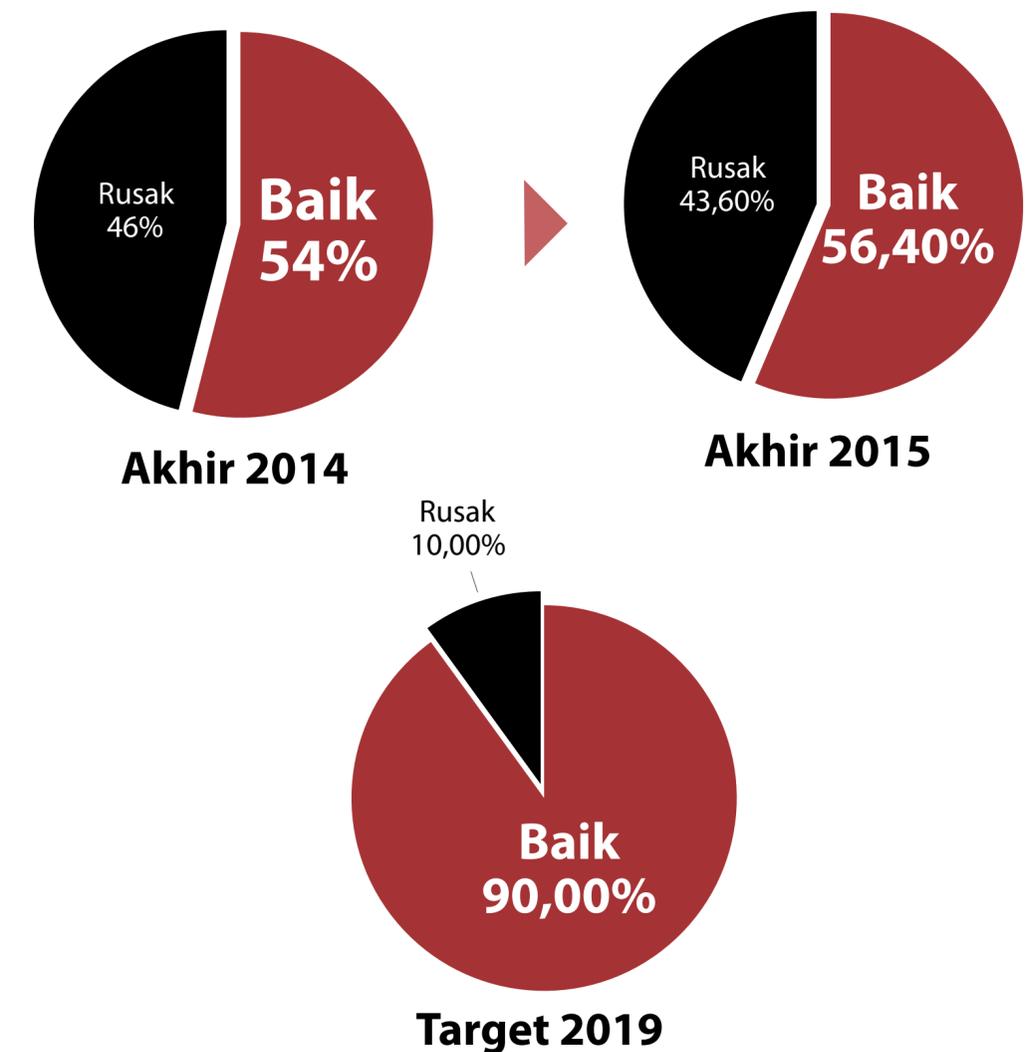


Sumber: Kementerian Perdagangan

PERBAIKAN IRIGASI

Perbaikan irigasi dilakukan untuk memastikan sawah-sawah teraliri untuk menunjang produksi pangan atau padi.

TOTAL AREAL IRIGASI : 7,14 JUTA HA

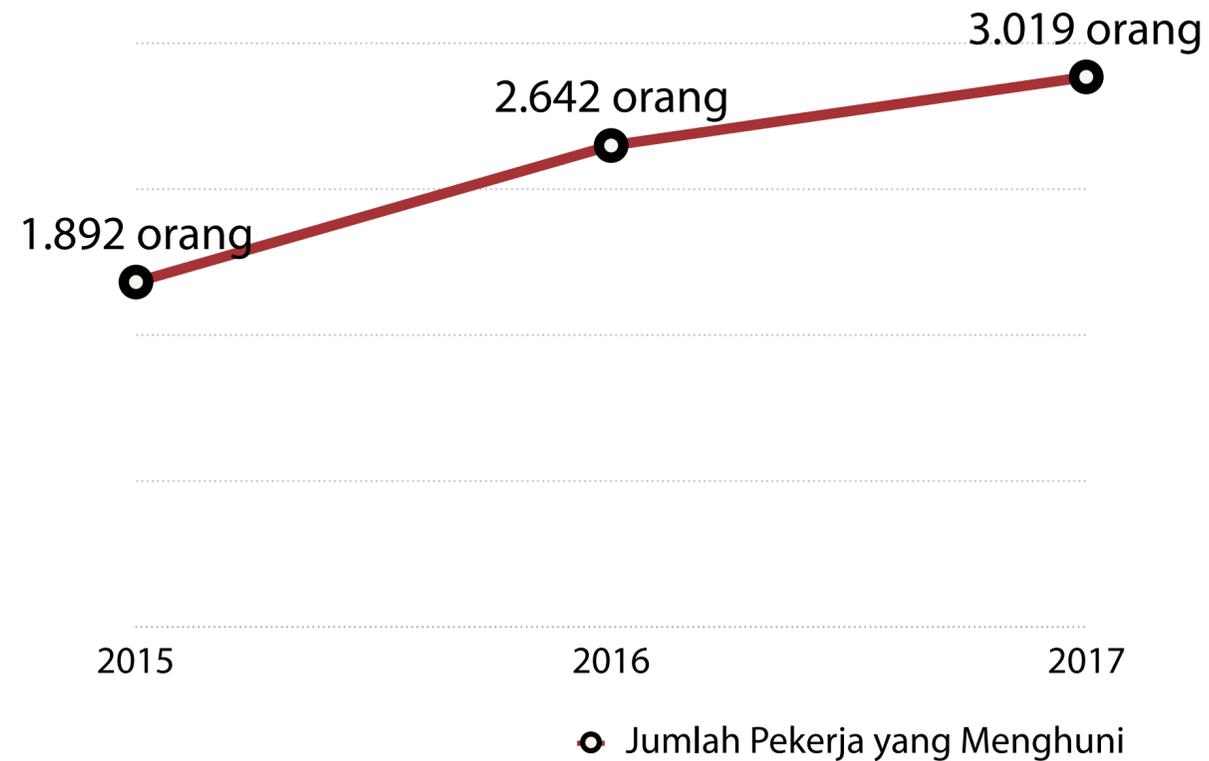


Sumber: Kementerian PUPR

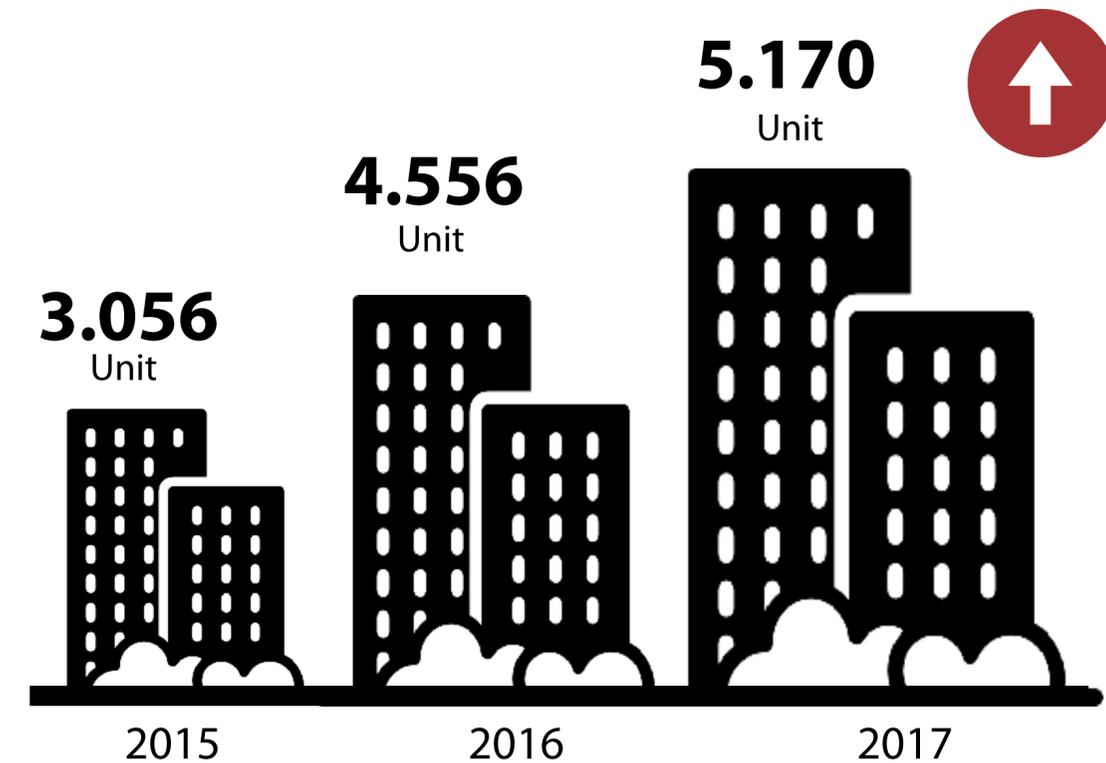
PEMBANGUNAN RUSUNAWA UNTUK PEKERJA

Secara bertahap Pemerintah terus meningkatkan pembangunan Rusunawa (Rumah Susun Sederhana Sewa) untuk memudahkan mobilitas dan meringankan beban para pekerja.

JUMLAH PEKERJA YANG MENGHUNI



JUMLAH UNIT RUMAH



Sumber: Kementerian Tenaga Kerja

PERUMAHAN UNTUK MASYARAKAT BERPENDAHASILAN RENDAH

Pemerintah berkomitmen untuk menyediakan rumah bagi masyarakat berpendhasilan rendah (MBR) dengan harga yang terjangkau dan cicilan yang rendah.



- Pemerintah membangun 9.000 unit rumah susun sederhana milik (Rusunami) di Serpong, yang dijual dengan harga kurang lebih Rp 293 juta.

- Rumah tersebut dijual dengan uang muka atau *Down Payment* (DP) yang sangat rendah, hanya 1%, cicilan Rp 1,2 juta/bulan.

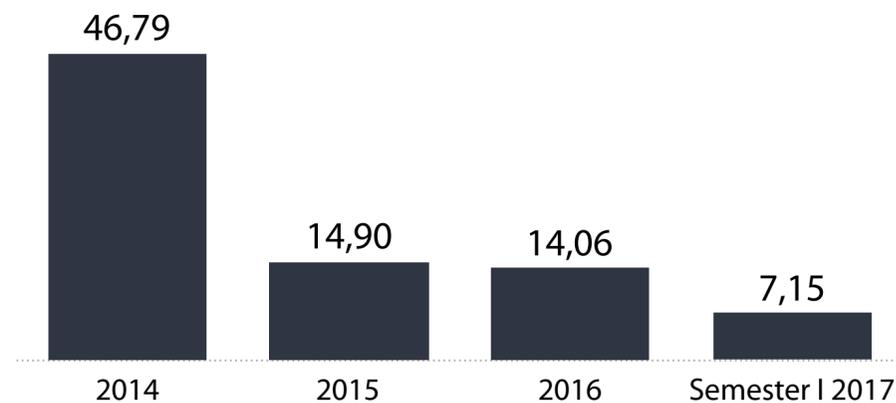
- Pemerintah juga membangun di Depok yang dijual dengan harga Rp112 juta.

Sumber: Sekretariat Kabinet

SUBSIDI ENERGI UNTUK YANG BENAR-BENAR MEMBUTUHKAN

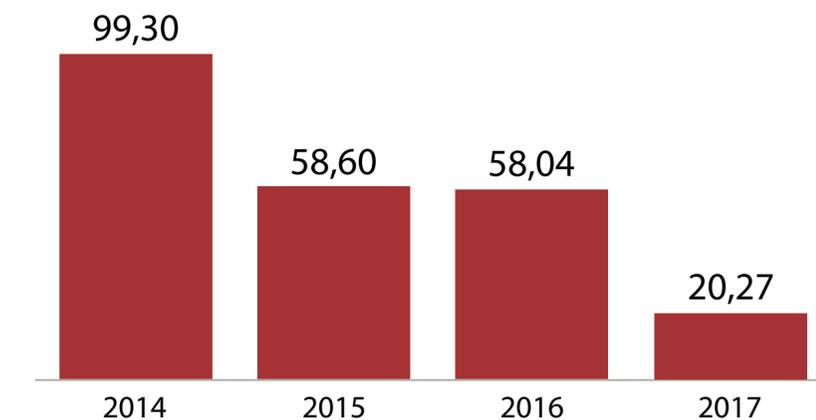
Pemerintah melanjutkan komitmennya untuk merealokasi subsidi energi untuk program-program strategis yang menyejahterakan rakyat.

Kebijakan Subsidi BBM (juta kilo liter)



Subsidi BBM sudah mendekati kondisi ideal, hanya pada minyak tanah untuk daerah yang belum terkonversi ke LPG dan minyak solar untuk non industri

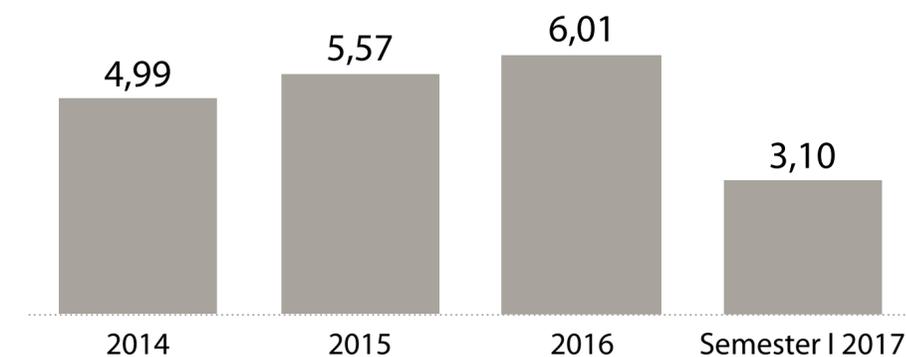
Subsidi Listrik Diarahkan Bagi yang Benar-benar Membutuhkan (triliun rupiah)



Seluruh pelanggan rumah tangga 450 VA (23,17 juta pelanggan) tetap disubsidi

6,54 juta dari 23,13 juta pelanggan rumah tangga 900 VA miskin dan tidak mampu tetap disubsidi

Kebijakan Subsidi LPG (metrik ton)



Subsidi LPG dalam proses pengalihan ke subsidi langsung sebagai bagian dari program keluarga sejahtera

Sumber: Kementerian ESDM

PENANGANAN KEBENCANAAN

Bencana dapat membawa akibat masyarakat terdampak menjadi miskin. Oleh karena itu, Pemerintah memastikan penanganan secara menyeluruh di semua wilayah bencana.

Capaian IRBI :



Terbentuknya BPBD di 34 provinsi dan 479 kabupaten/kota.



111 kabupaten/kota telah difasilitasi **penyusunan kajian dan peta resiko,**



Tersusunnya **rencana kontigensi** pada 11 lokasi dan uji lapangan



Fasilitasi pembentukan desa tangguh bencana pada 208 desa



Penguatan sumber daya penanggulangan bencana di daerah melalui bantuan logistik dan peralatan kebencanaan 34 provinsi



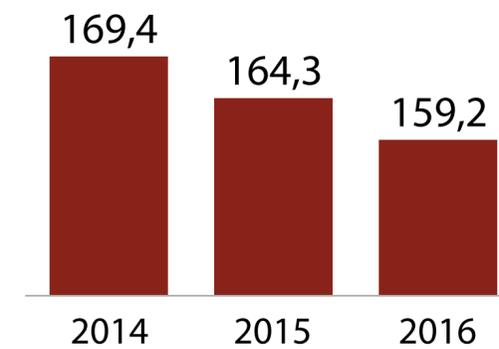
Pembentukan dan bantuan peralatan pusat pengendalian dan operasi di 104 terdiri dari 22 BPBD provinsi dan 82 kabupaten/kota



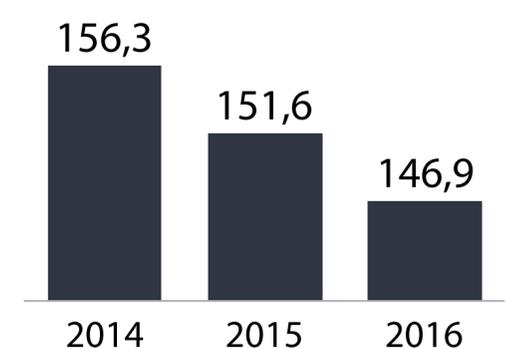
Instalasi sistem peringatan dini multi ancaman bencana (banjir dan longsor) di 30 kabupaten/kota

*IRBI : Indeks Risiko Bencana Indonesia

MENGURANGI INDEKS RISIKO BENCANA DI 136 KABUPATEN/KOTA



MENGURANGI INDEKS RISIKO BENCANA INDONESIA (IRBI)



Alokasi Hibah 2017

Kab. Pidie Jaya sebesar Rp. 343,5 Miliar
 Kab. Pidie sebesar Rp. 66,7 Miliar
 Kab. Bireuen sebesar Rp. 30,8 Miliar
 Kab. Garut sebesar Rp. 141.017.000.000

Alokasi Hibah 2015

Kota Manado sebesar Rp. 213.304.000.000

Sumber: BNPB dan BAPPENAS



MEMBANGUN DARI DESA

Membangun dari desa adalah salah satu komitmen Pemerintah untuk menghadirkan pemerataan ekonomi yang berkeadilan. Sebab itu jumlah Dana Desa terus ditingkatkan setiap tahunnya. Masyarakat adat juga terus diperkuat dan diberikan akses terhadap kesejahteraan. Kemudian perekonomian di tingkat bawah digerakkan melalui penyediaan kredit dengan bunga rendah.

Distribusi Dana Desa dan penguatan kelembagaan desa, serta keterbukaan pengelolaan anggarannya terus disempurnakan. Pemerintah terus memastikan bahwa desa sebagai entitas terkecil mampu menjadi penopang utama pelayanan warga dan sekaligus penggerak perekonomian bangsa.

Pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat adalah pendekatan baru dalam rangka memperkuat sistem sosial dalam masyarakat lokal.

Sementara, untuk menggerakkan perekonomian di tingkat mikro dan sekaligus membebaskan warga dari jeratan utang yang mencekik, program kredit untuk rakyat terus didorong dan diperluas cakupannya. Nilai pinjamannya diperbesar supaya dapat melajukan kegiatan ekonomi di tingkat bawah. ■

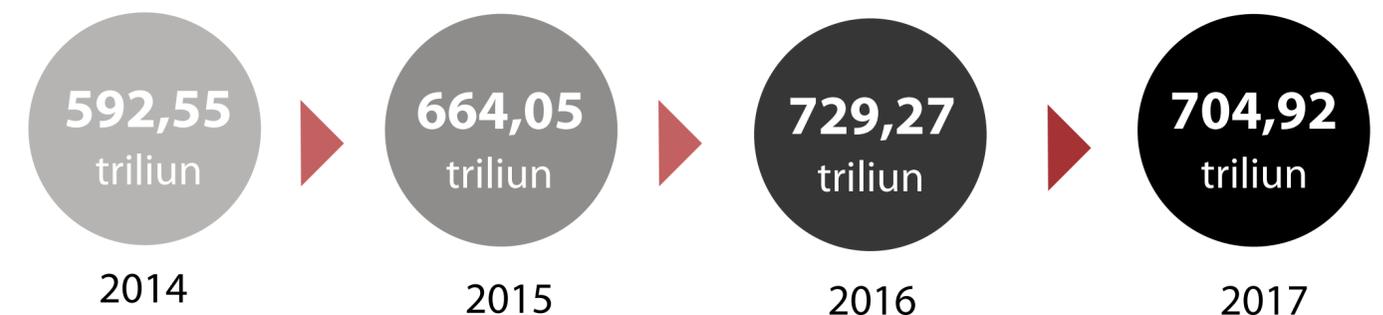
JUMLAH DANA DESA MENINGKAT

Keberpihakan pada kelompok masyarakat yang lemah, dapat dilihat dari bagaimana perencanaan anggaran dilakukan dan terutama seberapa besar porsi yang dianggarkan.

ROADMAP DANA DESA



TRANSFER DAERAH

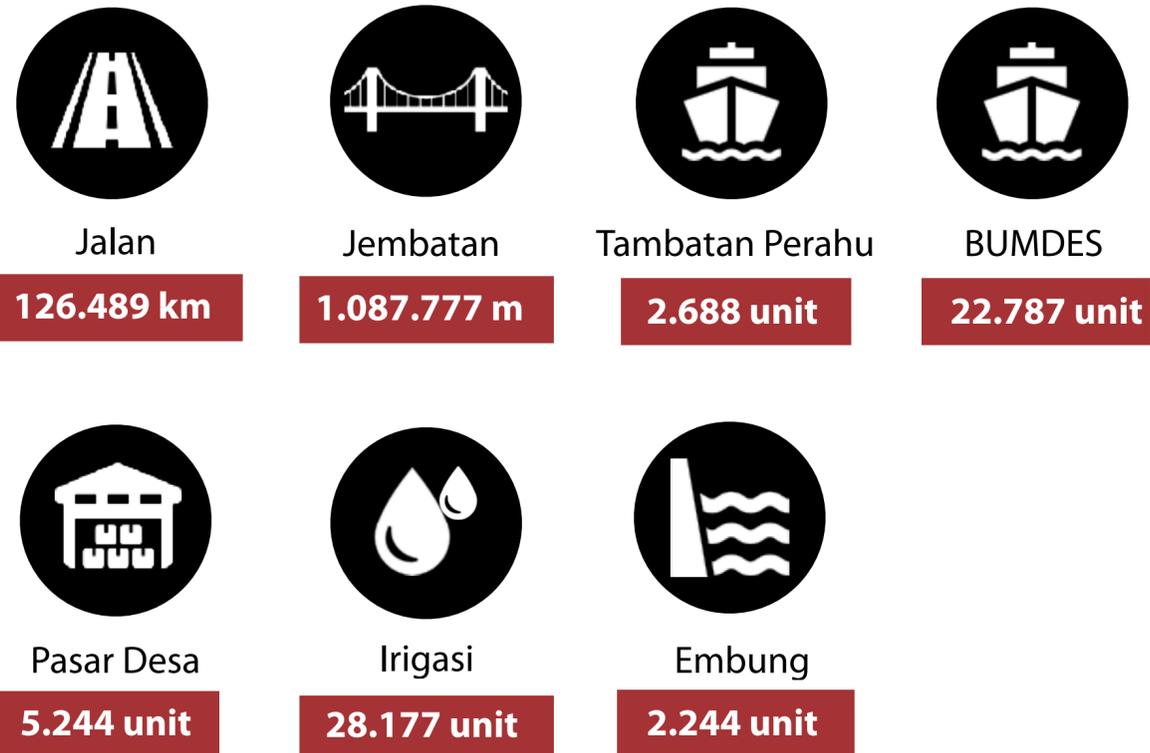


Sumber: Kementerian Desa PDTT

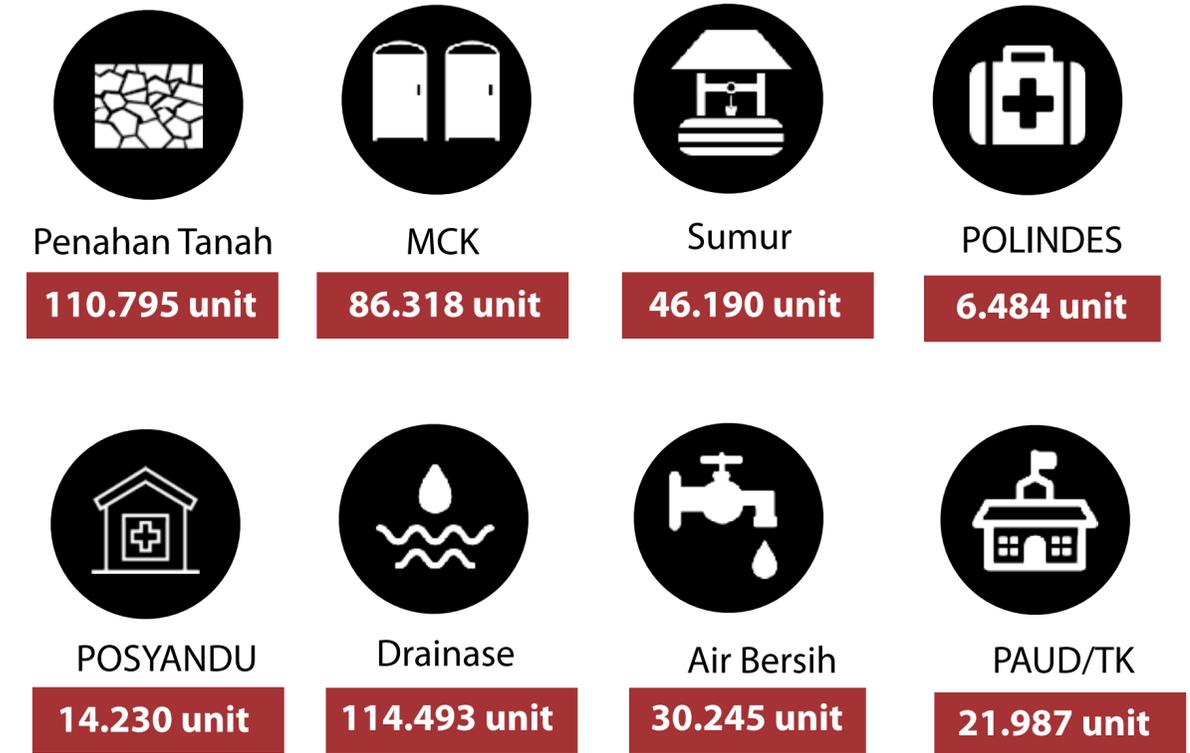
DAMPAK SOSIAL DAN EKONOMI DANA DESA

Dana Desa terus dioptimalkan untuk membangun infrastruktur dasar, guna meningkatkan kualitas hidup dan perekonomian masyarakat desa.

Dana Desa yang berdampak terhadap Perekonomian Masyarakat Desa.



Dana Desa yang berdampak terhadap Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat Desa.



Sumber: Kementerian Desa PDTT

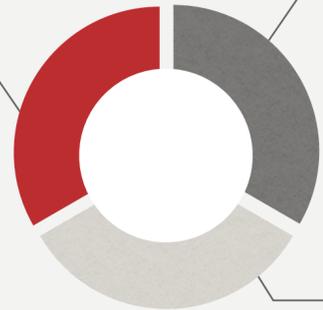
STRATEGI MENGATASI KETIMPANGAN KOTA DAN DESA

Berbagai pendekatan digunakan untuk mengatasi ketimpangan antar wilayah, mulai dari pembangunan sentra ekonomi di luar Jawa hingga percepatan pembangunan desa sesuai potensinya.

PERKOTAAN

INKUBASI 5 KOTA BARU PUBLIK

Pontianak, Tanjung Selor, Palembang, Manado dan Makassar



OPTIMALISASI 13 KOTA OTONOM SEDANG SEBAGAI PENYANGGA URBANISASI

PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN 5 KSN METROPOLITAN DI LUAR JAWA

Mebidargo, Mamminasata, Sarbagita, Patungrayaagung dan Bimindo

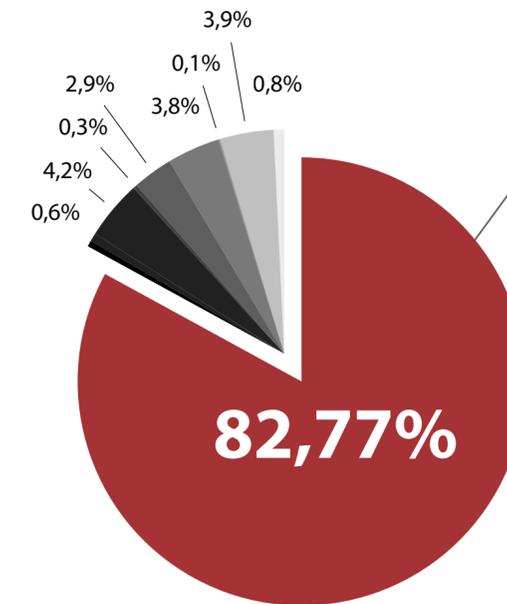
PEDESAAN

PENDAMPINGAN DESA 40.142 orang



TERBENTUKNYA 18.446 BUMDES

PENYALURAN DANA DESA TAHAP I SEBESAR: Rp 35,22 Triliun



82,77% penduduk desa menggantungkan hidup dari sektor pertanian atau sebagai **PETANI**

* capaian 2015-2017



20.034
Desa memiliki potensi perkebunan



12.827
Desa memiliki potensi perikanan



64.587
Desa memiliki potensi energi baru terbarukan



1,8 Juta
Komoditas UMKM berada di Desa



61.821
Desa memiliki potensi pertanian



1.902
Desa potensi Desa wisata

Sumber: Kementerian PPN/ BAPPENAS

MENGHADIRKAN LISTRIK DI DESA

Pemerintah menggunakan berbagai inovasi untuk mengakselerasi akses desa terhadap listrik. Salah satunya dengan memberikan solusi berupa pemasangan lampu bertenaga surya.

PROGRAM LAMPU TENAGA SURYA HEMAT ENERGI (LTSHE)



KONDISI SAAT INI:

Terdapat **2.519** desa yang masih gelap gulita, atau **256.114** rumah



TARGET:

menerangi desa-desa belum berlistrik, utamanya desa yang masih gelap gulita dalam jangka waktu 2 tahun (2017-2018)

PENGAKUAN TERHADAP HUTAN ADAT

Setelah sekian lama, Pemerintah pada akhir tahun 2016 mengakui hak pengelolaan hutan adat. Ini adalah langkah awal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat adat melalui skema Perhutanan Sosial.



Pengukuhan Atas Hutan Adat

2016



Keterangan:
Pada 25 Oktober 2017
mendatang akan dibagikan
sebanyak 1.762,35 ha

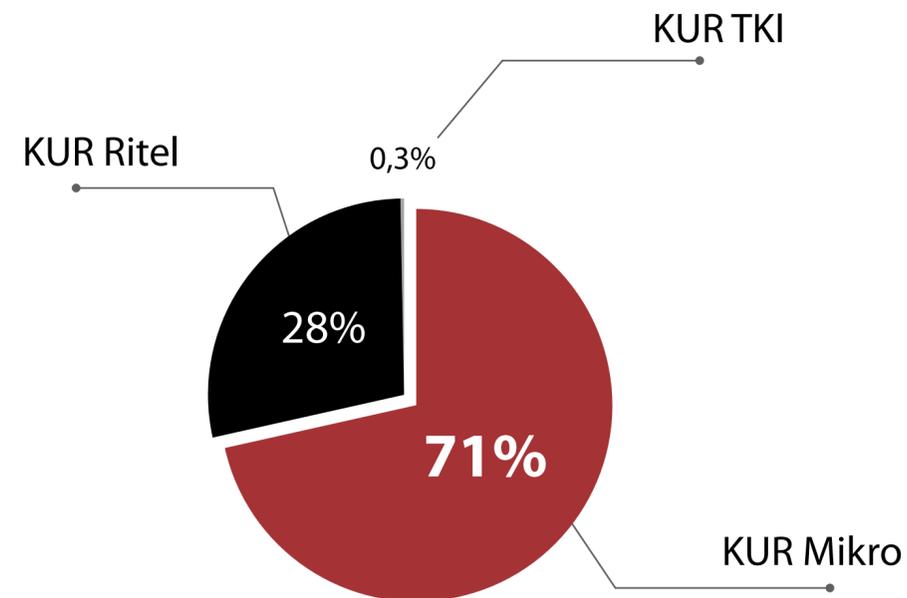
Sumber: BPN

KREDIT MURAH UNTUK RAKYAT

Salah satu program penting untuk menciptakan pemerataan adalah dengan memberikan akses kredit murah bagi rakyat yang ingin mengembangkan usaha, sehingga dapat menjadi mandiri.



Realisasi Penyaluran KUR (s.d. 31 Juli 2017)



Penyaluran KUR terbagi menjadi KUR Mikro (71%), KUR Ritel (28%), KUR TKI (0,3%).

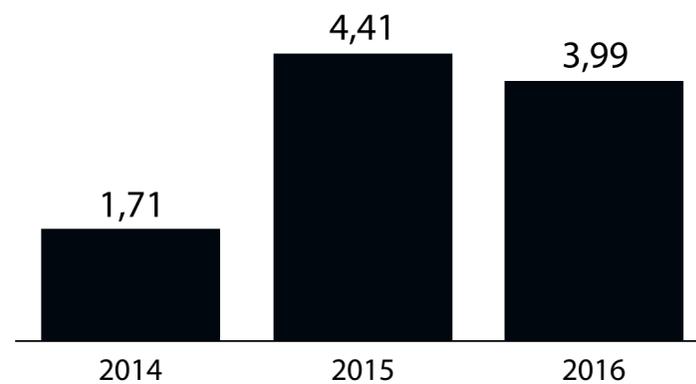
Capaian ini menunjukkan **keberpihakan pemerintah** terhadap pemerataan akses pembiayaan untuk usaha mikro.

Sumber: Kementerian Perekonomian dan Kementerian Koperasi dan UKM

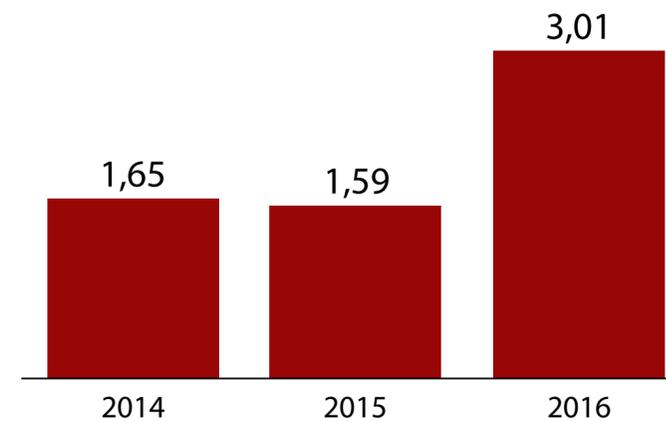
MENDORONG KEBANGKITAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM)

Menyadari peran penting UMKM, Pemerintah membantu memberikan akses pembiayaan agar dapat naik kelas dan memberikan kontribusi lebih besar bagi perekonomian nasional.

KONTRIBUSI KOPERASI TERHADAP PDB NASIONAL (%)



RASIO KEWIRAUSAHAAN INDONESIA (%)



Reformasi Total Koperasi

1. Reorientasi Koperasi
2. Rehabilitasi Koperasi
3. Pengembangan Koperasi

Sumber: Kementerian Koperasi dan UKM

PEMBENTUKAN BANK WAKAF

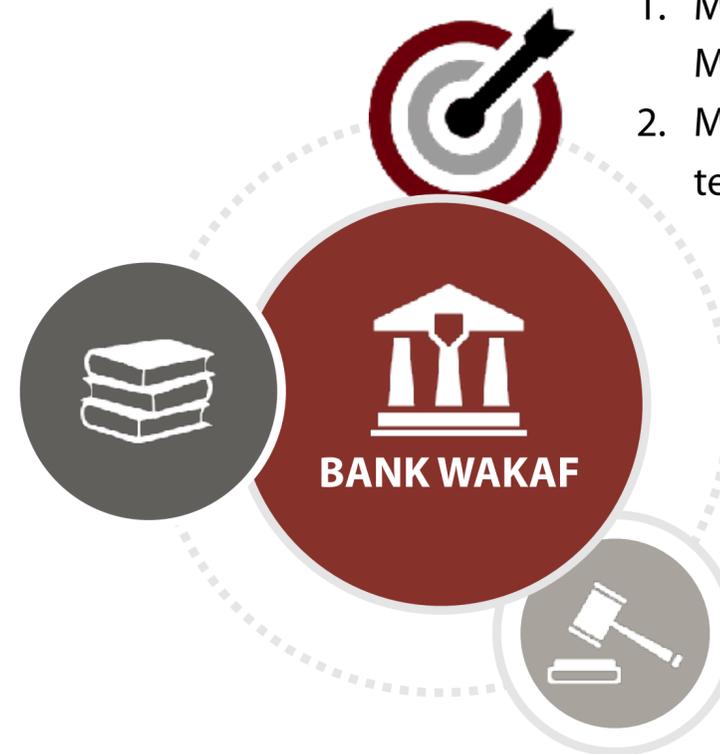
Melalui pembentukan Bank Wakaf, Pemerintah mengakui dana wakaf umat sekaligus mengatur tata kelolanya khususnya dalam hal transparansi dan akuntabilitas.

Pemerintah mendukung keberadaan Bank Wakaf , yang akan:

1. Memberikan kemudahan bagi para Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang ingin melakukan pengajuan pembiayaan.
2. Mendorong perekonomian Indonesia melalui pendampingan terhadap para pelaku UMKM.

Dalam tahap pertama pembentukan, terdapat:

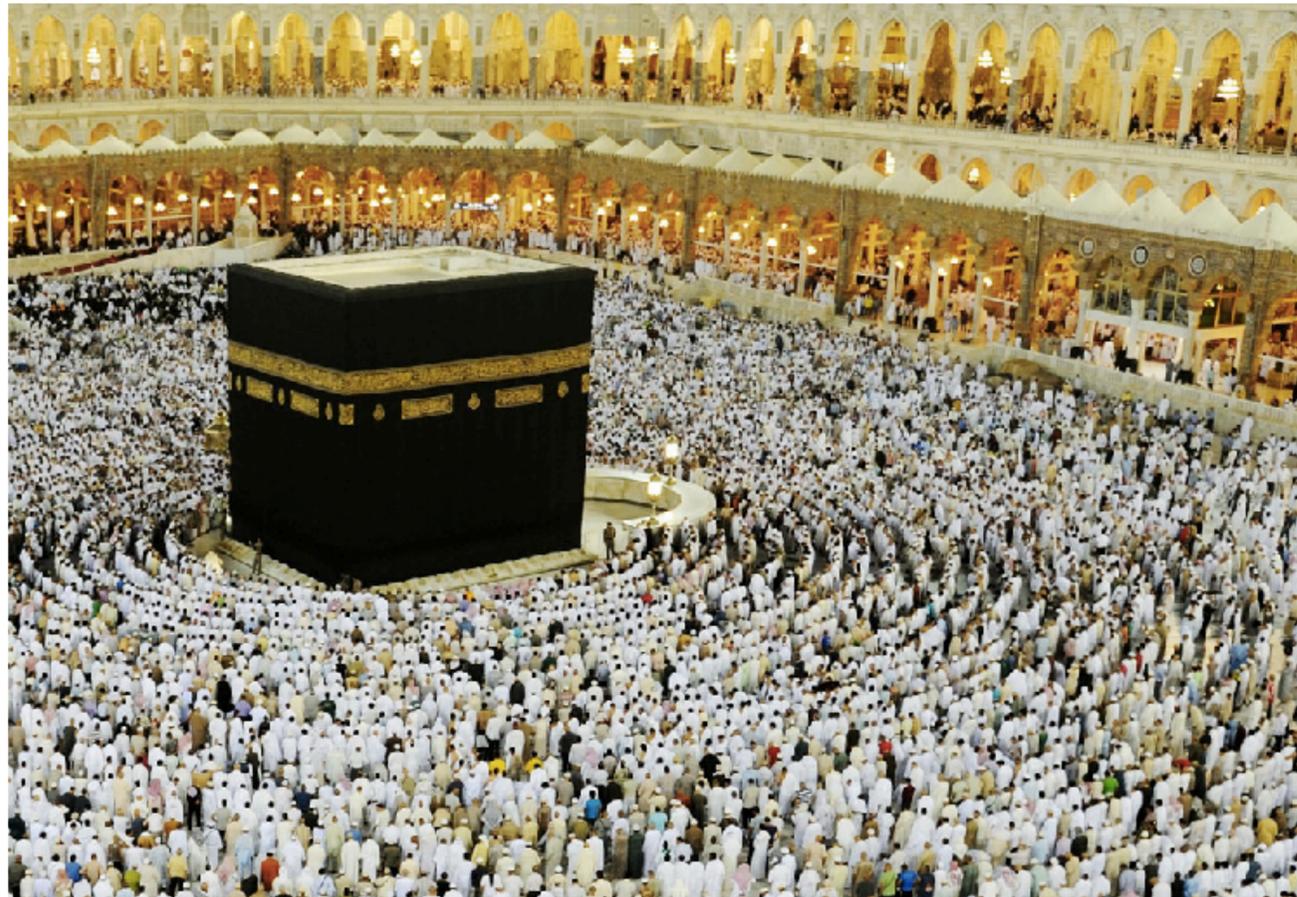
- 20 ormas Islam sebagai pemegang saham,
- 3 ormas merupakan pemegang saham pengendali:
 1. Baznas
 2. Badan Wakaf Indonesia
 3. Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).



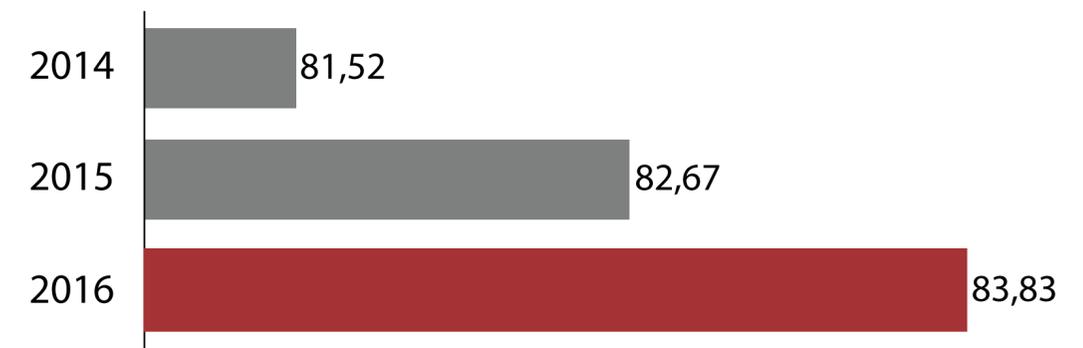
OJK membantu untuk pembentukan bank wakaf ventura dari sisi **legalitas**.

KOMITMEN MENINGKATKAN PELAYANAN JAMAAH HAJI

Selain meningkatkan pelayanan terhadap jamaah haji, Pemerintah berupaya meningkatkan kuota haji secara signifikan.



Indeks Kepuasan Jamaah Haji



Kuota Jamaah Haji



Sumber: Kementerian Agama



PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KELOMPOK RENTAN

Pemberdayaan berarti mengoptimalkan sesuai potensi yang dimiliki. Selain itu, ada unsur perlindungan sekaligus komitmen. Pemerintah merancang kebijakan dan program yang memastikan setiap objek atau kelompok menjadi lebih berdaya.

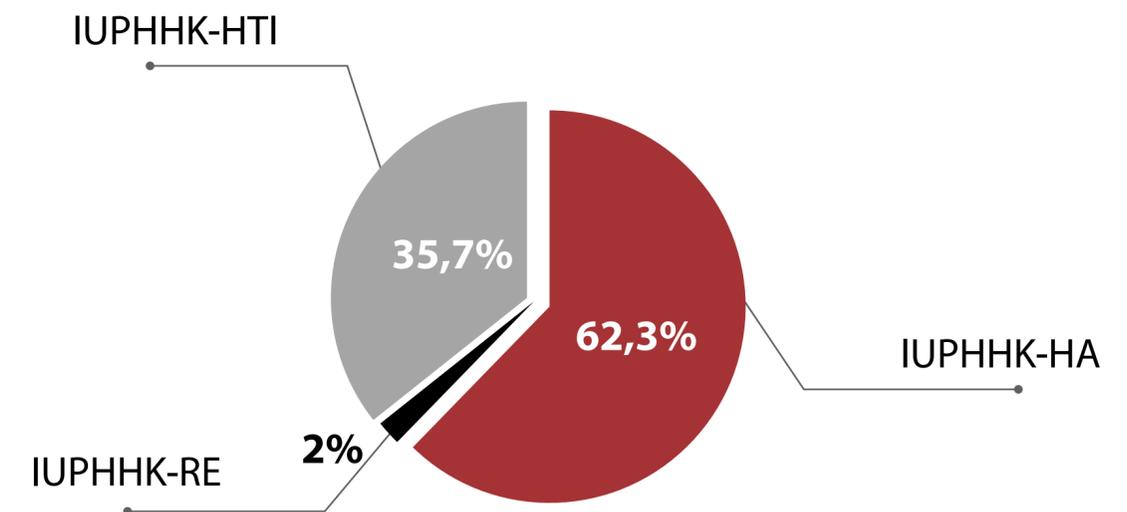
Legalisasi pertanahan, distribusi sertifikat tanah kepada masyarakat, dan optimalisasi lahan-lahan bagian dari proses penguatan dan pemberdayaan masyarakat adat.

Kaum perempuan dan anak adalah salah satu kelompok yang paling memerlukan perlindungan dan pemberdayaan dalam konteks membangun dan bergerak maju secara sosial dan ekonomi.

Selain itu, Pemerintah juga memastikan bahwa kelompok disabilitas juga mendapatkan perlindungan dan pemberdayaan. Langkah yang ditempuh adalah pembuatan payung hukum yang melindungi kelompok ini serta rencana pembentukan komite nasional yang memperjuangkan hak-hak kaum disabilitas. ■

LUAS PEMANFAATAN HUTAN PRODUKSI

Pemerintah menyadari bahwa pemanfaatan hutan oleh korporasi masih sangat besar dan sudah berlangsung cukup lama. Program perhutanan sosial diharapkan dapat menjadi model pemberdayaan rakyat yang perlu terus dikembangkan dan dievaluasi.



TOTAL LUAS PEMANFAATAN HUTAN PRODUKSI

30.595.536 Ha

Keterangan:

IUPHHK-RE : Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu - Restorasi Ekosistem

IUPHHK-HA : Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu - Hutan Alam

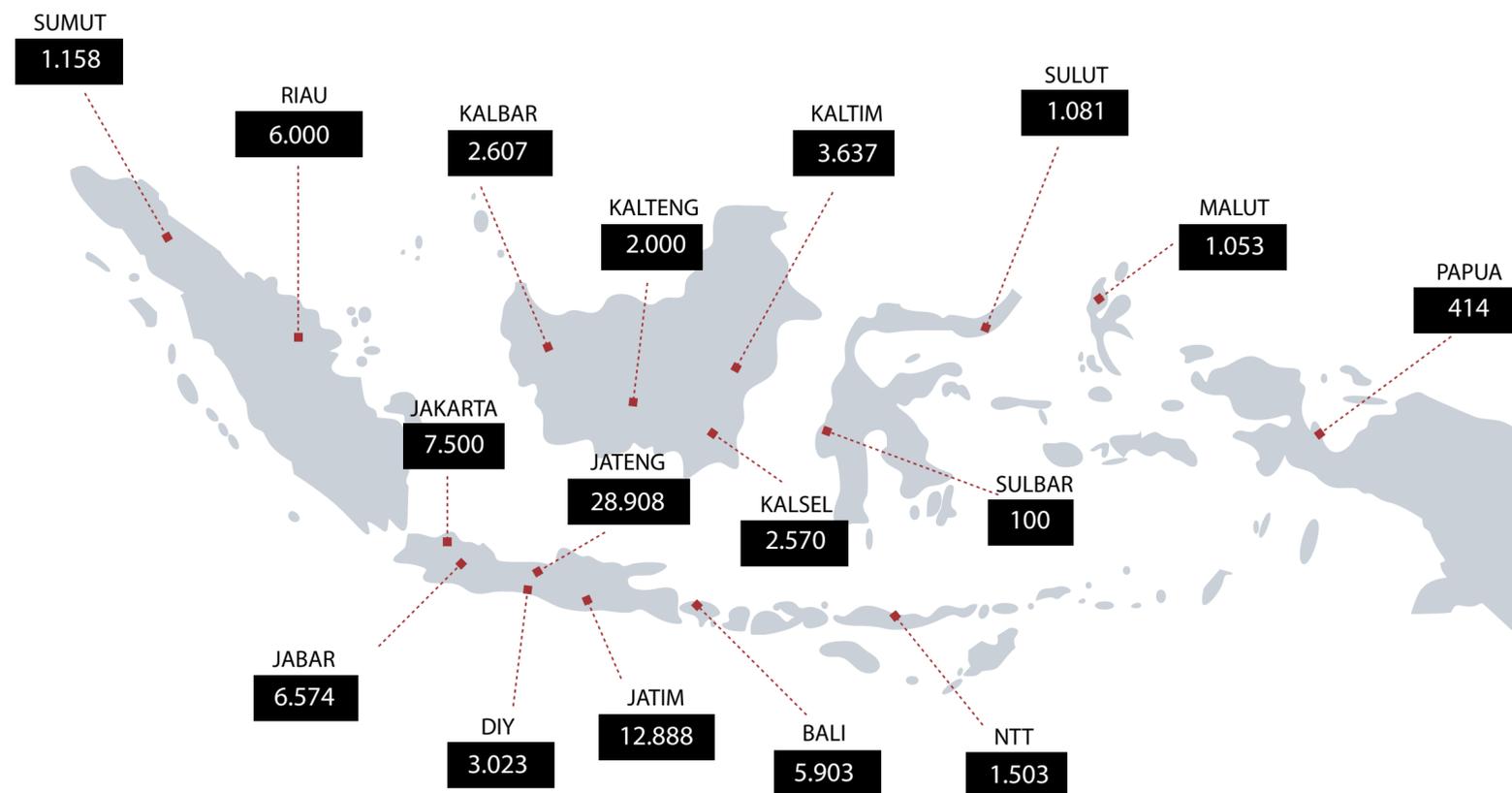
IUPHHK-HTI : Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu - Hutan Tanaman Industri

Sumber: Kementerian LHK

KEPASTIAN HAK ATAS TANAH

Legalisasi pertanahan, distribusi sertifikat tanah kepada masyarakat, dan optimalisasi lahan hutan adalah bagian dari proses penguatan dan pemberdayaan masyarakat yang rentan.

Jumlah Sertifikat Tanah Rakyat yang diserahkan Langsung oleh Presiden 2016-2017



Sumber: Kementerian ATR/ BPN

PEMBERDAYAAN MELALUI PERHUTANAN SOSIAL

Melalui program Perhutanan Sosial, Pemerintah memanfaatkan kawasan hutan untuk pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan petani miskin.



Perhutanan Sosial yang terealisasi
1.058.622,43 Ha



Hutan Tanaman Rakyat
232.050,41 Ha



Hutan Kemasyarakatan
244.434,67 Ha



Kemitraan Kehutanan
71.608,20 Ha



Hutan Desa
491.962,83 Ha



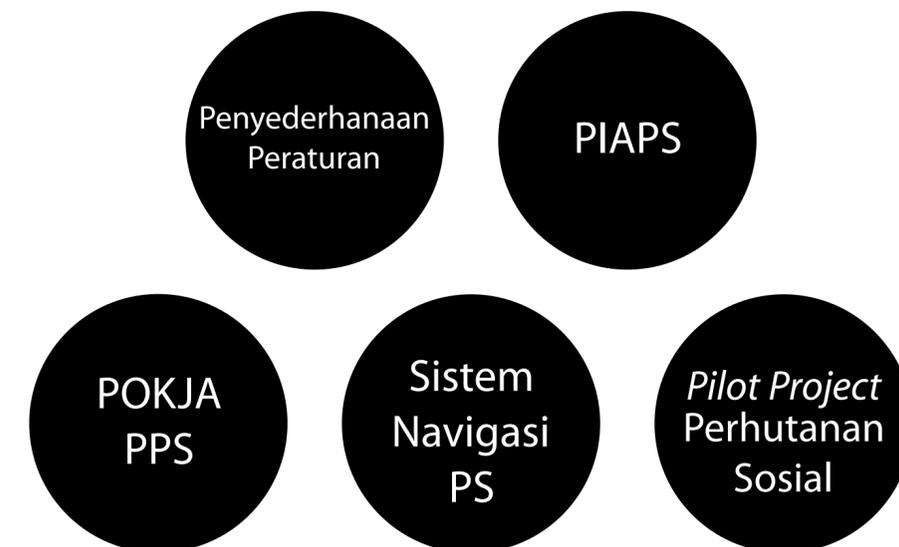
Izin Perhutanan Sosial di Areal Perhutanan
4.674,90 Ha



Hutan Adat
13.918,42 Ha

STRATEGI PERCEPATAN KELEMBAGAAN PERHUTANAN SOSIAL

Sebagai upaya untuk mengatasi berbagai tantangan peraturan maupun lapangan, Pemerintah memastikan adanya tatakelola perhutanan sosial secara baik.



Keterangan:

PIAPS: Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial

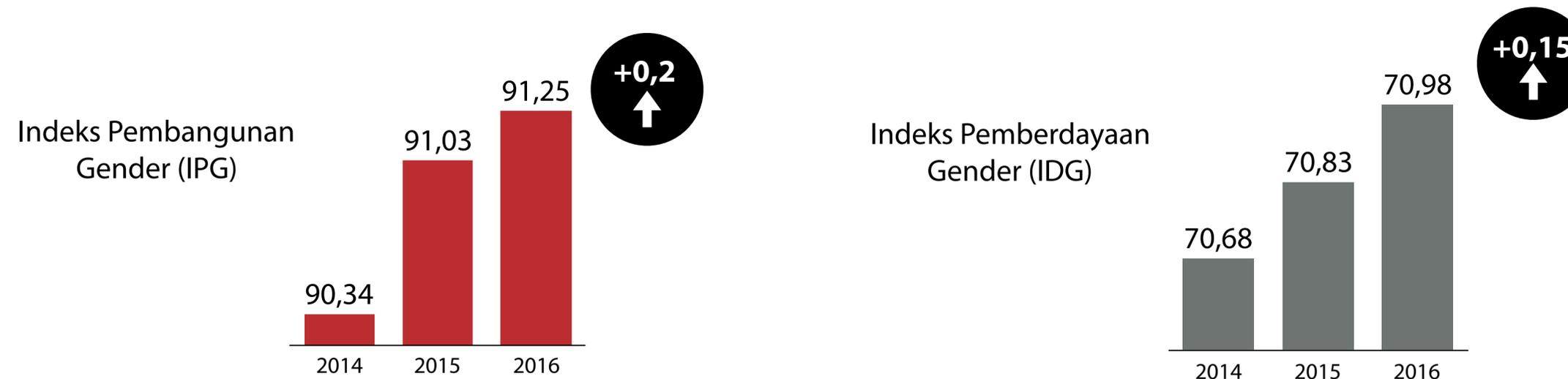
POKJA PPS : Kelompok Kerja Pecepatan Perhutanan Sosial

PS : Perhutanan Sosial

Sumber: Kementerian LHK

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Komitmen Pemerintah terhadap kesetaraan gender dapat dilihat dari komposisi Menteri yang saat ini mengisi pos-pos penting dalam Kabinet, serta dari sejumlah indikator penting yang tersedia.



9 MENTERI PEREMPUAN DI KABINET KERJA



Menteri Keuangan
Sri Mulyani



Menteri Luar Negeri
Retno LP Marsudi



Menteri LHK
Siti Nurbaya



Menteri KKP
Susi Pudjiastuti



Menteri Kesehatan
Nila F Moeloek



Menteri Sosial
Khoffah Indar Parawansa



Menteri BUMN
Rini Soemarno



Menteri PPPA
Yohana Yembise



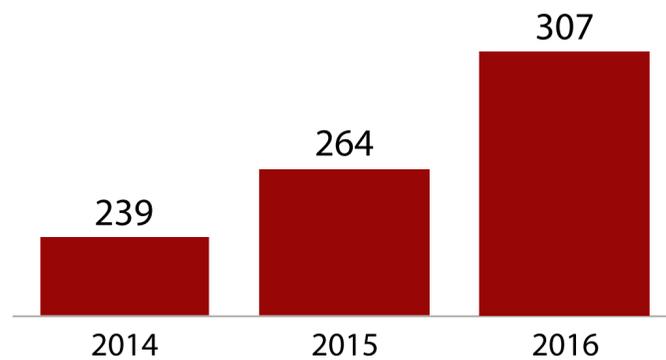
Menko PMK
Puan Maharani

Sumber: BPS dan Kementerian-PPPA

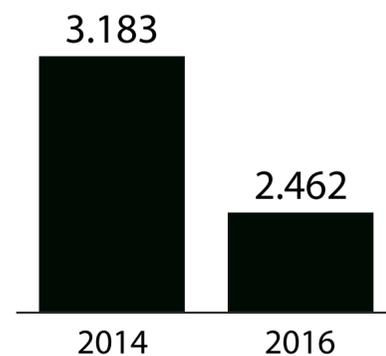
PERLINDUNGAN ANAK

Kekerasan terhadap anak menjadi penghalang bagi pertumbuhan dan masa depan anak. Maka Pemerintah berusaha membangun ekosistem yang dapat melindungi anak di seluruh propinsi.

JUMLAH KABUPATEN/KOTA YANG MENGINISIASI "KOTA LAYAK ANAK"
(KABUPATEN/KOTA)



JUMLAH ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI LEMBAGA PERMASYARAKATAN KHUSUS ANAK
(orang)



PEMBENTUKAN FORUM ANAK

Forum anak berfungsi sebagai wadah partisipasi anak untuk menampung aspirasi suara anak.

2015

33 provinsi
267 kabupaten/kota
300 kecamatan

➤

2016

34 provinsi
377 kabupaten/kota
506 kecamatan

TELEPON SAHABAT ANAK (TESA)

Pada tahun 2016 dikembangkan **Telepon Sahabat Anak (TeSA)** yaitu saluran telepon yang **beroperasi 24/7** untuk menerima pengaduan terkait kekerasan terhadap anak.

Sumber: Kementerian PPPA

KOMITMEN TERHADAP KAUM DISABILITAS

Para penyandang disabilitas memiliki sejumlah potensi yang harus digali. Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Disabilitas, pemenuhan potensi kaum disabilitas dapat mulai berjalan secara lebih optimal.

Adanya UU No. 8 Tahun 2016

tentang penyandang disabilitas mewujudkan dan menerapkan **3 prinsip pembangunan inklusif**:



partisipasi

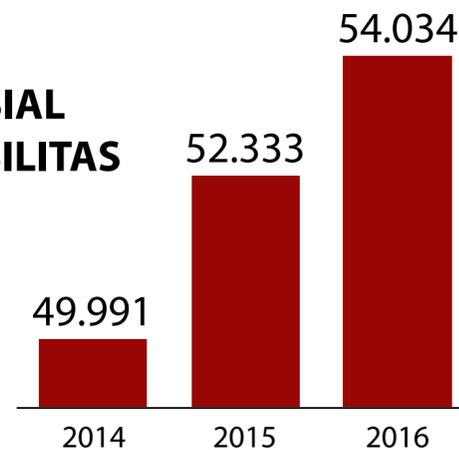


nondiskriminasi



aksesibilitas

REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS (jiwa)



INDONESIA SEBAGAI JUARA UMUM ASEAN PARA GAMES 2017



117 MEDALI EMAS
69 MEDALI PERAK
46 MEDALI PERUNGGU



Sumber: Kementerian PPN/ BAPPENAS, Kementerian Pemuda dan Olahraga



MEMBERDAYAKAN DAN MENYETARAKAN PEMBANGUNAN DI PAPUA DAN PAPUA BARAT

Pemerintah menjadikan pembangunan Papua dan Papua Barat menjadi prioritas nasional karena masih ada ketertinggalan di kedua wilayah.

Visi Indonesia Sentris yang dicanangkan Pemerintah dilaksanakan di Papua dan Papua Barat dengan mempercepat pemerataan pembangunan beberapa bidang prioritas.

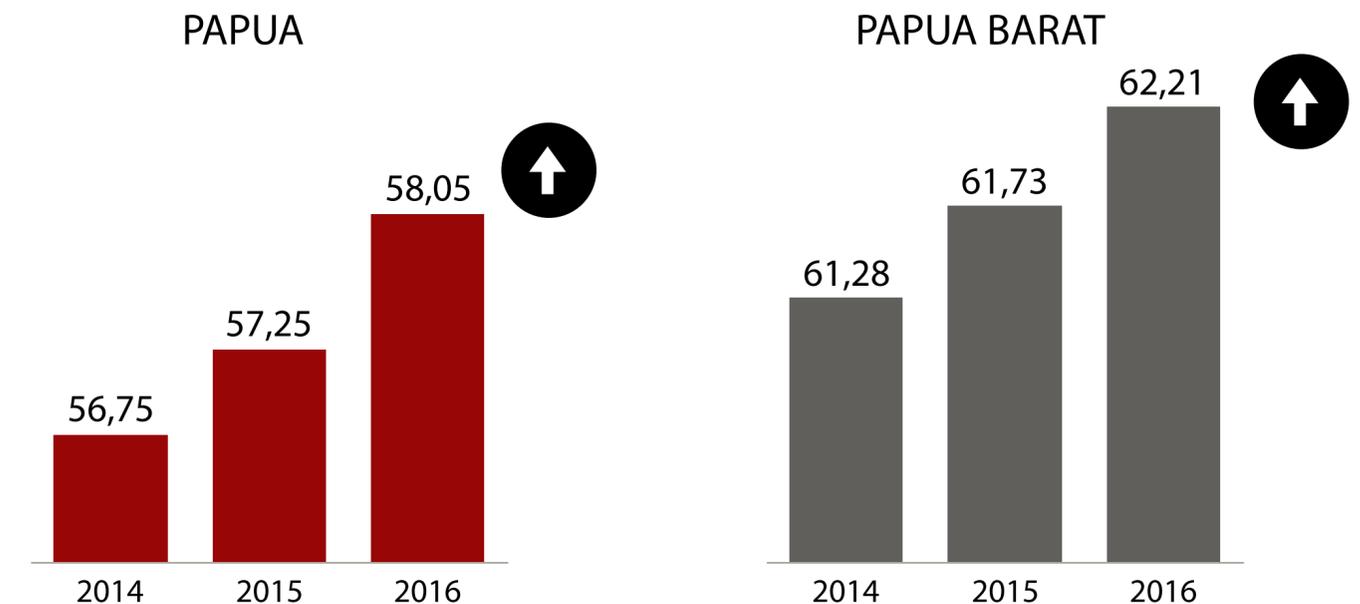
Ini dilakukan untuk mengurangi kesenjangan pembangunan antara Papua-Papua Barat dengan wilayah lainnya di Indonesia. Bidang prioritas itu meliputi: Kesehatan (fokus pada kesehatan Ibu dan Anak), Pendidikan (dasar hingga tinggi), dan Ekonomi.

Kebijakan BBM satu harga adalah salah satu kebijakan utama untuk mengurangi ketimpangan harga-harga. Pembangunan infrastruktur jalan, bandara, dan pelabuhan dipercepat untuk membuka isolasi serta memperlancar konektivitas. ■

MEMBANGUN PAPUA

Peningkatan kualitas masyarakat Papua merupakan prioritas utama Pemerintah.

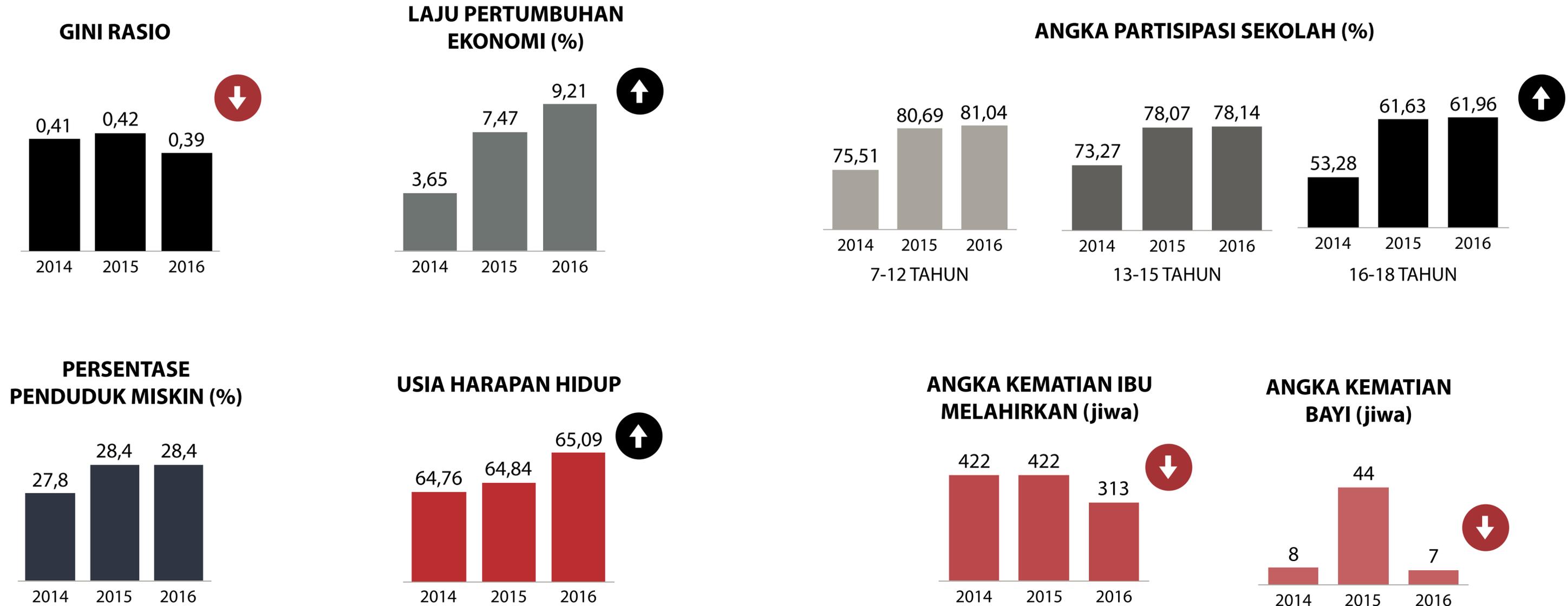
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)



Sumber: BPS

INDIKATOR MAKROEKONOMI PAPUA

Banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan di Papua. Pemerintah berkomitmen untuk terus bekerja bersama masyarakat mewujudkan Papua yang lebih baik.



Sumber: BPS

PELAYANAN KESEHATAN DI PAPUA

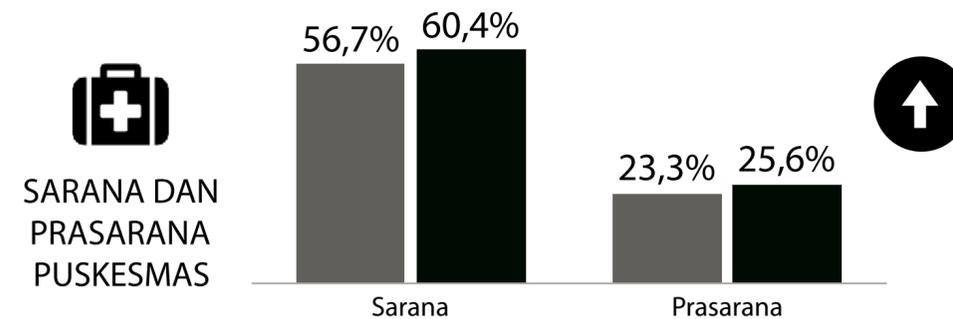
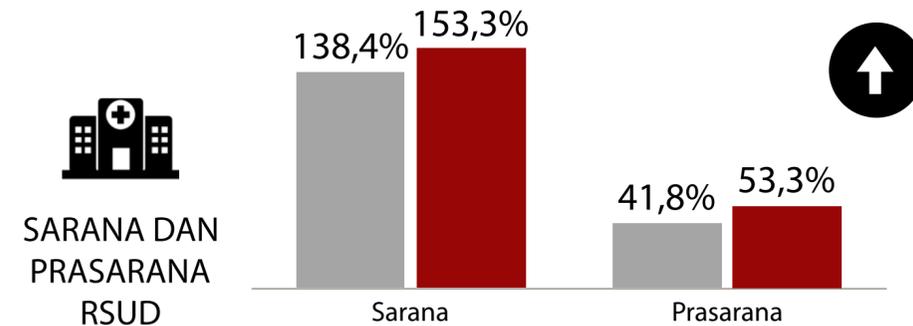
Melalui berbagai program Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, pelayanan kesehatan di Papua dan Papua Barat terus ditingkatkan secara bertahap.



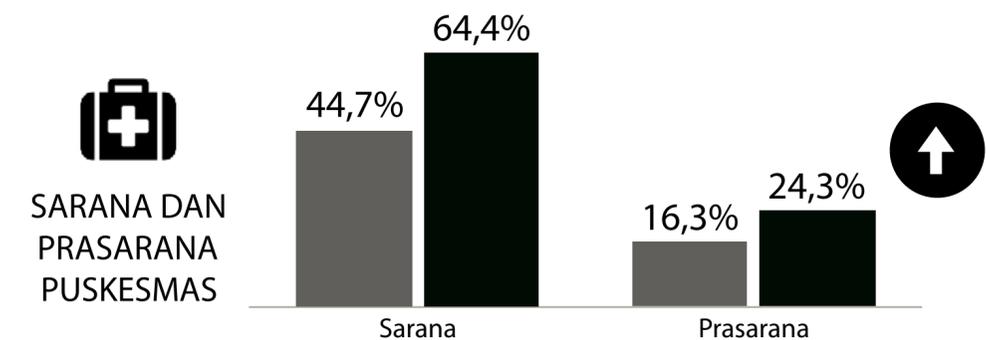
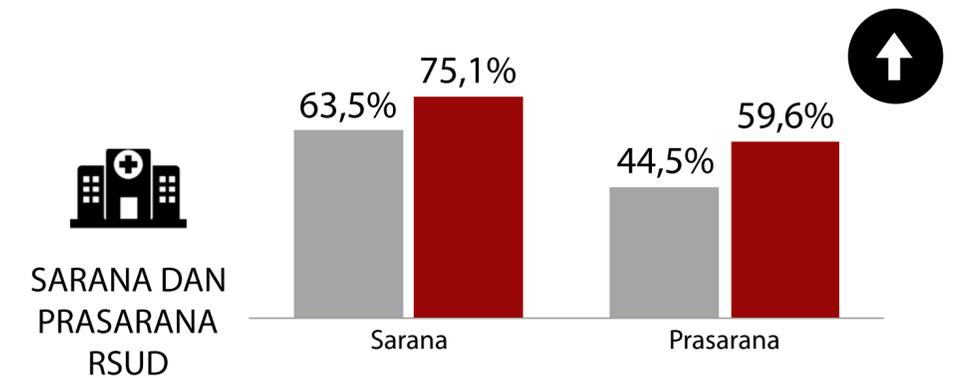
3.337.269

Penerima Kartu Indonesia Sehat
di Papua & Papua Barat
(s.d. Juli 2017)

PAPUA BARAT



PAPUA



Sumber: BPJS Kesehatan dan Kementerian Kesehatan

UNTUK KESEJAHTERAAN PAPUA

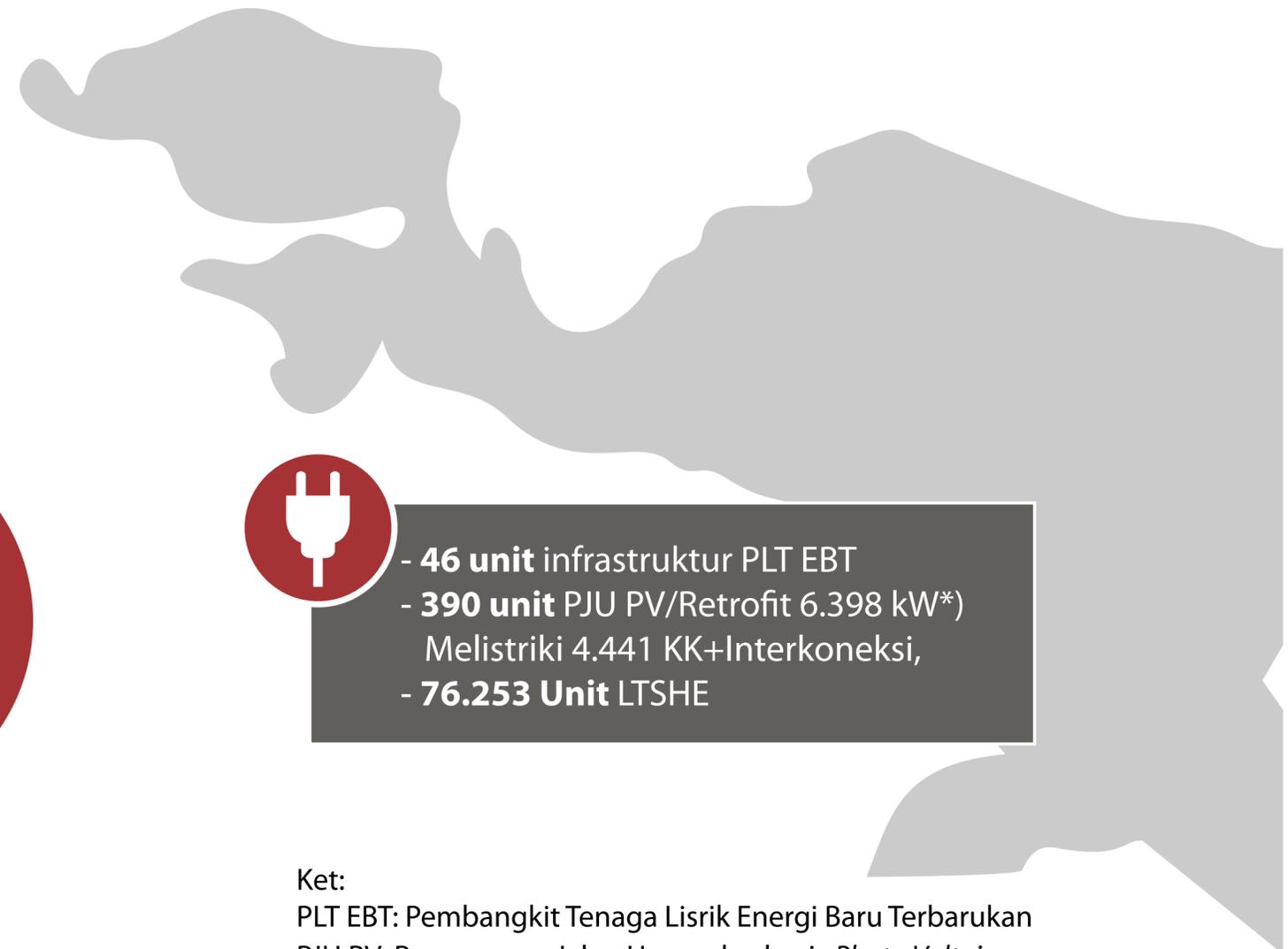
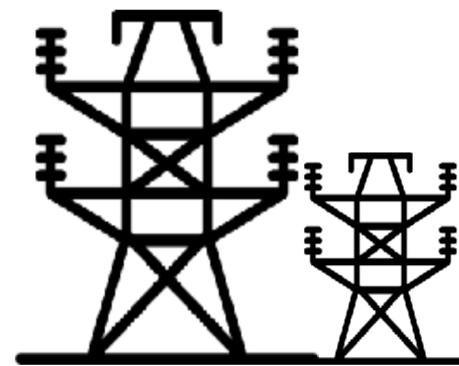
Pemerintah memastikan bahwa kesejahteraan bagi masyarakat Papua dapat meningkat dengan program pelayanan dasar yang komprehensif, melalui Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Pemberian Makanan Tambahan (PMT).



Sumber: Kementerian Kesehatan

PEMBANGUNAN LISTRIK PEDESAAN DI PAPUA DAN PAPUA BARAT

Penyediaan listrik merupakan aspek penting dalam memberdayakan dan memajukan masyarakat Papua dan Papua Barat.



- 46 unit infrastruktur PLT EBT
- 390 unit PJU PV/Retrofit 6.398 kW*)
- Melistriki 4.441 KK+Interkoneksi,
- 76.253 Unit LTSHE

Ket:
 PLT EBT: Pembangkit Tenaga Listrik Energi Baru Terbarukan
 PJU PV: Penerangan Jalan Umum berbasis *Photo Voltaic*
 LTHSE : Lampu Tenaga Surya Hemat Energi



* capaian hingga 2017

PERCEPATAN BBM SATU HARGA DI PAPUA

Melalui kebijakan BBM satu harga, maka kesejahteraan masyarakat Papua dan Papua Barat dapat lebih cepat ditingkatkan. Uang yang tadinya digunakan untuk membeli BBM dengan harga mahal, kini dapat digunakan untuk keperluan lainnya.

HARGA SEKARANG:



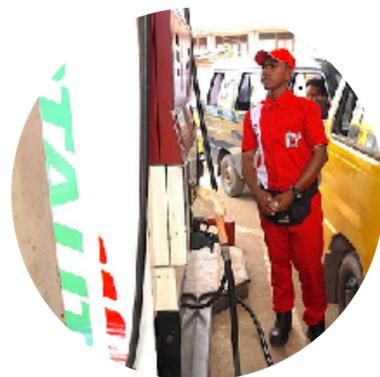
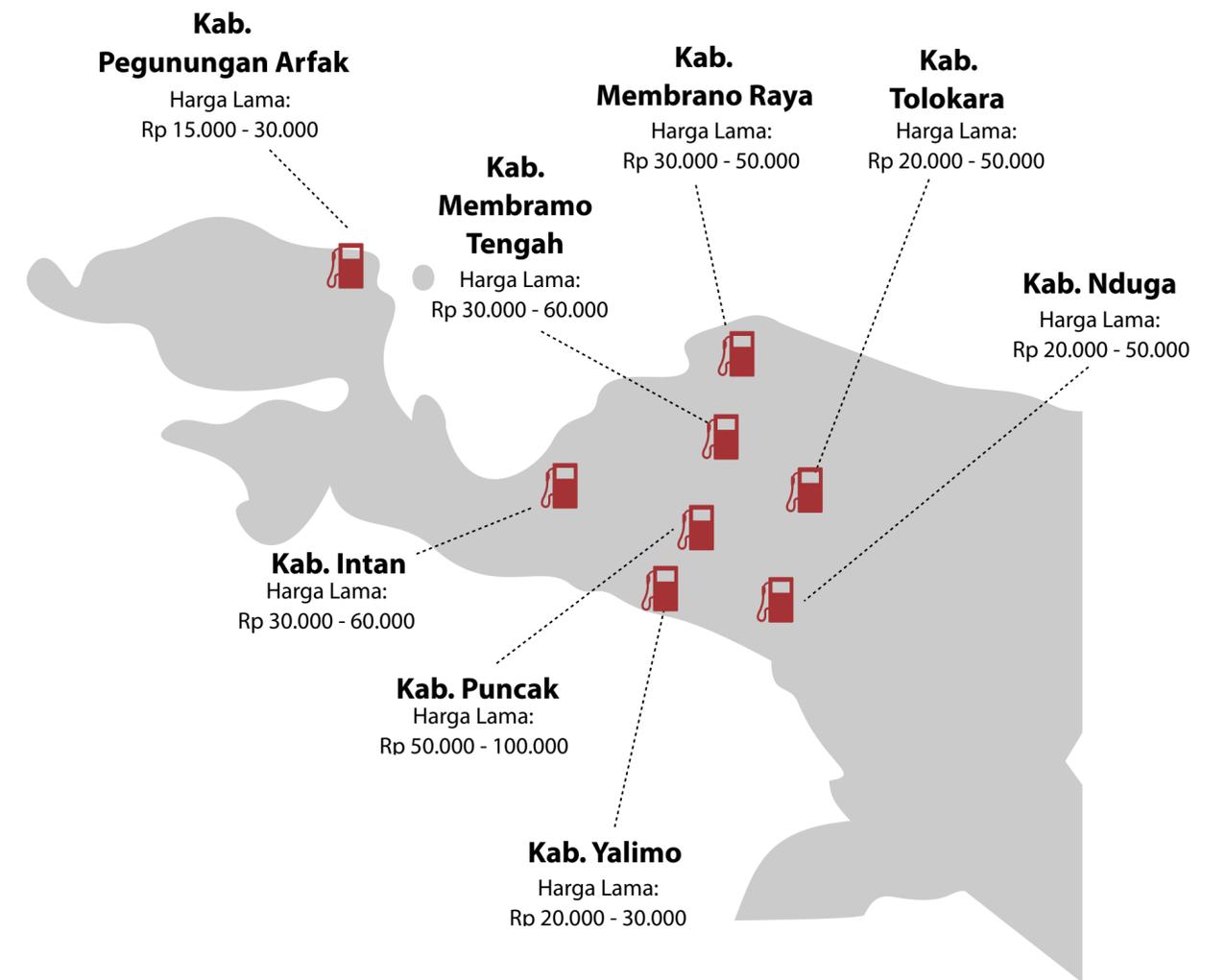
Bensin (Gasoline)
Min RON 88
Rp 6.450
/ liter

Jenis BBM Khusus Penugasan (JBT)

Minyak Solar 48
(Gas Oil)
Rp 5.150
/ liter

Jenis BBM Tertentu (JBT)

HARGA LAMA:



Sumber: Kementerian ESDM

DAMPAK PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN BBM 1 HARGA

Hanya dengan perpaduan kebijakan yang komprehensif dan berani, percepatan pembangunan dan kesejahteraan di Papua dapat terwujud lebih cepat.



Inflasi lebih terkendali, bahkan di Papua pada Oktober 2016 mengalami **deflasi sebesar 0,09 persen**.



Mendorong industri manufaktur, peningkatan jumlah usaha terutama untuk Usaha Kecil Menengah (UKM).



Harga kebutuhan pokok menjadi lebih stabil (biasanya meningkat terutama akibat cuaca ekstrem).



Penurunan harga bahan pokok, karena biaya angkutan untuk pendistribusiannya menurun.

Sumber: Kementerian ESDM

PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN TRANS PAPUA

Konektivitas di Papua dan Papua Barat akan membawa dampak positif tidak saja bagi perekonomian, tapi juga bagi masyarakat secara umum. Sebab itu dapat berarti, pelayanan kesehatan, pendidikan dan pembangunan sektor lainnya pun menjadi lebih cepat.

**Total Panjang:
3.259,45 km**



Segmen 1:
Kwatisore - Nabire



Segmen 2:
Nabire - Wagete - Enarotali



Segmen 3:
Enarotali - Ilaga-
Mulia - Wamena



Segmen 4:
Wamena - Elelim -
Jayapura



Segmen 5:
Wamena - Habema -
Kenyam - Mumugu



Segmen 6:
Kenyam - Dekai



Segmen 7:
Dekai - Oksibil



Segmen 8:
Oksibil - Waropko

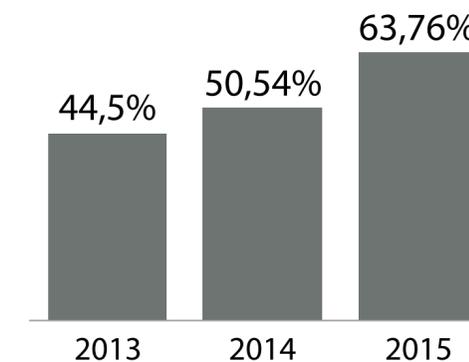


Segmen 9:
Waropko - Tanah Merah -
Merauke



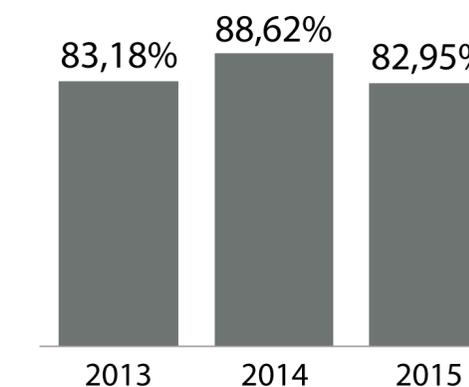
Segmen 10:
Wagete - Timika

PERSENTASE PANJANG JALAN PROVINSI
DALAM KONDISI MANTAP (BAIK DAN SEDANG)



**TARGET
Jalan Provinsi
60%
Mantap**

PERSENTASE PANJANG JALAN NASIONAL
DALAM KONDISI MANTAP (BAIK DAN SEDANG)



**TARGET
Jalan Nasional
68%
Mantap**

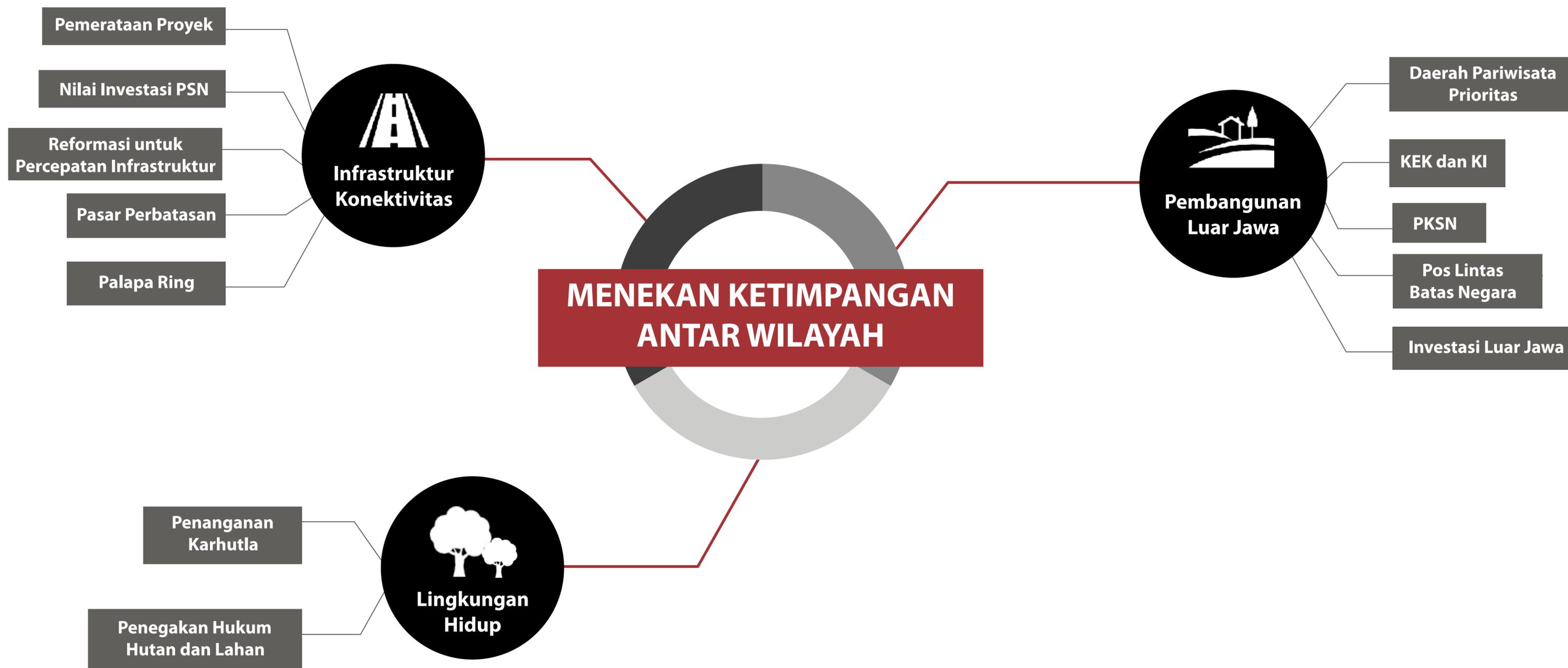
Sumber: KPPIP

Sumber: Kementerian PUPR

BAGIAN III

MENEKAN KETIMPANGAN ANTAR WILAYAH

IKHTISAR



ACEH HINGGA PAPUA YANG KAYA, TERHUBUNG SECARA NYATA



Sabang hingga Merauke, Miangas hingga Rote, memiliki kekayaan alam dan sumber daya manusia yang berbeda-beda. Pembangunan yang berfokus pada pemerataan diarahkan untuk mewujudkan keseimbangan antara wilayah barat dan timur, Jawa dan luar Jawa, kawasan perkotaan dan pedesaan, daerah maju dan daerah tertinggal.

Perbedaan dan karakter kewilayahan tersebut diarahkan dalam kerangka pembangunan Indonesia-sentris.

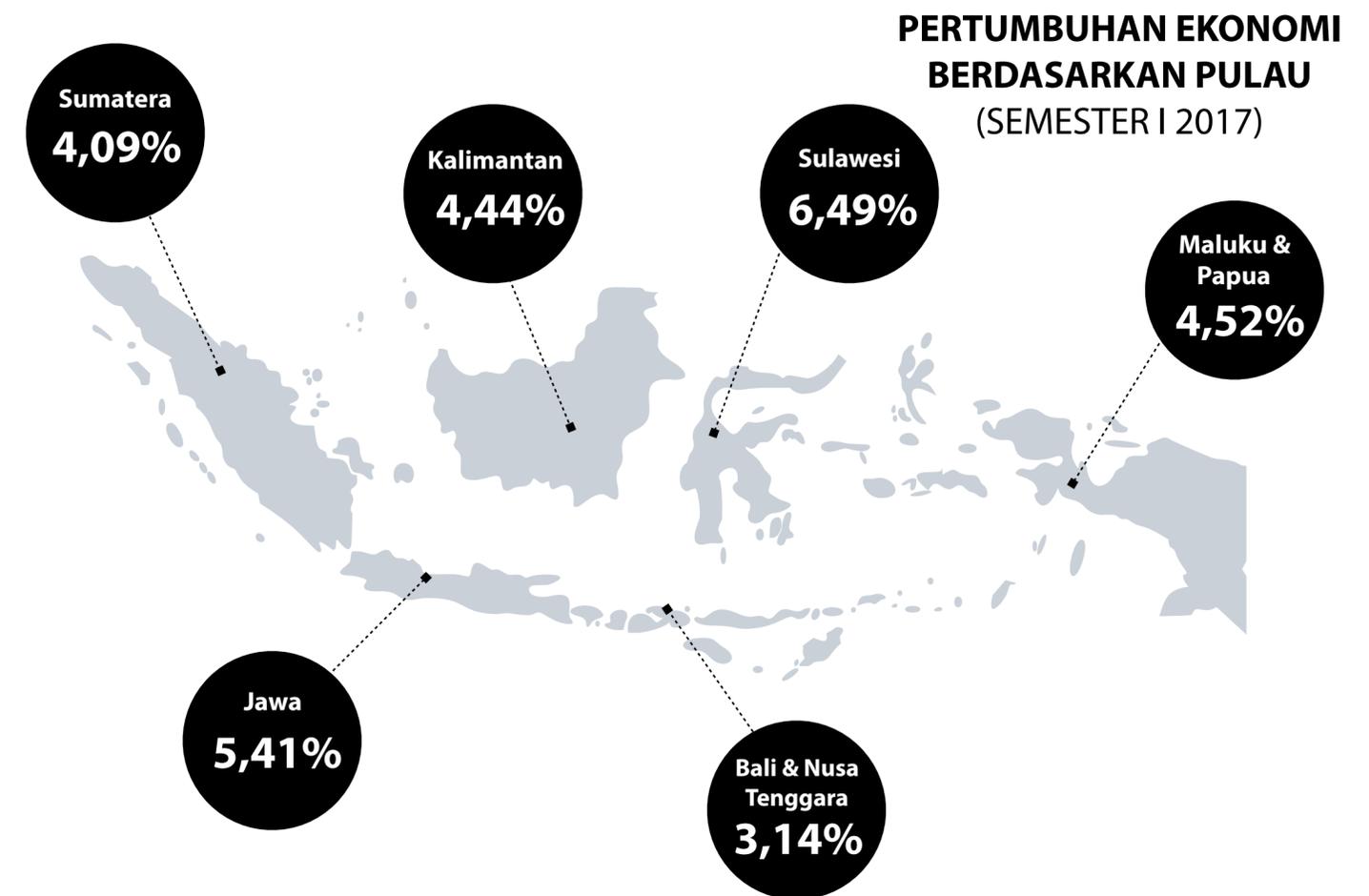
Perbedaan dihubungkan dan disatukan dalam penyediaan infrastruktur, baik di darat, laut, maupun udara, dengan memastikan setiap wilayah dari ujung barat hingga ujung timur republik memperoleh pelayanan dasar.

Menjawab tantangan kewilayahan tersebut, program pembangunan dijalankan dalam dimensi pemerataan dan kewilayahan baik untuk wilayah pedesaan, perbatasan, tertinggal, dan perkotaan.

Hal itu dilakukan dengan memacu pembangunan infrastruktur dan ekonomi untuk meningkatkan kesempatan kerja, serta mengurangi kesenjangan kemiskinan dan antar wilayah, termasuk pembangunan di Papua dan Papua Barat. ■

KOMITMEN MENGATASI KESENJANGAN ANTAR WILAYAH

Selama puluhan tahun pembangunan lebih berpusat di Jawa, sehingga luar Jawa kurang menjadi magnet ekonomi. Perlahan-lahan, Pemerintah mencoba mengatasi ketimpangan ini dengan pembangunan infrastruktur secara merata.



Sumber: BPS

PENYEBARAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL (PSN)

Proyek strategis nasional yang pendanaannya tak melulu dari kas negara memang masih lebih besar di kawasan barat Indonesia. Namun, Pemerintah secara bertahap mengarahkan dan menambah komposisi proyek infrastruktur di kawasan timur Indonesia agar membawa dampak berganda bagi ekonomi.



Sumber: KPIP



KONEKTIVITAS YANG MENGHUBUNGKAN SETIAP JENGKAL WILAYAH NUSANTARA

Kesinambungan antarwilayah adalah kunci untuk menggerakkan ekonomi. Setiap wilayah dengan setiap potensi yang berbeda-beda memerlukan sarana penghubung.

Pergerakan barang dan manusia dari barat ke timur dan sebaliknya membutuhkan infrastruktur yang efisien.

Pembangunan jalan dan jalan tol, perawatan jalur lama dan pembukaan jalur baru kereta api, perluasan bandara lama dan pembuatan bandara baru, renovasi pelabuhan lama dan pembukaan pelabuhan baru, dilakukan oleh Pemerintah untuk memastikan bahwa lalu-lintas orang dan barang memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi setiap warga.

Jika antar titik dalam wilayah, antarwilayah dalam pulau, dan antarpulau sendiri tersambung dalam jaringan infrastruktur yang kokoh, setiap titik dan wilayah akan menjadi pusat-pusat ekonomi. Jika pusat-pusat ekonomi baru bermunculan, kue ekonomi akan tersebar lebih merata dan adil.

Selain itu, ketersediaan infrastruktur juga diimbangi dengan penyediaan sarana pelayanan dasar yang dibutuhkan masyarakat, terutama air minum dan air bersih. ■

PEMERATAAN PROYEK DI SELURUH INDONESIA

Melalui Perpres No. 58/2017, Pemerintah menambah 9 proyek strategis untuk kawasan luar Jawa.



Proyek Strategis Nasional antara lain:



Jalan



Bandara



Pelabuhan

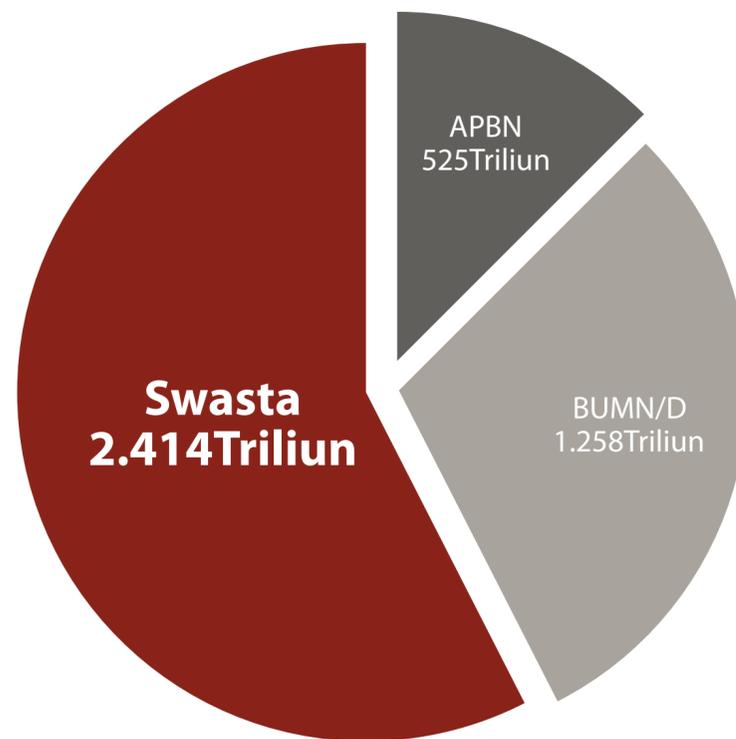


Bendungan

BERBAGI PERAN ANTARA PEMERINTAH DAN SWASTA

Keterlibatan pihak swasta mempercepat realisasi berbagai proyek prioritas yang telah ditetapkan. Pemerintah pun dapat memprioritaskan anggaran negara untuk mengatasi ketimpangan antar wilayah.

NILAI INVESTASI PSN



TOTAL NILAI INVESTASI
Rp. 4.197 Triliun

5 SEKTOR DENGAN NILAI INVESTASI TERTINGGI:



Sumber: KPPIP

TIGA REFORMASI UNTUK PERCEPATAN INFRASTRUKTUR

Keseriusan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di berbagai wilayah adalah dengan melakukan serangkaian reformasi fiskal, institusi maupun peraturan. Sehingga, memudahkan proses pembiayaan hingga pengadaan tanah yang kerap jadi masalah utama di lapangan.



REFORMASI FISKAL



Viability Gap Funding

Fasilitas untuk meningkatkan kelayakan finansial proyek dengan memberikan kontribusi pada biaya konstruksi maksimum 49%.



Land Revolving Fund

Penerbitan PMK No. 220 Tahun 2010. Dana bergulir untuk pengadaan tanah jalan tol sebagai dana talangan untuk percepatan pengadaan tanah yang berasal dari APBN.



Panduan Pembagian Risiko

PT PII telah menerbitkan panduan alokasi risiko dan upaya mitigasi untuk proyek KPBU.



Availability Payment

Penerbitan PMK No. 190/2015 dan Permendagri No. 96/2016. Skema pembayaran ketersediaan layanan oleh pemerintah selama masa konsensi setelah aset selesai dikerjakan oleh pihak swasta agar proyek memenuhi persyaratan Bank.



REFORMASI INSTITUSI

Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP)

KPPIP berperan aktif dalam percepatan penyediaan infrastruktur prioritas.

PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia

Potensi pengembangan mandat PT PII untuk memberikan penjaminan proyek di luar proyek KPBU.

BLU LMAN

Badan Layanan Umum-Lembaga Manajemen Aset Negara mendukung pendanaan pengadaan tanah untuk Proyek Strategis Nasional.

PPP Unit

Fasilitas untuk mendukung PJPK dalam persiapan proyek KPBU (PDF/TA).

PT Sarana Multi Infrastruktur

Penggabungan PT SMI dengan Pusat Investasi Pemerintah (PIP) sehingga perannya berkembang menjadi lembaga pembiayaan infrastruktur.



REFORMASI PERATURAN

Direct Lending

Penerbitan Perpres No. 82/2015. Mengatur pemberian jaminan untuk pinjaman langsung ke BUMN sehingga mempercepat proses penyediaan pendanaan untuk proyek.

Pengadaan Tanah

Penerbitan Perpres No. 148/2015. Mengatur upaya-upaya untuk percepatan pengadaan tanah sesuai UU No. 2/2012.

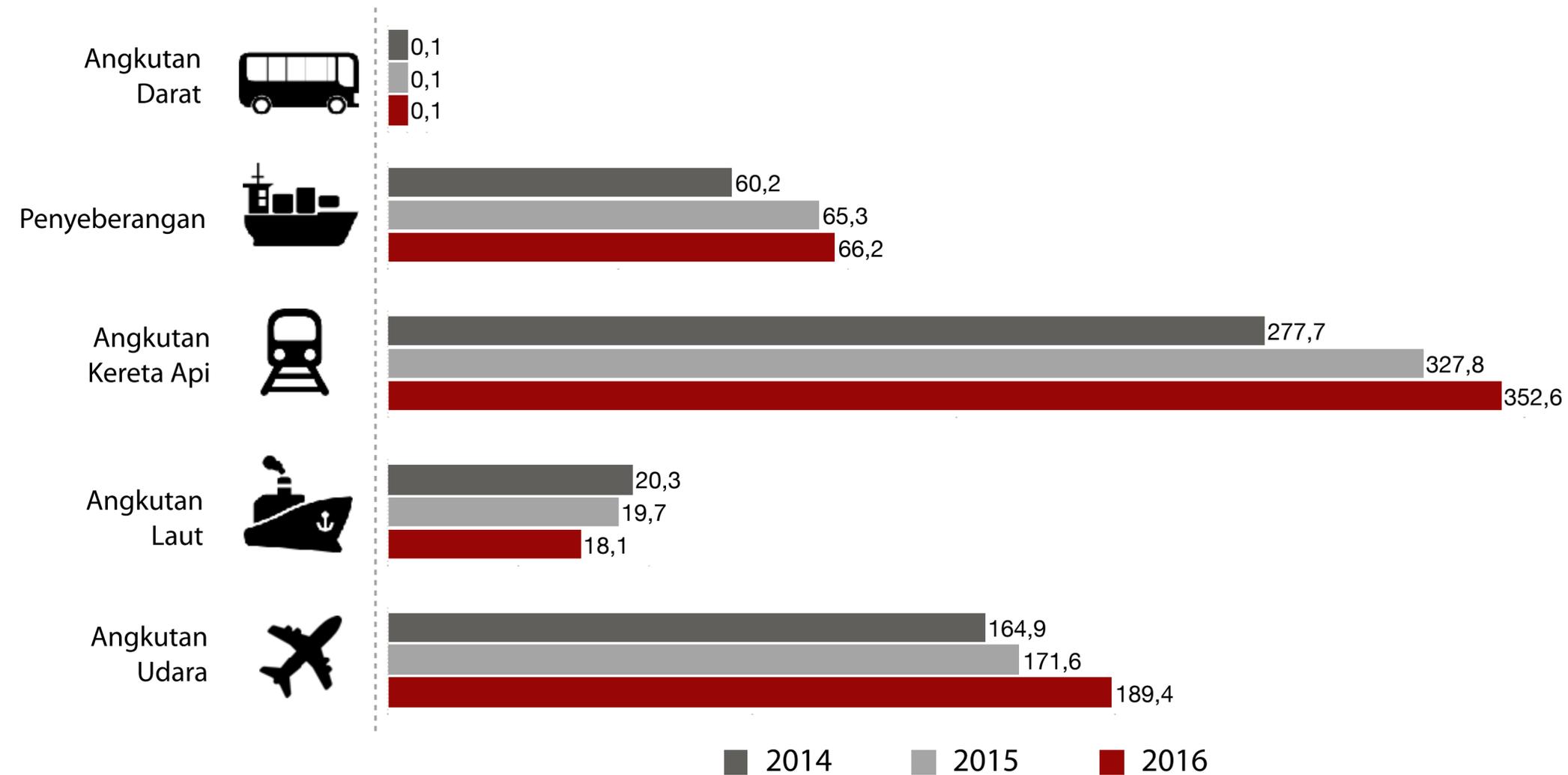
Paket Kebijakan Ekonomi

Melakukan deregulasi kebijakan dan peraturan yang menghambat infrastruktur dan pembentukan satuan kerja di Kemenko Perekonomian untuk memastikan efektivitas dan implementasi kebijakan tersebut.

KONEKTIVITAS MENDORONG PENINGKATAN JUMLAH PENUMPANG

Dampak awal pembangunan infrastruktur konektivitas adalah peningkatan jumlah penumpang. Kemudahan mobilitas ini merupakan modal penting untuk peningkatan aktivitas ekonomi, baik di kawasan barat maupun timur Indonesia.

DATA ANGKUTAN PENUMPANG (dalam juta orang)



Sumber: Kementerian Perhubungan

MENEMBUS ISOLASI PERBATASAN

Pembangunan jalan di kawasan perbatasan terus dilakukan untuk memudahkan mobilitas warga, memajukan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar.

Jalan Perbatasan Kalimantan



Balai Karang - Entikong -
Batas Sarawak (Malaysia),
Kalimantan Barat, Timur, dan Utara

Total Panjang : 1.920,1 km
Jalan Tembus : 1.582 km
Jalan Belum Tembus : 337 km

Jalan Perbatasan Nusa Tenggara Timur



Ruas Dafala - Nualain



Ruas Motamasin -
Laktutus - Dafala



Ruas Haliwen - Sadi -
Asumanu - Haekesak

Total Panjang : 176,2 km
Jalan Tembus : 151,1 km
Jalan Belum Tembus : 25,1 km

Jalan Perbatasan Papua



Segmen 1:
Jayapura - Arso -
Waris - Yetti



Segmen 2:
Yetti - Ubrub -
Oksibil



Segmen 3:
Oksibil - Tanah Merah -
Muting - Merauke

Total Panjang : 1.098,2 km
Jalan Tembus : 892,3 km
Jalan Belum Tembus : 205,9 km

Sumber: KPPIP

REVITALISASI PASAR PERBATASAN

Pemerintah berkomitmen memajukan ekonomi kawasan perbatasan yang selama ini tertinggal dengan merevitalisasi pasar.

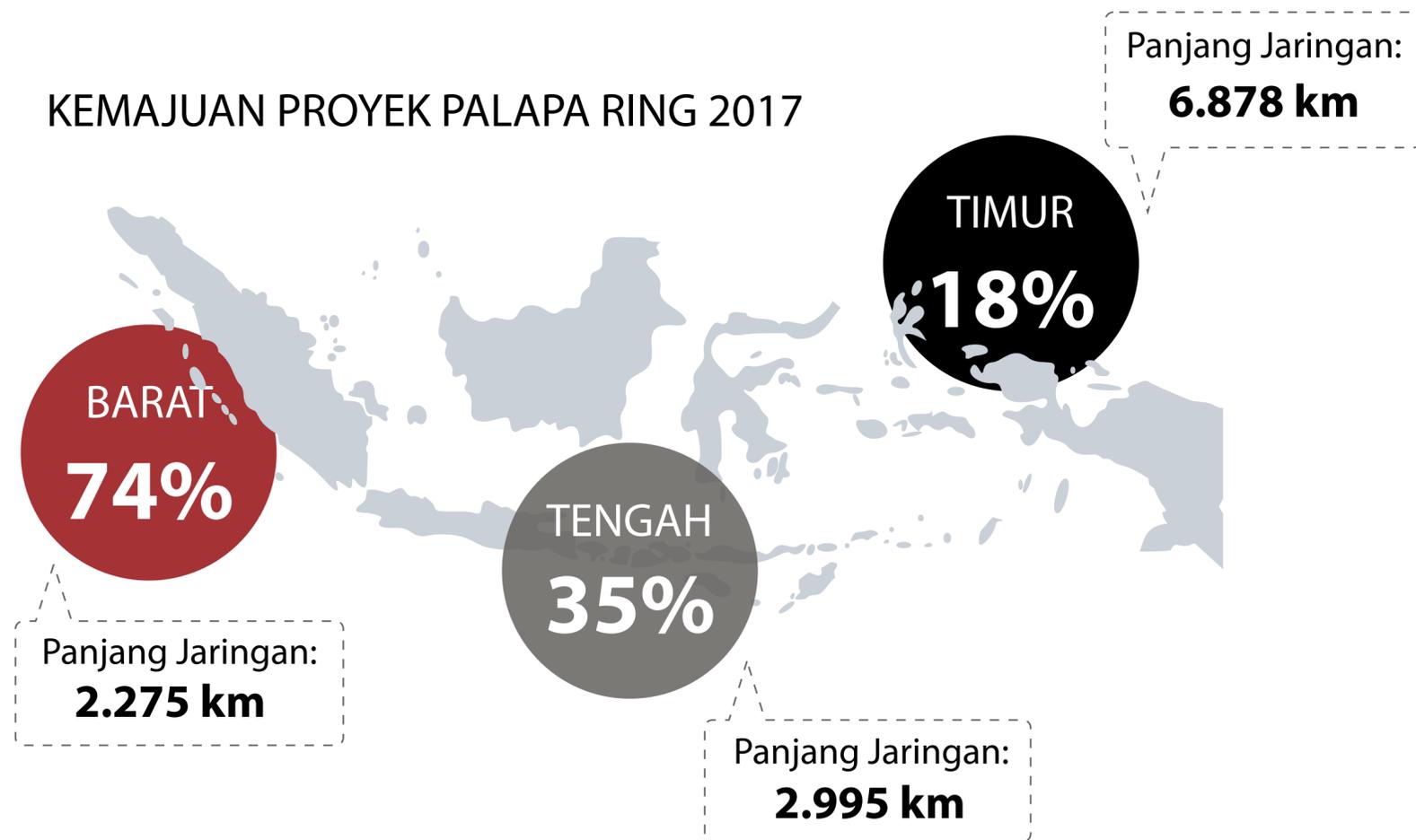


Sumber: Kementerian Perdagangan

PALAPA RING MEMPERSATUKAN INDONESIA

Kemajuan teknologi informasi membawa dampak pemerataan dan peningkatan produktivitas. Dengan alasan itu, Pemerintah terus meningkatkan penetrasi internet secara merata ke seluruh wilayah.

KEMAJUAN PROYEK PALAPA RING 2017



TARGET

| Tahun | Target Lokasi |
|-------|---------------|
| 2016 | 106 lokasi |
| 2017 | 417 lokasi |

CAPAIAN

| Tahun | Capaian Lokasi |
|-------|----------------|
| 2016 | 106 lokasi |
| 2017 | 139 lokasi |



Base Transceiver Station (BTS)

 Peningkatan penetrasi broadband setiap 10% meningkatkan akan PDB per kapita sebesar 1.38% di negara berkembang. (Bank Dunia, 2008)

Sumber: Kementerian Komunikasi dan Informatika



PEMBANGUNAN INDONESIA SENTRIS BERKELANJUTAN

Pemusatan pembangunan hanya Pulau Jawa tidak dibiarkan berlangsung terlalu lama. Wilayah-wilayah lain di luar Jawa tidak boleh ditinggalkan atau hanya menonton belaka.

Indonesia terlalu kaya, sehingga memfokuskan pembangunan hanya di Pulau Jawa akan membuat bangsa ini seperti tak kenal diri dan potensi yang dimilikinya.

Dalam upaya mewujudkan ke arah sana, wilayah-wilayah di luar Pulau Jawa dibuat setara. Wilayah-wilayah yang selama ini tertidur, dibangkitkan. Warga yang selama ini terdiam, dibangun. Potensi-potensi yang tersembunyi digali dan dikaji, sehingga wilayah-wilayah tersebut menjadi daya tarik baru.

Pemerintah membuka kawasan pariwisata, kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus, perbaikan pos lintas batas negara, dan peningkatan investasi di luar Pulau Jawa. Langkah ini akan memastikan lahirnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di seluruh wilayah Indonesia. ■

PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA BARU

Alam Indonesia yang indah dan tersebar di seluruh wilayah adalah juga modal penting yang harus dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk mempercepat kemajuan di luar Jawa.



Sumber: KPPIP

PEMBANGUNAN KAWASAN INDUSTRI DAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS LUAR JAWA

Pembangunan kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus, untuk meningkatkan nilai tambah perekonomian, menjadi salah satu strategi penting untuk mempercepat kemajuan wilayah luar Jawa.



26 PUSAT KEGIATAN STRATEGIS NASIONAL (PKSN)

Pemerintah membangun pusat kegiatan strategis nasional untuk menggerakkan ekonomi di titik-titik perbatasan agar dapat mengejar ketertinggalan dibanding wilayah-wilayah lain.



Sumber: Badan Nasional Pengelola Perbatasan

PEMBANGUNAN DI BERANDA TERDEPAN

Kawasan perbatasan tak lagi hanya berfungsi konvensional, mengawasi arus keluar-masuk orang dan barang. Lebih dari itu, ia telah menjadi daya tarik ekonomi, yakni sebagai lokasi pariwisata.



PLBN Entikong



PLBN Badau



PLBN Aruk



PLBN Skouw



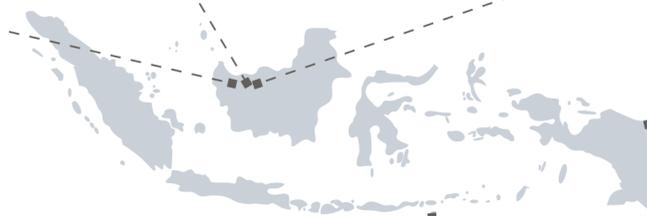
PLBN Motaain



PLBN Wini



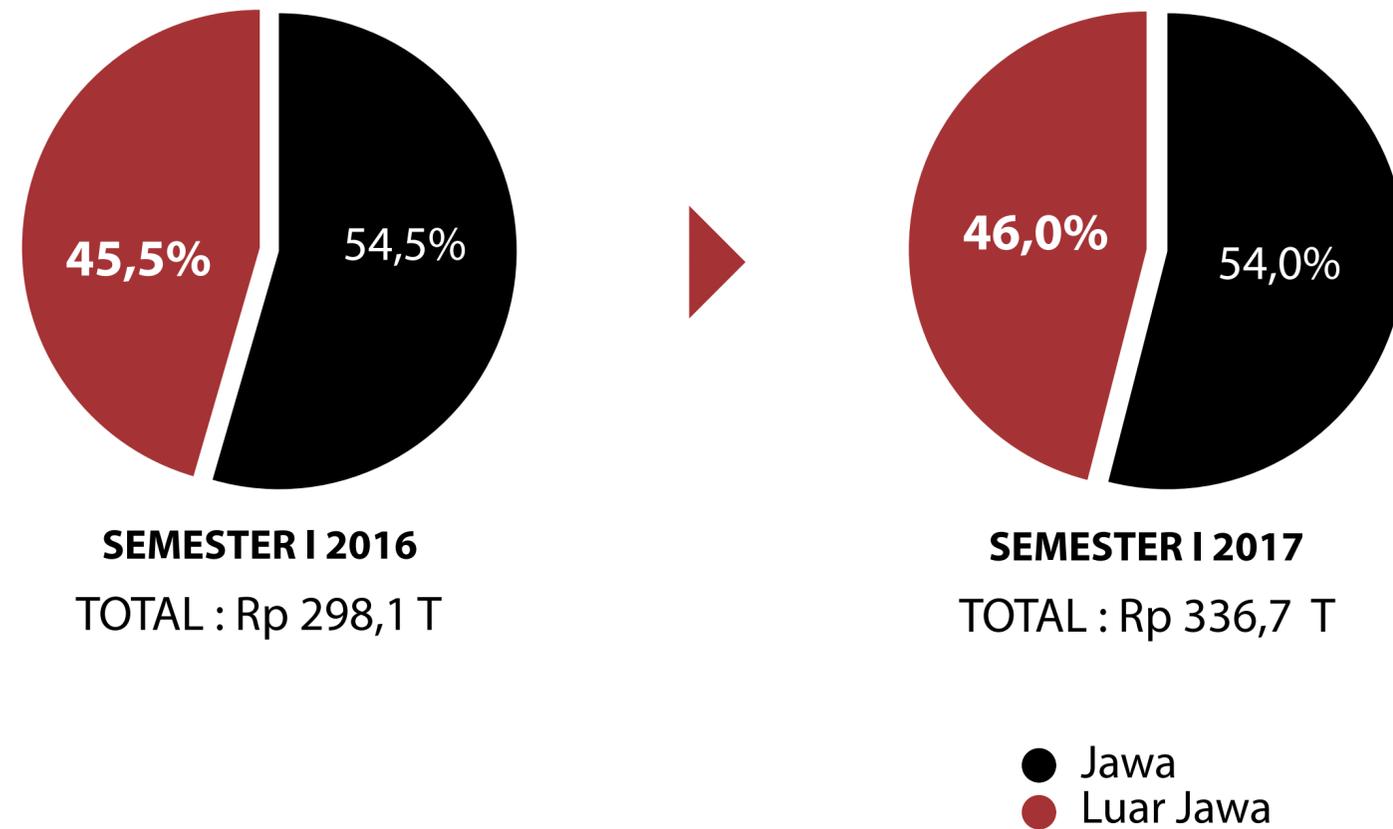
PLBN Motamasin



Pos Lintas Batas Negara (PLBN) adalah bangunan yang berfungsi sebagai gerbang keluar masuknya masyarakat dari Indonesia ke negara tetangga, atau pun sebaliknya.

PENINGKATAN INVESTASI LUAR JAWA

Meskipun investasi di Jawa masih lebih besar, namun proporsi investasi di luar Jawa terus meningkat dari tahun ke tahun.



Sumber: BKPM



MERAWAT ALAM INDONESIA BERSAMA

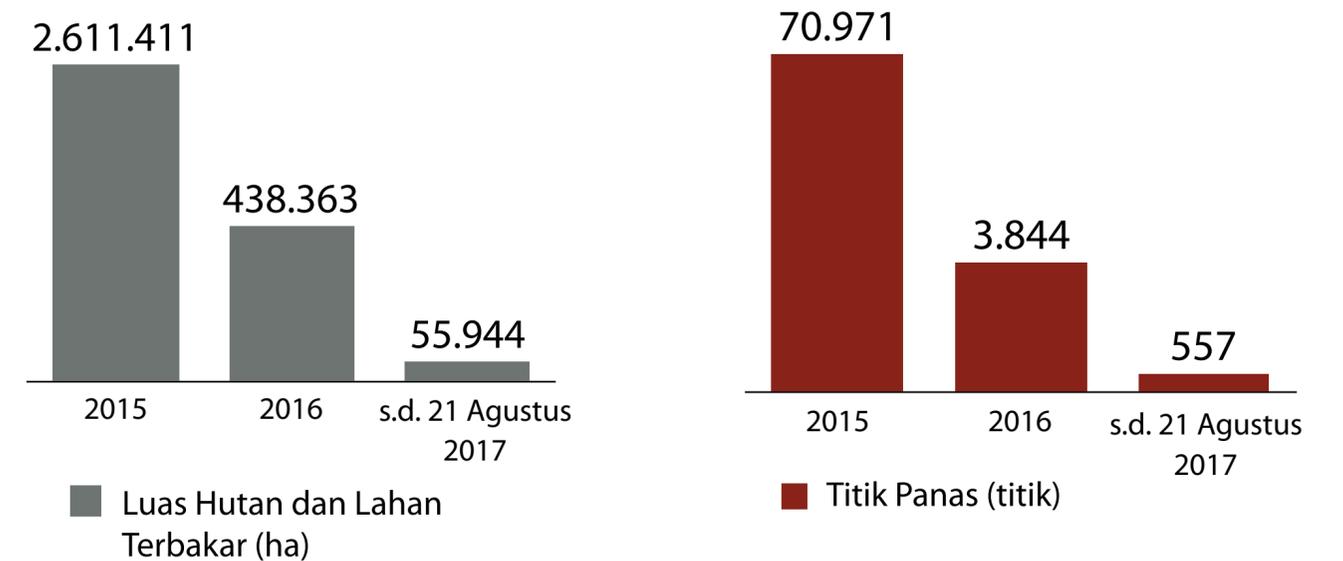
Alam Indonesia perlu terus dirawat dan dijaga secara bersama. Sehingga makin banyak hasil seperti berkurangnya jumlah titik panas dan luas area kebakaran hutan yang terjadi dalam dua tahun ini.

Penegakan hukum yang tegas menjadi instrumen penting untuk mengatasi berbagai persoalan lingkungan hidup yang merugikan negara dan warga masyarakat. Sanksi administratif, perdata, maupun pidana terhadap pelaku kerusakan lingkungan hidup terus dilakukan.

Pemerintah meyakini bahwa menjaga lingkungan hidup adalah tantangan bersama yang memerlukan kolaborasi sekaligus partisipasi banyak pihak, tidak hanya dari satu atau dua pihak. Untuk itu diperlukan penguatan sinergi antara Pemerintah, swasta, lembaga swadaya masyarakat dan warga sekitar. ■

PENURUNAN JUMLAH TITIK PANAS

Bertahun-tahun kebakaran hutan dan lahan selalu menjadi masalah dengan kerugian yang sangat besar. Saat ini pengendalian yang dilakukan Pemerintah telah menunjukkan hasil yang signifikan.



Luas areal kebakaran hutan dan lahan menurun 98%, dibandingkan kebakaran hutan dan lahan terbesar tahun 2015.

Jumlah titik panas tahun 2017 menurun 99% dibandingkan dengan tahun 2015 dan 2016.

Sumber: KLHK (Olahan dari Satelit TERRA dan Satelit Landsat)

STRATEGI PENANGANAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN

Melalui pendekatan yang komprehensif, salah satunya dengan penegakan hukum secara tegas bagi mereka yang melanggar, Pemerintah berhasil menangani dan mencegah kebakaran hutan dan lahan pada tahun 2017.

PERCEPATAN KELEMBAGAAN



Kunci Keberhasilan Pengendalian kebakaran hutan dan kebakaran lahan yang dijalankan Pemerintah adalah:

1. **Koordinasi** melekat dan pemantauan rutin antar Kementerian/ Lembaga/ Daerah.
2. Meningkatkan **sistem pendukung** menggunakan teknologi informasi termasuk satelit.
3. Melibatkan dan **memberdayakan masyarakat** termasuk sektor swasta.
4. **Penegakan hukum** dan perbaikan tata kelola hutan dan lahan.

PENEGAKAN HUKUM UNTUK KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN

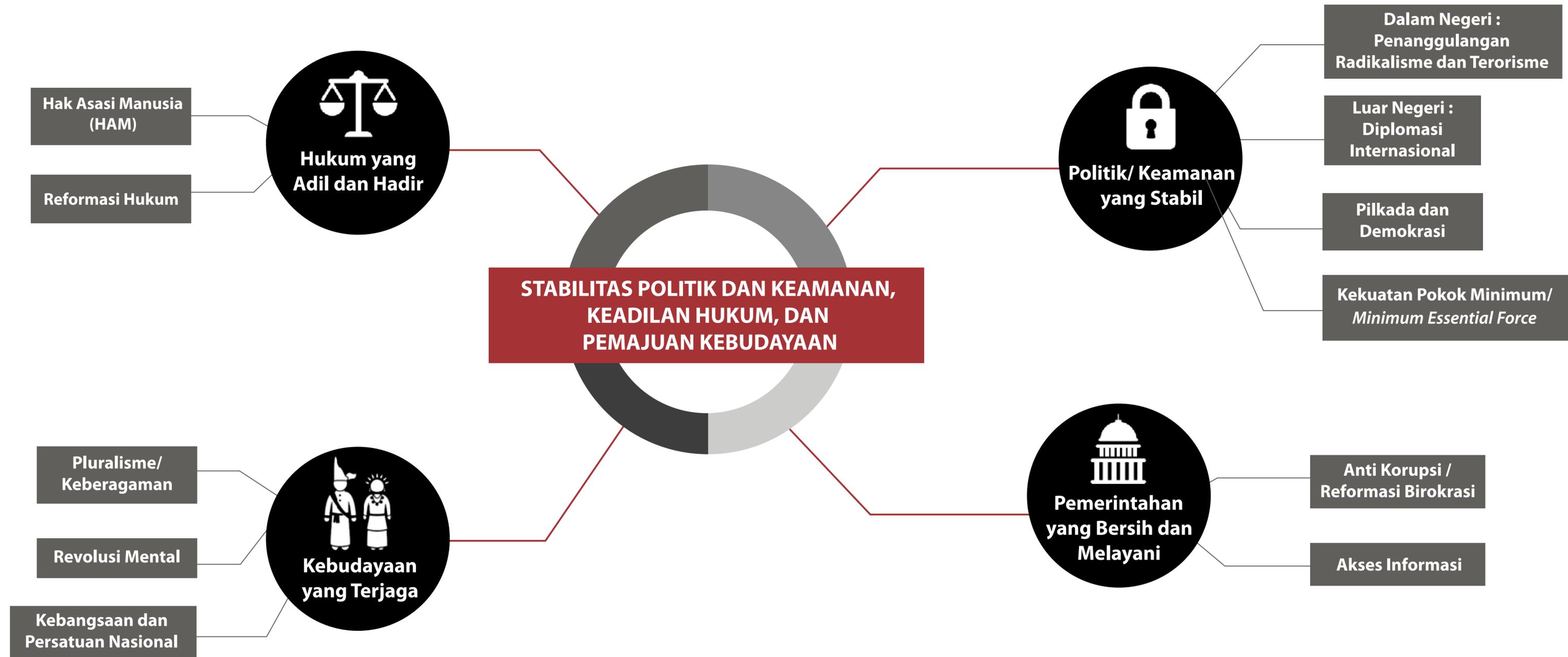


Sumber: Kementerian LHK

BAGIAN IV

STABILITAS POLITIK DAN KEAMANAN,
KEADILAN HUKUM, DAN
PEMAJUAN KEBUDAYAAN

IKHTISAR



STABILITAS POLITIK DAN TERWUJUDNYA RASA AMAN



Politik, hukum, keamanan, dan kebudayaan memiliki peran penting untuk mewujudkan pembangunan yang berkeadilan serta menghapus ketimpangan sosial dan ekonomi.

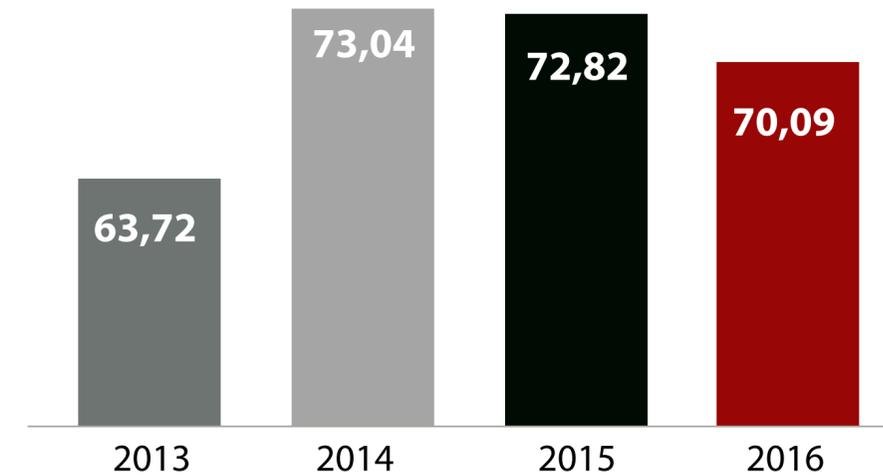
Dibutuhkan kehadiran Negara dalam perlindungan kepada masyarakat dan memastikan hukum ditegakkan dengan adil. Untuk mewujudkan itu pemerintah berupaya melakukan pembaruan hukum dan reformasi birokrasi yang disertai upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Pemerintah juga berupaya melakukan pendekatan komprehensif untuk menangani radikalisme dan terorisme yang berkembang, termasuk melalui pendekatan lunak. Sejalan dengan itu, diplomasi internasional juga terus dilakukan untuk mendorong stabilitas kawasan.

Meskipun sedikit menurun, Indeks Demokrasi Indonesia 2016 menunjukkan bahwa ruang politik dan demokrasi di Indonesia berada dalam keadaan cukup baik. Penilaian serupa juga disampaikan oleh Freedom House yang memberikan nilai 61 dari 100. ■

INDEKS DEMOKRASI INDONESIA

Dinamika politik sepanjang tahun 2016 menyebabkan Indeks Demokrasi Indonesia sedikit menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, secara umum masih cukup baik.

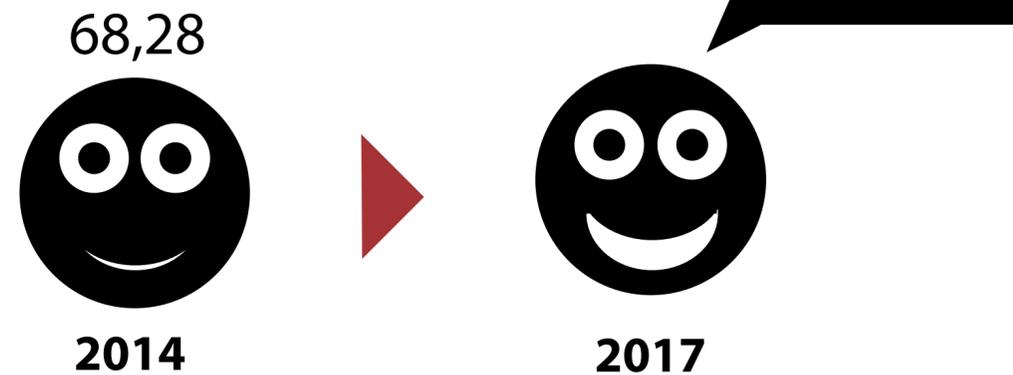


Sumber: Badan Pusat Statistik

MASYARAKAT LEBIH BAHAGIA

Kebahagiaan masyarakat Indonesia dari tahun ke tahun terus meningkat. Ini merupakan modal penting untuk terus maju dan menghadapi berbagai tantangan untuk menjadi bangsa yang besar.

INDEKS KEBAHAGIAAN MASYARAKAT INDONESIA



Indeks Kebahagiaan diukur menggunakan 3 dimensi yaitu:

1. Kepuasan Hidup
2. Perasaan (*Affect*)
3. Makna Hidup (*Eudaimonia*)



Keterangan: Indeks Kebahagiaan diukur setiap 3 tahun sekali



HUKUM YANG ADIL DAN HADIR

Pemerataan membutuhkan sistem hukum yang adil bagi seluruh warga negara. Pemenuhan hak asasi manusia menjadi syarat utamanya.

Pemenuhan hak-hak kebebasan sipil dan politik (sipol), sebagian besar dapat dilihat capaiannya dalam Indeks Demokrasi Indonesia terutama yang menyangkut kebebasan sipil, kebebasan berkumpul, hak-hak politik dan kebebasan dari diskriminasi.

Tentu ada pekerjaan rumah yang belum selesai, seperti penyelesaian HAM masa lalu yang juga telah dilaporkan secara transparan dalam acara Universal Periodic Review di Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bulan Mei 2017.

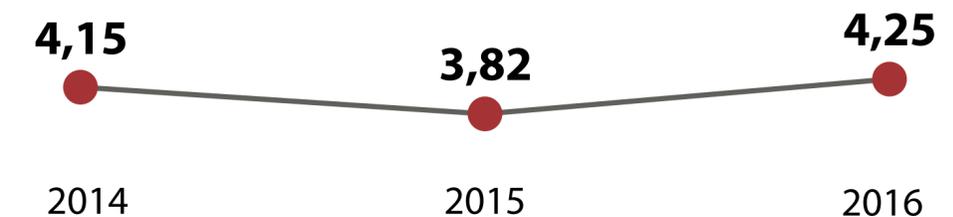
Sementara pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya (ekosob) telah dijalankan pemerintah melalui berbagai program jaminan sosial, Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar, penyediaan perumahan yang layak dan sebagainya.

Pada sisi lain, sistem hukum terus diperbaiki melalui kehadiran Satgas Saber Pungli, pembentukan Satgas penyelundupan, menurunkan tingkat kriminalitas dan revitalisasi lembaga pemasyarakatan ■

JAMINAN ATAS HAK-HAK FUNDAMENTAL

Terus berusaha melindungi hak-hak fundamental yang dijamin dalam instrumen hukum nasional maupun internasional, Pemerintah mempertimbangkan untuk melakukan moratorium terhadap hukuman mati untuk melindungi hak hidup.

Skor Prinsip Penghormatan, Perlindungan, Pemenuhan, dan HAM



Indikator:

1. Jaminan hak atas hidup
2. Jaminan atas hak untuk bebas dari penyiksaan
3. Jaminan atas hak untuk tidak diperbudak
4. Jaminan perlindungan atas hak untuk tidak dipenjara akibat kewajiban kontraktual
5. Jaminan perlindungan atas hak untuk tidak dipidana atas tindakan yang bukan Kejahatan
6. Jaminan perlindungan atas hak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama

Sumber: Indonesian Legal Roundtable

APRESIASI DEWAN HAM PBB

Dewan HAM PBB memberikan apresiasi melalui laporan kelompok kerja Universal Periodic Review terhadap kinerja pemerintah Indonesia di bidang HAM.



Indonesia memiliki komitmen yang kuat dalam menjunjung tinggi kebebasan berpendapat dan berekspresi.

Pada April 2017, hampir 42 juta jiwa penduduk Indonesia menggunakan hak suaranya di 101 pemilihan langsung di tingkat lokal.

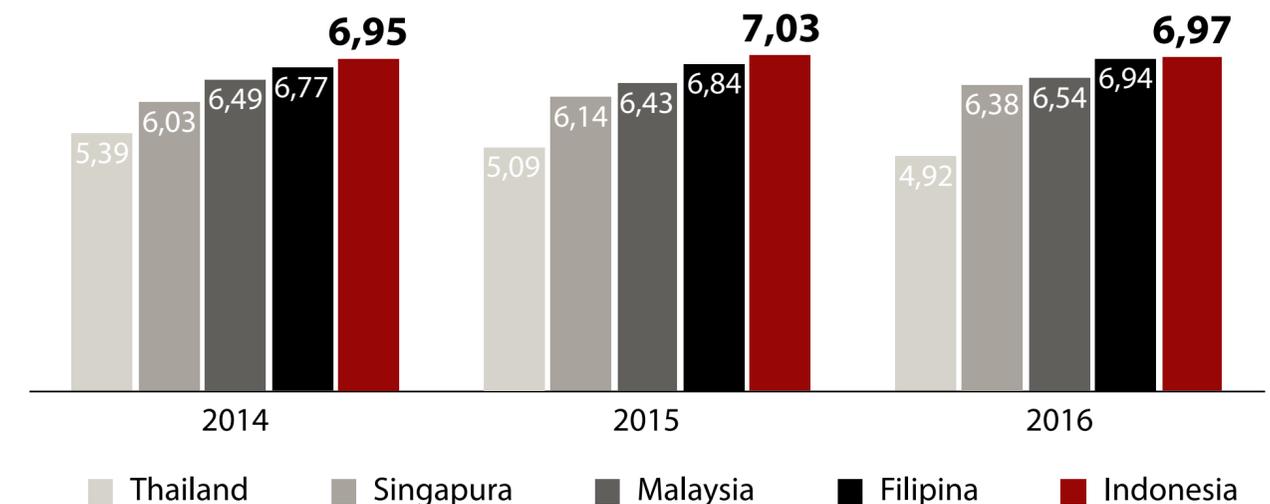
Keseluruhan pemilihan tersebut diselenggarakan dengan cara yang bebas, inklusif, dan damai. Proses demokratis tersebut memperkuat posisi HAM dalam DNA Indonesia.

Sumber: Dewan HAM PBB

KOMITMEN PEMENUHAN HAK SIPIL DAN POLITIK

Dibandingkan negara-negara di rumpun ASEAN, Indonesia memperoleh nilai total indeks demokrasi tertinggi secara konsisten dari tahun ke tahun.

Nilai Total Indeks Demokrasi Negara-Negara ASEAN
2014-2016



Sumber: *The Economist Intelligence Unit*

PENANGANAN KASUS HAM DI PAPUA

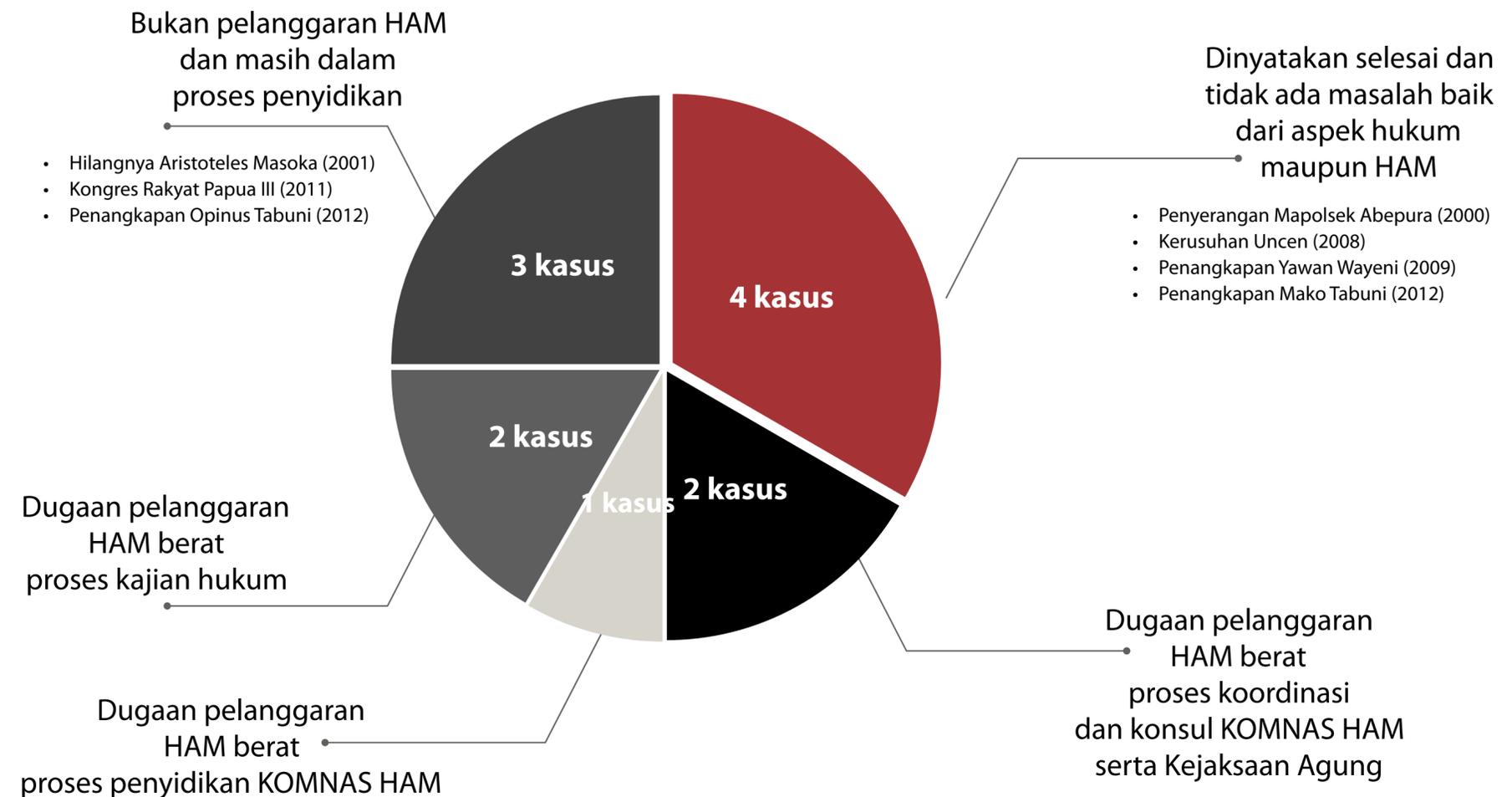
Pemerintah membuka diri untuk menerima laporan dari publik, terkait isu dugaan pelanggaran HAM yang terjadi antara 1996 dan 2014 dengan membentuk Tim Terpadu Penyelesaian Dugaan Pelanggaran HAM Papua.



Keputusan Menkopolhukam No. 5 Tahun 2017 tentang Tim Terpadu Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM :

Pemerintah berupaya membuka diri untuk menyelesaikan isu dugaan pelanggaran HAM Papua dengan membentuk Tim Terpadu Penyelesaian Dugaan Pelanggaran HAM Papua.

KEMAJUAN TIM TERPADU PENYELESAIAN ISU HAM



Sumber: Kemenkopolhukam

KABUPATEN DAN KOTA PEDULI HAM

Mendorong peran aktif pemerintah kabupaten dan kota untuk melaksanakan tanggung jawab hak asasi manusia.

KRITERIA KOTA/ KABUPATEN PEDULI HAM
menurut Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 34 tahun 2016 :



Hak atas kesehatan



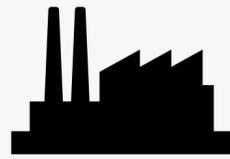
Hak atas pendidikan



Hak perempuan dan anak



Hak atas kependudukan



Hak atas pekerjaan

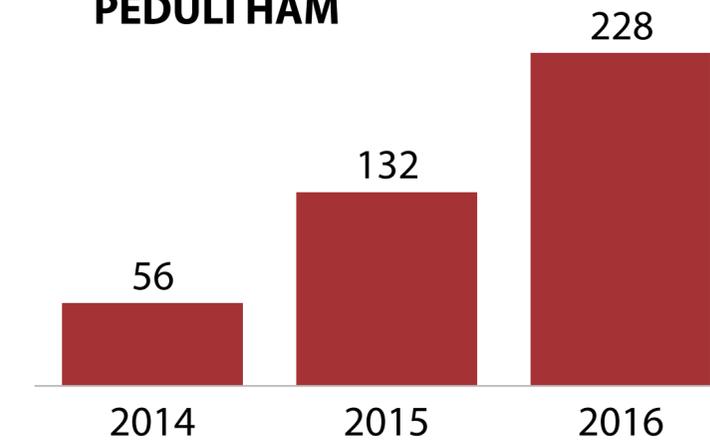


Hak atas perumahan yang layak



Hak atas lingkungan yang berkelanjutan

JUMLAH KABUPATEN/ KOTA PEDULI HAM

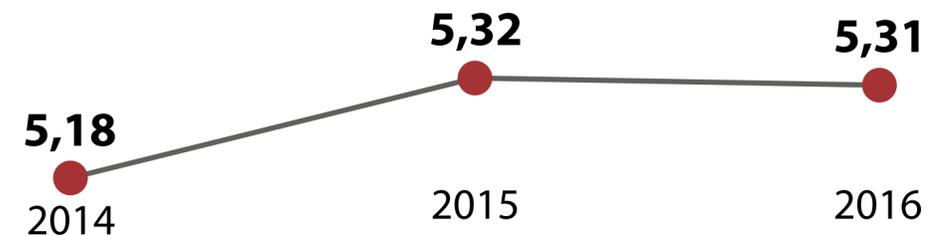


Sumber: Kementerian Hukum dan HAM

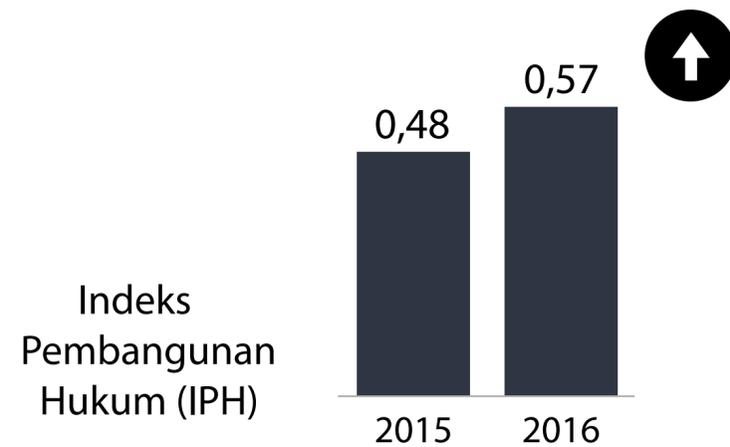
REFORMASI HUKUM

Meskipun masih banyak agenda dan tantangan yang dihadapi, namun berbagai upaya menjalankan reformasi hukum secara komprehensif sudah mulai menunjukkan dampak positif.

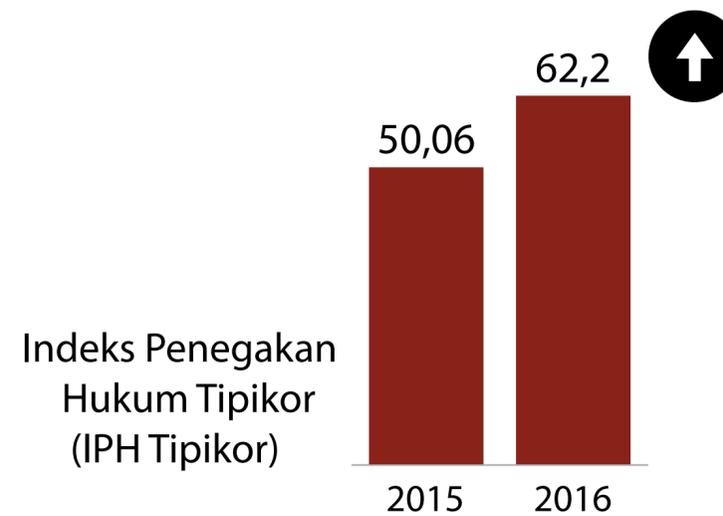
Trend Nilai Indeks Negara Hukum Indonesia



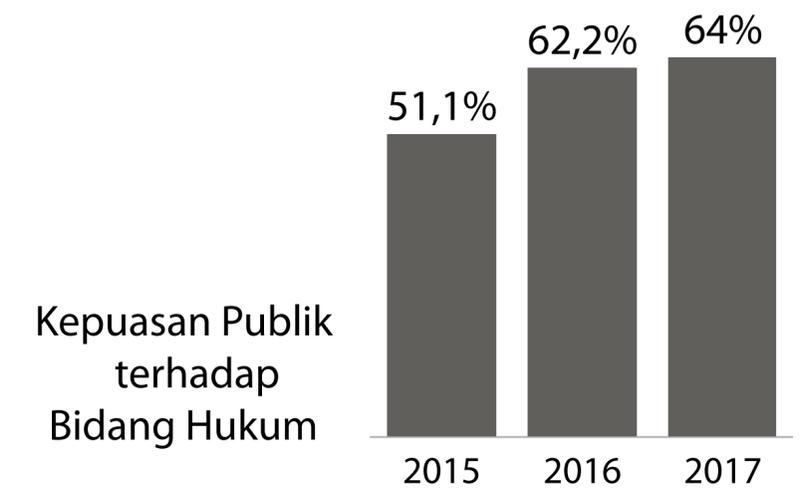
Sumber: *Indonesian Legal Roundtable*



Sumber: Kementerian PPN/BAPPENAS



Sumber: Kementerian PPN/BAPPENAS



Sumber: *Centre for Strategic and International Studies (CSIS)*

PENEGAKAN KEADILAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM

Kehadiran negara di tengah masyarakat sangat ditentukan oleh seberapa jauh keadilan ditegakkan dan perlindungan diberikan bagi yang berhak menerima.



1002 Kegiatan Operasi Tangkap Tangan (OTT) Saber Pungli dengan jumlah tersangka sebanyak 1.800 orang dan Rp. 316 M



Bantuan Hukum untuk penanganan litigasi 8.005 kasus dan nonlitigasi 1.188 kegiatan



Penurunan jumlah Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) di lembaga Pemasayarakatan Khusus Anak (LPKA) dari 3.183 orang menjadi 2.462 orang



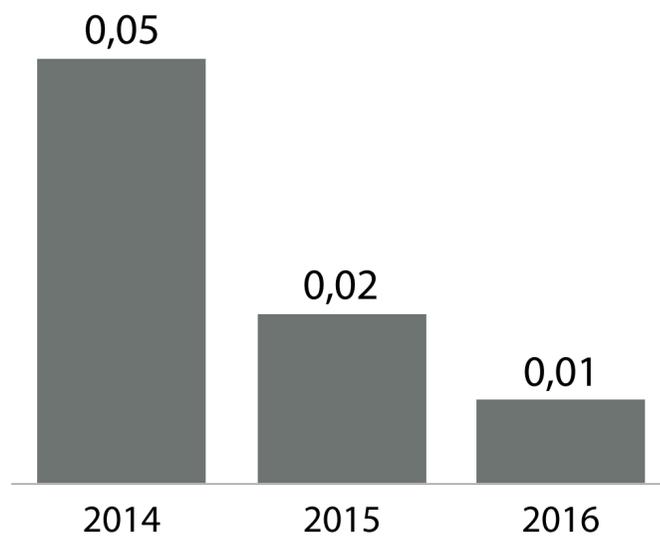
Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) dari 87 hakim pada tahun 2016 turun menjadi 32 hakim (tahun 2017)

Sumber: Kementerian PPN/ BAPPENAS

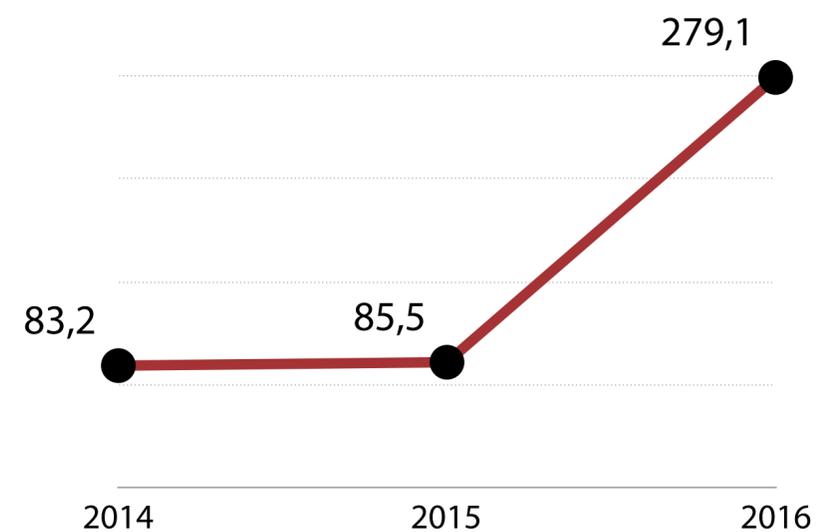
PENYALAHGUNAAN NARKOBA MENURUN

Upaya serius untuk menyelamatkan masyarakat dan terutama generasi penerus bangsa dari bahaya Narkoba perlahan-lahan menunjukkan hasil nyata.

Laju Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba (satuan)



Total Aset Bandar Narkotika yang Berhasil Disita BNN (miliar)



Pengungkapan Kasus Narkotika Januari - Juni 2017:

 : **423**
kasus

 : **597**
tersangka
(592 WNI dan 5 WNA)

| No | Jenis Barang Bukti | Jumlah | Satuan |
|----|-----------------------|------------|--------|
| 1 | Shabu | 236.306,80 | Gram |
| 2 | Ekstasi | 108.590,25 | Butir |
| 3 | Heroin | 4,60 | Gram |
| 4 | Kokain | 3,49 | Gram |
| 5 | Ganja | 61.363,08 | Gram |
| 6 | Ketamina | 93,23 | Gram |
| 7 | 4-Chlomethcathinone | 50 | Liter |
| 8 | Synthetic Cannabinoid | 532,90 | Gram |

Sumber: Badan Narkotika Nasional dan Kementerian PPN/ BAPPENAS



BIROKRASI PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN MELAYANI

Keberhasilan program pembangunan, terutama pemerataan, sangat ditentukan oleh kualitas birokrasi yang bersih dan melayani.

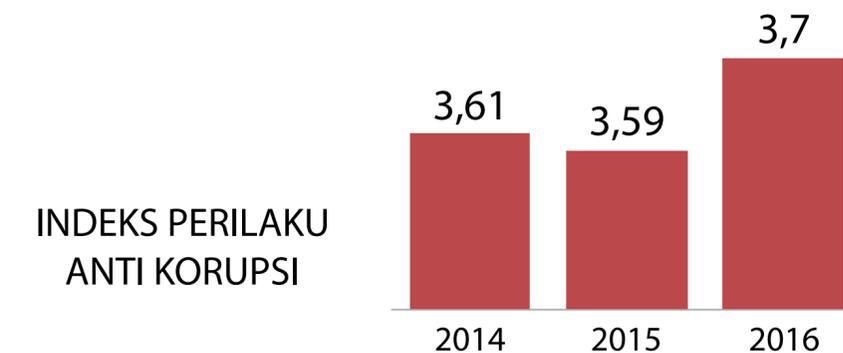
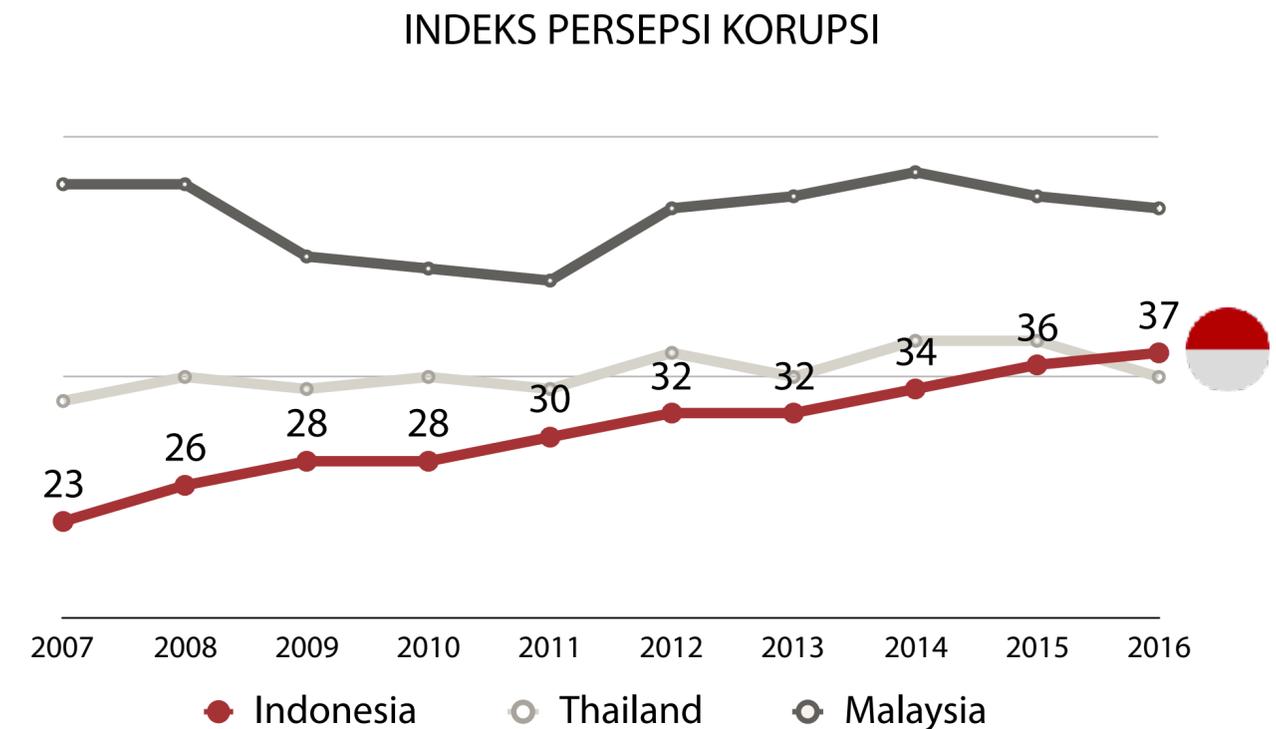
Upaya pelayanan yang lebih baik menjadi salah satu fokus utama pemerintah dalam menjalankan reformasi birokrasi. Hal ini juga ditentukan oleh sumber daya manusia yang direkrut secara transparan dan ditingkatkan kapasitas dan kapabilitasnya.

Pembenahan sistem kerja birokrasi agar lebih efektif dan efisien adalah fokus berikutnya. Integrasi perencanaan dan penganggaran, transparansi dan akses informasi dan mekanisme komplain publik adalah sejumlah daftar program yang terus disempurnakan pemerintah.

Pada akhirnya pencegahan dan pemberantasan korupsi, merupakan komitmen jangka panjang untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Penyempurnaan strategi dan sinergi dengan KPK dan pemangku kepentingan lainnya terus dilakukan agar kinerja anti-korupsi terus membaik. ■

INDEKS PERSEPSI KORUPSI DAN INDEKS PERILAKU ANTI KORUPSI

Kendati masih terdapat banyak tantangan, upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia menunjukkan tren perbaikan selama tiga tahun terakhir.



Sumber: *Transparency International* dan Badan Pusat Statistik

PENYELAMATAN KERUGIAN NEGARA

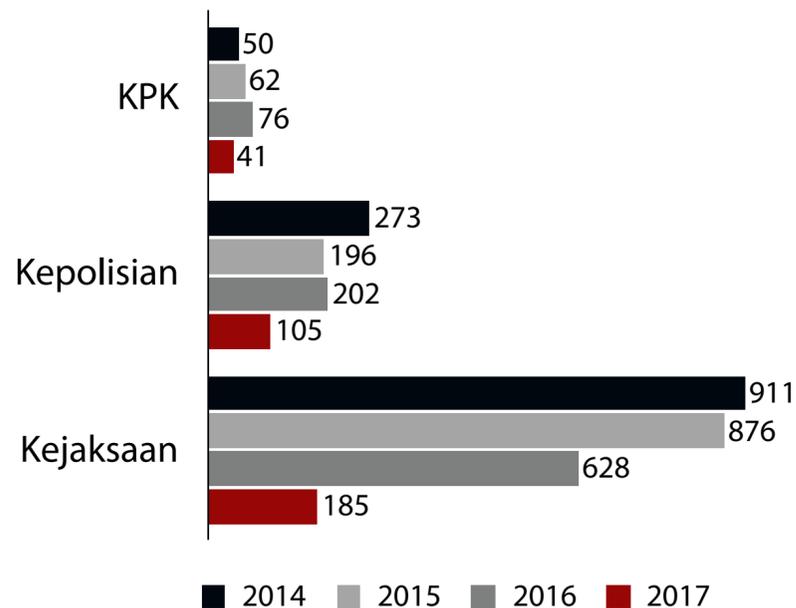
Selain untuk membuktikan bahwa Negara hadir, penegakan hukum terhadap korupsi juga dimaksudkan untuk mengembalikan uang negara yang dikorupsi.

Kolaborasi dan penguatan aparat penegak hukum terus ditingkatkan di pusat maupun daerah.

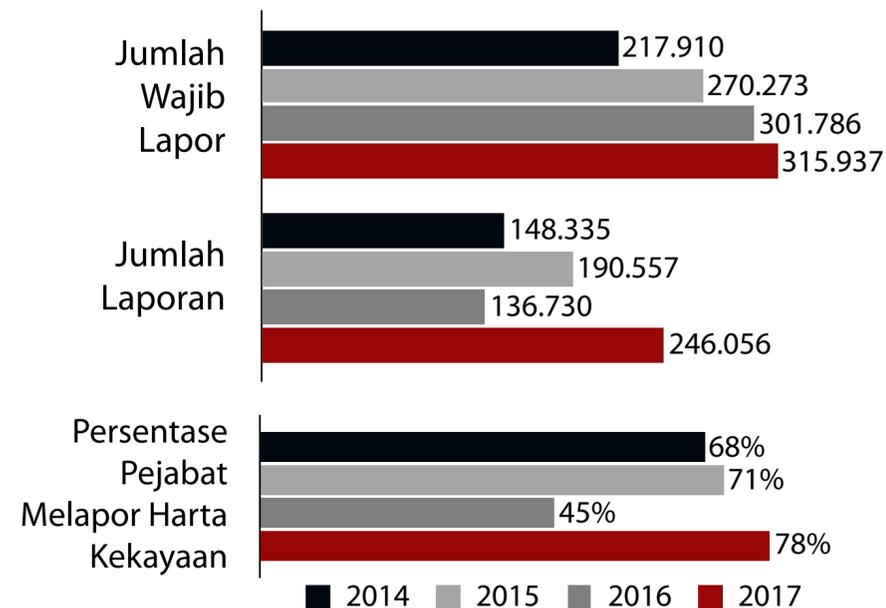


Penyelamatan kerugian negara dari tindak pidana korupsi **Rp 3,55 triliun** dan **USD 263.929,12** sepanjang 2016 dan 2017.

PENINDAKAN TINDAK KORUPSI (orang)



KEWAJIBAN MELAPORKAN HARTA KEKAYAAN

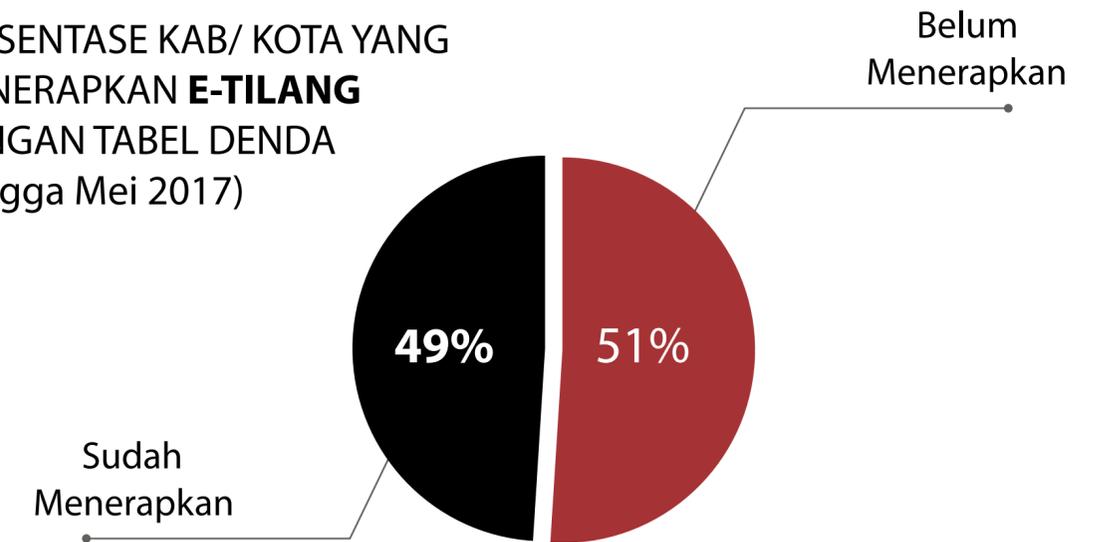


Sumber: KPK

REFORMASI PELAYANAN LALU LINTAS

Pelayanan terhadap pengguna lalu-lintas terus ditingkatkan dengan mengadopsi teknologi informasi. Dampaknya adalah kecepatan pelayanan dan resiko pungli yang semakin kecil.

PERSENTASE KAB/ KOTA YANG MENERAPKAN **E-TILANG** DENGAN TABEL DENDA (hingga Mei 2017)



E-SAMSAT

Mabes Polri dan 7 Provinsi:

1. Banten
2. Jawa Barat
3. Jawa Tengah
4. DKI Jakarta
5. DI Yogyakarta
6. Jawa Timur
7. Bali

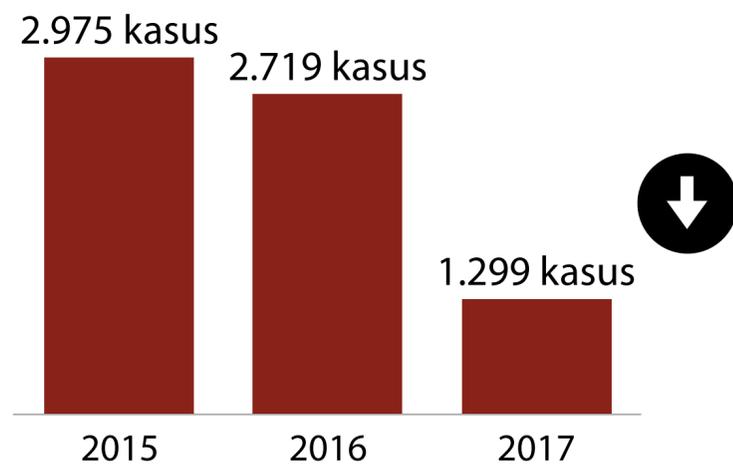


Sumber: POLRI

PENURUNAN TINGKAT KECELAKAAN MUDIK LEBARAN 1438 HIJRIAH

Belajar dari penanganan dan pengalaman di tahun sebelumnya, Pemerintah berupaya menyempurnakan pengelolaan arus mudik dan arus balik Lebaran untuk memberikan kenyamanan bagi warga yang mudik.

ANGKA KECELAKAAN ARUS MUDIK (2015-2017)



Strategi Penanganan Mudik Lebaran 2017:

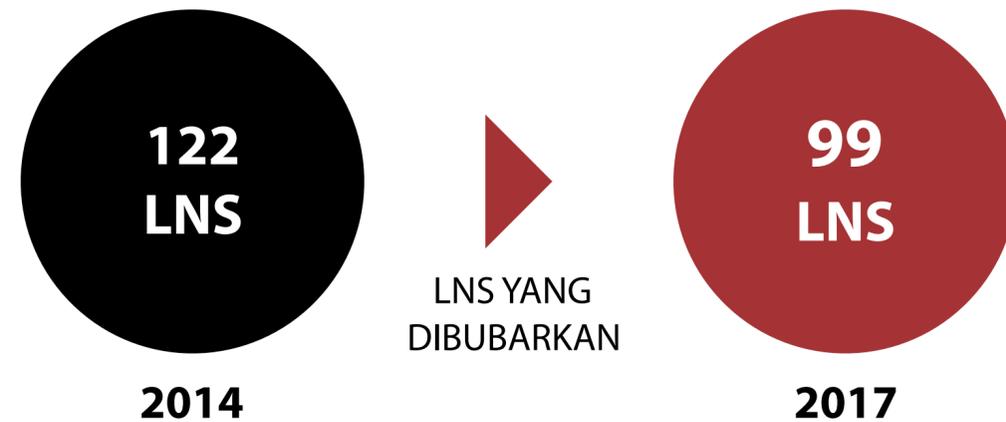
1. Koordinasi intensif antar stakeholder (Kemenuh, Kemenpupera, Kakorlantas Polri dan Pemerintah Daerah)
2. Melakukan *ramp check* (pemeriksaan kelayakan kendaraan)
3. Pelayanan Posko Terpadu
4. Pemberian fasilitas mudik gratis



Sumber: POLRI, Kementerian Perhubungan, dan Sekretariat Kabinet

LANGKAH-LANGKAH MEMPERBAIKI LAYANAN

Sejumlah langkah penting telah dilakukan untuk menciptakan efektivitas dan efisiensi pelayanan, mulai dari pengurangan lembaga non struktural (LNS), penyebaran aparat sipil negara hingga ke pelosok daerah hingga pengangkatan tenaga kesehatan PTT (Pegawai Tidak Tetap).



Melalui penataan kelembagan LNS terdapat **efisiensi anggaran** APBN sebesar Rp 25,3 miliar

Penerapan *e-procurement* telah menghasilkan efisiensi sebesar Rp 28,3 triliun



Terbitnya PP No.11 tahun 2017 tentang manajemen PNS yang menjadi payung hukum bagi perbaikan sebaran Aparatur Sipil Negara (ASN) sampai ke pelosok daerah.



Pemerintah terus berupaya untuk mewujudkan **layanan kesehatan berkualitas yang merata di seluruh Indonesia** dengan melakukan seleksi berbasis merit dan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) bagi **tenaga kesehatan PTT (Dokter Umum, Dokter Gigi, dan Bidan).**

39.090 orang

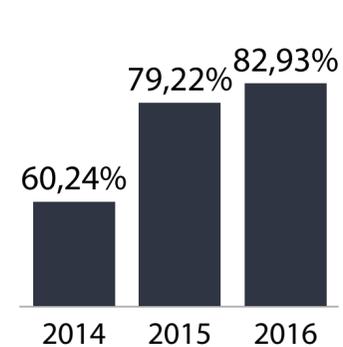
Sumber: Kementerian PAN dan RB

INSTANSI PEMERINTAHAN YANG TERUS BERBENAH

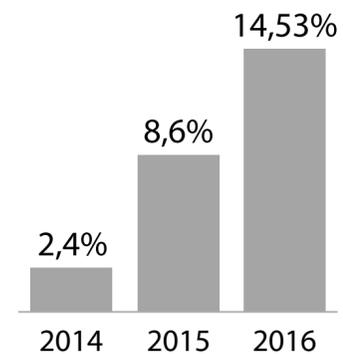
Dari tingkat pusat hingga daerah, Pemerintah terus berupaya memperbaiki diri dengan meningkatkan tata kelola, transparansi, dan kinerja birokrasi.

PERSENTASE INSTANSI PEMERINTAHAN DENGAN KATEGORI AKUNTABILITAS KINERJA BAIK (KATEGORI "B" KEATAS) (%)

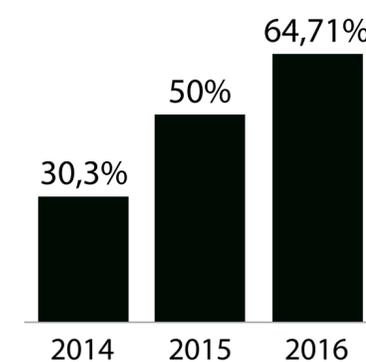
KEMENTERIAN/LEMBAGA



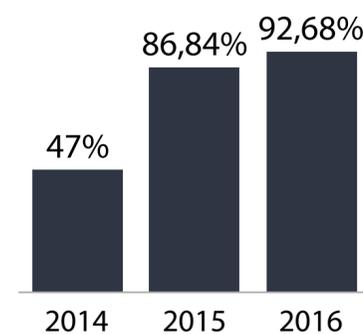
KABUPATEN/KOTA



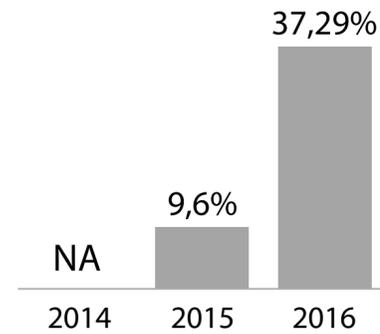
PROVINSI



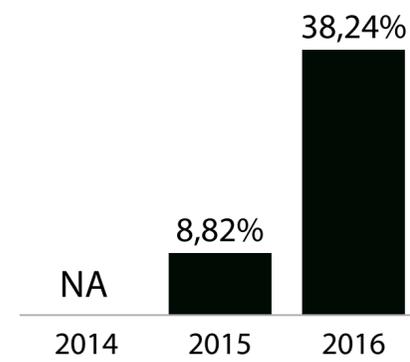
KEMENTERIAN/LEMBAGA



KABUPATEN/KOTA



PROVINSI



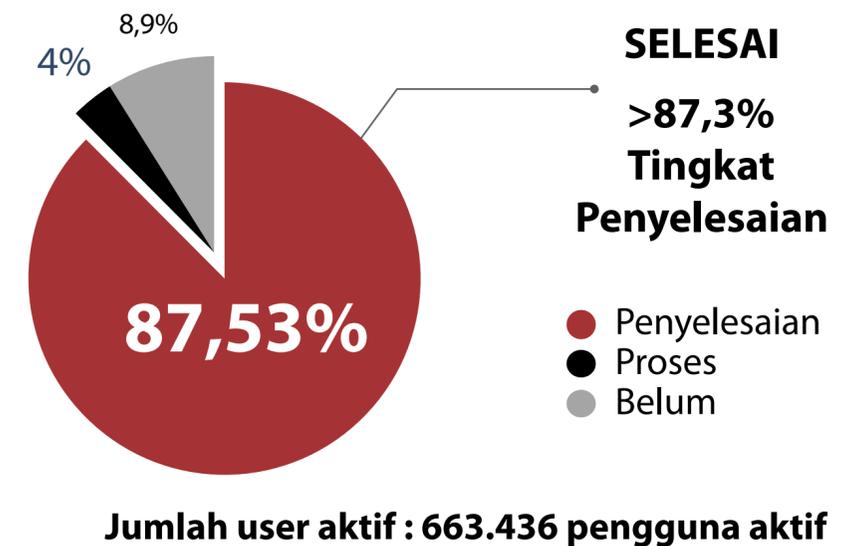
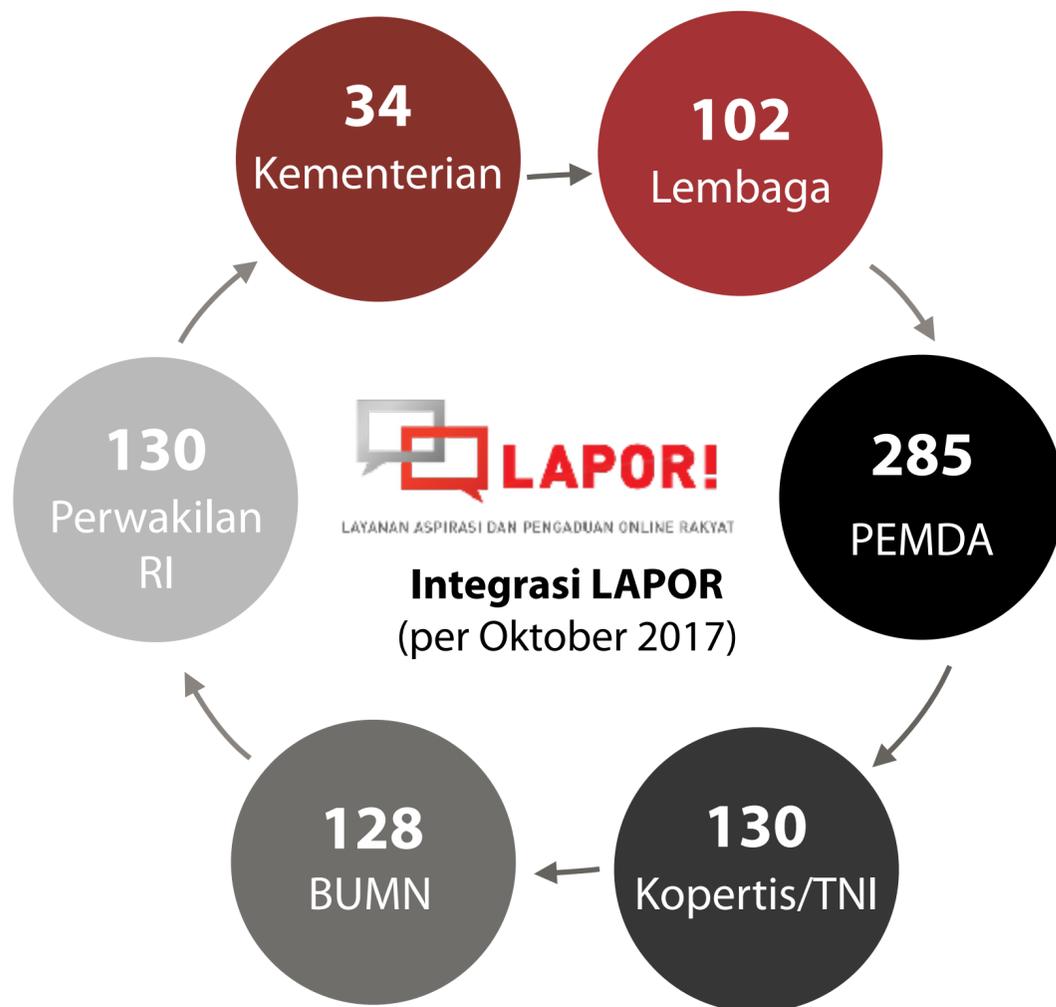
PERSENTASE INSTANSI PEMERINTAHAN DENGAN INDEKS REFORMASI BIROKRASI BAIK (KATEGORI "B" KEATAS) (%)

Kementerian / Lembaga saat ini telah memiliki Program pembangunan lebih tepat sasaran (*money follow program*).

Sumber: Kementerian PAN dan RB

AKSES INFORMASI DAN PENANGANAN KELUHAN PUBLIK

Tidak hanya meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi, Pemerintah secara konsisten membuka kanal pengaduan publik yang terkelola dengan baik.



Pemerintah juga secara aktif **mengunggah data** pada **portal Satu Data Indonesia** yang memudahkan masyarakat untuk memperoleh data sektoral.



MEMBANGUN STABILITAS POLITIK DAN KEAMANAN

Stabilitas politik tercipta dari dinamika kebebasan yang tercermin dalam demokrasi dan ketegasan yang dijalankan ketika keamanan masyarakat mulai terganggu.

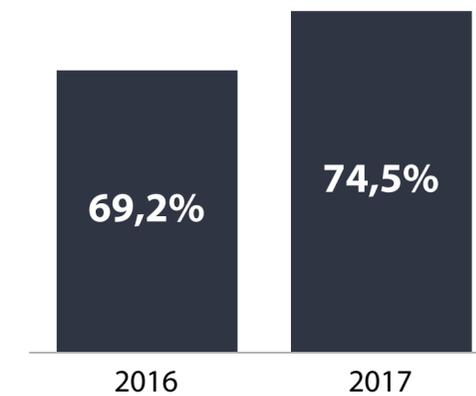
Penyelenggaraan pilkada yang aman dan demokratis menjadi salah satu faktor penting dalam menciptakan stabilitas politik dan keamanan. Tantangan yang lainnya adalah penanggulangan radikalisme dan terorisme, yang membutuhkan upaya komprehensif di dalam dan luar negeri.

Bagian dari upaya memelihara stabilitas ini adalah dengan memerankan kepemimpinan regional dan kawasan, baik dalam Indian-Ocean Rim Association (IORA), penanganan krisis dan bantuan kemanusiaan di Rakhine State di Myanmar dalam menjaga Laut Cina Selatan. ■

PILKADA YANG AMAN DAN DEMOKRATIS

Penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2017 yang berlangsung aman dan lancar menunjukkan kualitas demokrasi Indonesia yang semakin baik.

TINGKAT PARTISIPASI PEMILIH



PILKADA SERENTAK 2017



Sumber: Kementerian PPN/BAPPENAS

PENANGGULANGAN RADIKALISME DAN TERORISME

Pemerintah menggunakan pendekatan *soft approach* dalam program pencegahan dan deradikalisasi. Namun, program penindakan dilakukan dengan pendekatan *hard approach* dengan tetap tunduk pada peraturan yang berlaku dan prinsip kehati-hatian.

OUTCOME

Pencegahan :

Menciptakan situasi yang kondusif;
Tidak ada tempat radikalisme dan terorisme tumbuh.

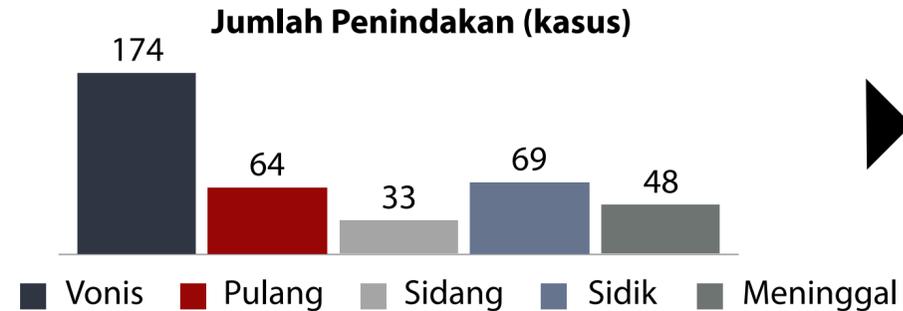
1. Program pendidikan karakter
2. Penunjukan duta damai
3. Penggalangan tokoh masyarakat
4. Penyusunan standar literasi media Islam online
5. Pengamanan Perbatasan
6. Operasi kontra radikalisme dan terorisme
7. dll

Kesadaran dan kepedulian masyarakat semakin tinggi dalam menolak dan melawan aksi-aksi teror.

PENANGGULANGAN RADIKALISME & TERORISME

Penindakan:

- *Hard Approach*: Dengan Tegas



Kapasitas kehancuran dan kerusakan serangan teroris jauh semakin menurun.

Deradikalisasi:

-**Dalam Lapas:** 266 orang
-**Luar Lapas:** 733 orang

Program Kegiatan

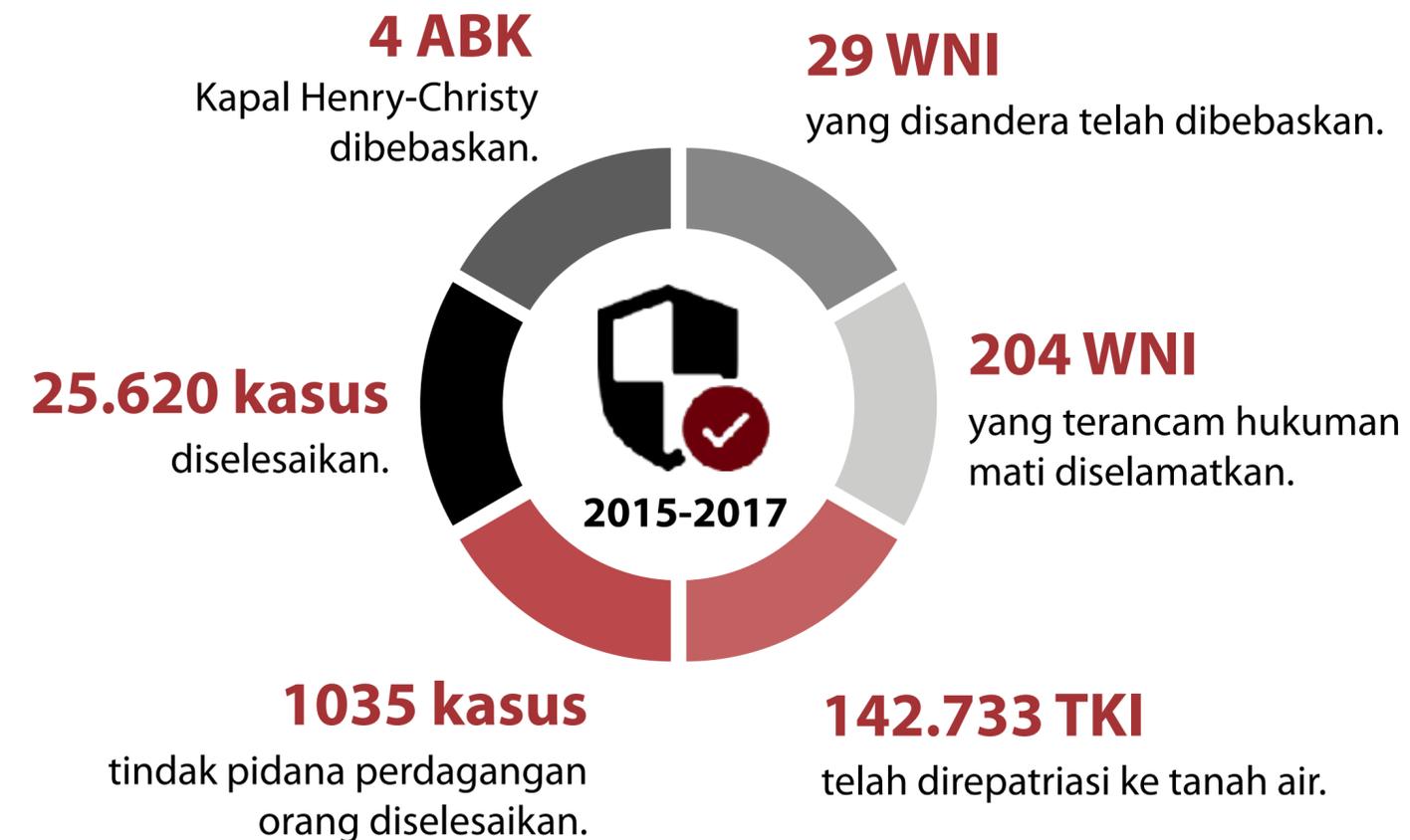
1. Pembinaan Wawasan Kebangsaan
2. Pembinaan Wawasan Keagamaan
3. Pembinaan *Life Skill*
4. Pengawasan & Pendampingan para Mantan Teroris
5. Pembinaan Kewirausahaan
6. dll

Partisipasi aktif 50 eks teroris dalam program pencegahan dan deradikalisasi. Mereka menjadi pelaku aktif melawan terorisme.

Pengakuan dunia atas keberhasilan penanganan terorisme di Indonesia, terutama dalam G20.

UPAYA-UPAYA MELINDUNGI WNI DI LUAR NEGERI

Pemerintah pun mengerahkan kemampuan aparatusnya untuk memberikan perlindungan sebesar-besarnya bagi warganya.



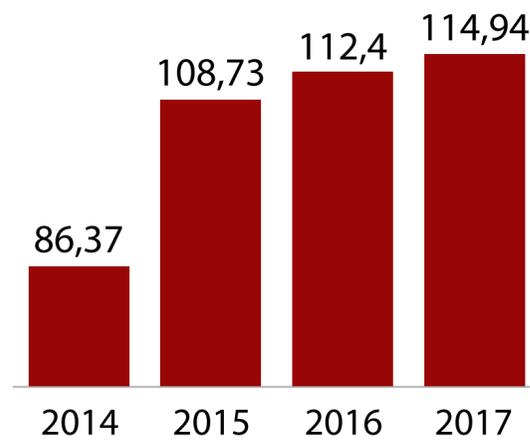
Sumber: Kementerian Luar Negeri

MEMBANGUN TNI YANG PROFESIONAL & PEMBENTUKAN KADER BELA NEGARA

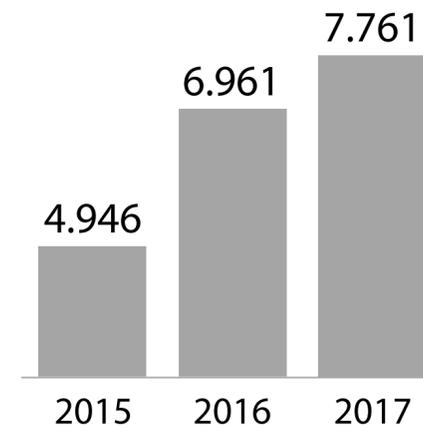
Melalui pembangunan pertahanan negara trimatra terpadu serta pembentukan kader bela negara, secara bertahap negara hadir untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman bagi seluruh warga negara.



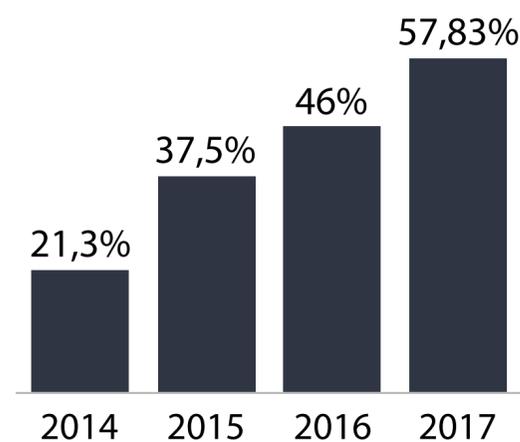
APBN Kemhan
(triliun rupiah)



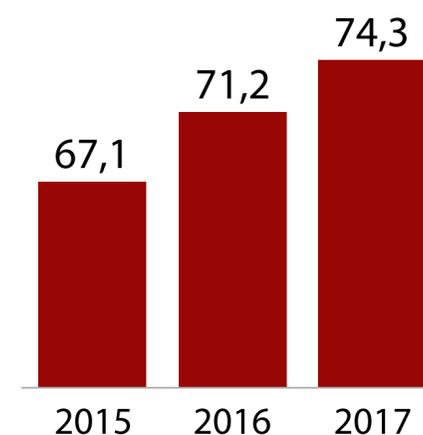
Kesejahteraan Prajurit
(Rumah prajurit terbangun)



Tingkat Pemenuhan Kekuatan Pokok Minimum II atau MEF II



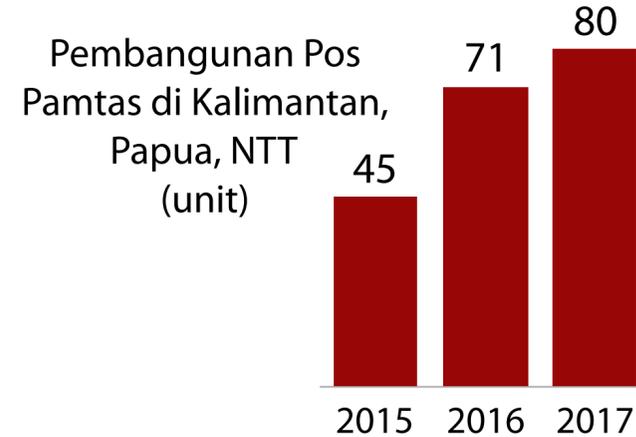
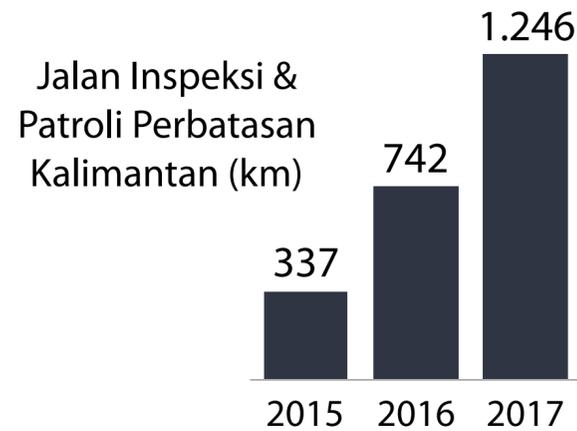
Kader Bela Negara
(juta orang)



Sumber: Kementerian Pertahanan

PENGAMANAN PERBATASAN

Menghadirkan negara dan memberikan rasa aman bagi warga negara di wilayah perbatasan.



Dermaga Posal Sei Pancang, Sebatik



Perpanjangan Runway Lanud R. Sajad, Natuna



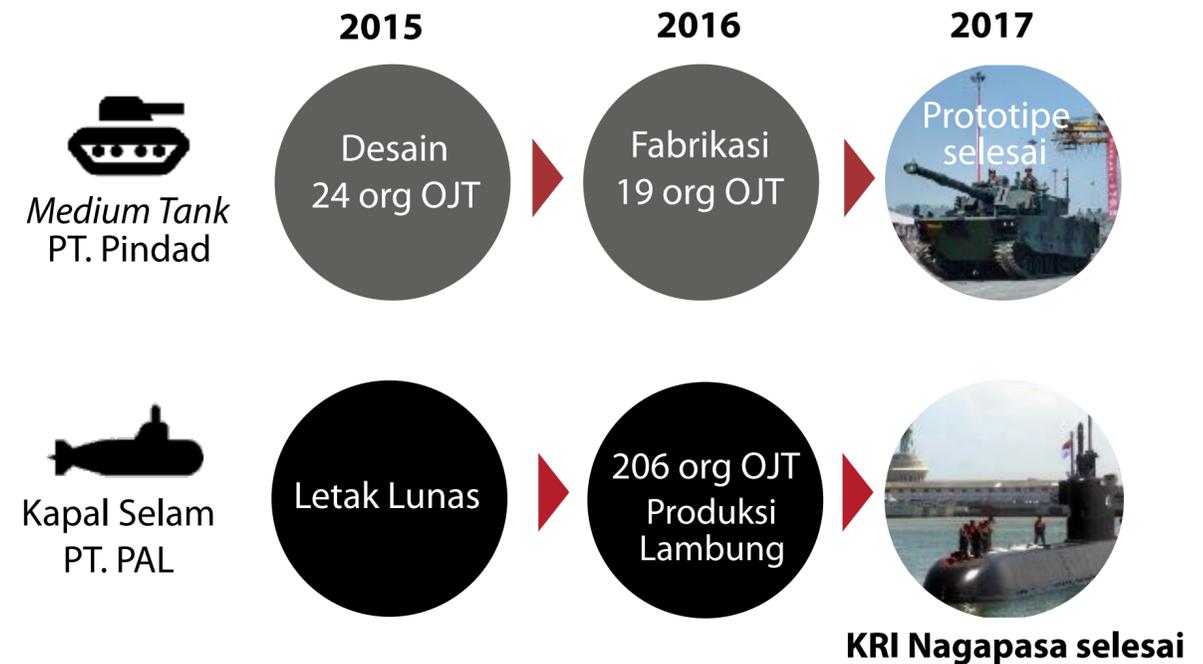
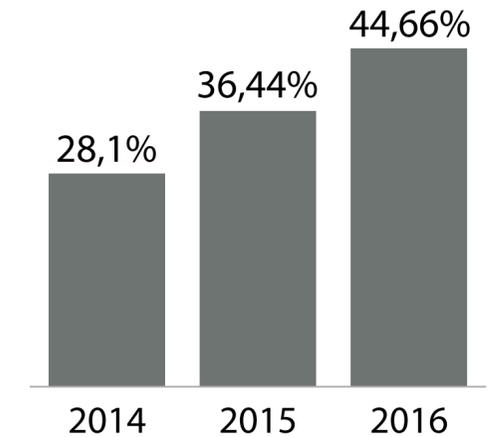
Dermaga Macan Tutul, Merauke

INDUSTRI PERTAHANAN DALAM NEGERI

Mewujudkan industri pertahanan dalam negeri yang kuat, mandiri dan berdaya saing sehingga meningkatkan kontribusinya pada pemenuhan Kekuatan Pokok Minimum.



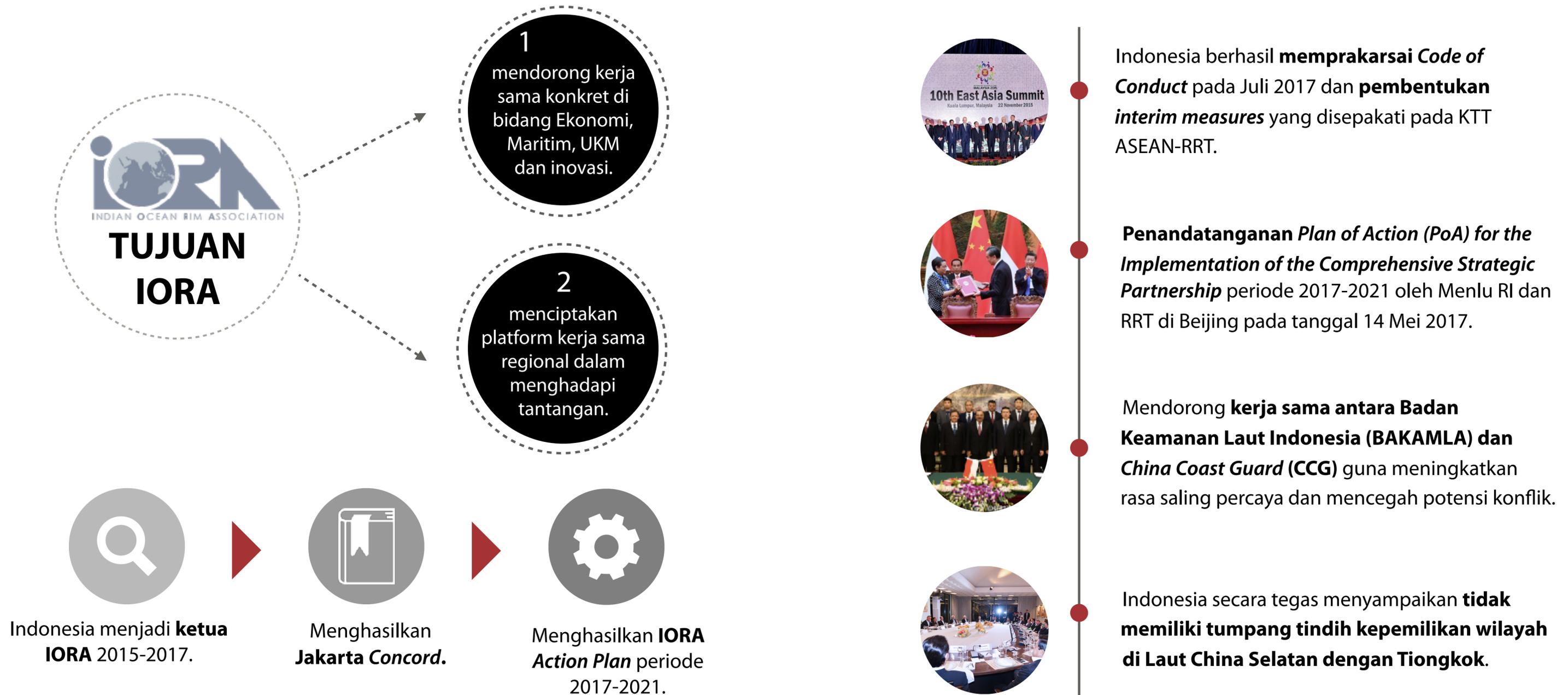
Kontribusi Industri Pertahanan Dalam Negeri Terhadap Kekuatan Pokok Minimum



Sumber: Kementerian Pertahanan

KEPEMIMPINAN DALAM DIPLOMASI INTERNASIONAL

Letak yang strategis, laut yang luas dan potensi ekonominya yang tinggi merupakan alasan atau daya tawar yang kuat bagi Indonesia untuk mengambil peran kepemimpinan dalam diplomasi internasional.



Sumber: Kementerian Luar Negeri

PRESTASI DAN CAPAIAN DIPLOMASI INTERNASIONAL

Peran aktif Indonesia dalam berbagai bentuk diplomasi telah menghasilkan sejumlah capaian yang dapat dibanggakan.



Perjanjian Garis batas Laut Wilayah **RI-Singapura diratifikasi.**



Draft MoU Survey and Demarcation ke-20 Indonesia dan Malaysia untuk batas darat Kalimantan Utara dan Sabah **disepakati.**



Tahap akhir dua *unresolved segment* batas darat **Indonesia - Timor Leste diselesaikan.**



1.140 peserta dari **57 negara berkembang** terlibat dalam 46 program **Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular (KSST) Indonesia.**



Indonesia menjadi salah satu **penyumbang terbesar Pasukan Pemeliharaan PBB** dengan peringkat pengirim pasukan **ke-12 dari 125 negara.**



Memanfaatkan peluang pasar prospektif (non-tradisional) baik di Pasifik Selatan, Afrika (sub sahara & Afrika Selatan), Timur Tengah, Eropa Timur, maupun Amerika Selatan, dan Karibia.



Perdagangan di sub-sahara Afrika: US\$ 5,86 M (2016); dengan Afrika Selatan US\$ 1.08 M.

Sumber: Kementerian Luar Negeri

DIPLOMASI POLITIK DAN KEMANUSIAAN

Perhatian dan bantuan yang diberikan pada isu Palestina dan pengungsi di Rakhine State, kembali menegaskan peran sejarah Indonesia yang senantiasa ikut serta secara aktif menciptakan perdamaian dunia.

Bantuan Kebutuhan Dasar untuk Pengungsi di Rakhine State



10 kontainer
(pakaian, makan, tenda)



10 unit
tangki air
fleksibel



80 paket
perkakas
rumah tangga



30 ton beras



1 ton
gula pasir



900 paket
pakaian



14.000 selimut



325 boks
minyak goreng



2.000 boks
biskuit

17.400 sarung



2.490 paket
makanan siap saji



10 set
generator listrik



20 unit
tenda besar

Pendidikan



6 sekolah

Kesehatan



Pendirian Rumah Sakit Indonesia



157 program peningkatan kapasitas untuk 1.811 Warga Negara Palestina termasuk PNS dan Polisi Palestina.



Secara konsisten **memperjuangkan kemerdekaan Palestina** di tingkat PBB.



Indonesia lakukan pengecaman terhadap Israel dan berkomunikasi dengan Menlu berbagai negara di kawasan termasuk dengan Menlu AS untuk mendesak Israel cabut pembatasan beribadah.

Sumber: Kementerian Luar Negeri



PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER DAN NILAI BUDAYA YANG BERAGAM

Modal terpenting dalam pemerataan pembangunan adalah manusia yang berbudaya, yang memiliki akal-budi serta berkomitmen pada nilai-nilai kebaikan bersama.

Beruntung bahwa nilai-nilai utama Ke-Indonesia-an kita telah ada dan dapat dengan mudah digali dari warisan budaya bangsa. Salah satu yang terpenting adalah nilai kebinekaan yang telah menyatu dalam semboyan dan lambang negara Indonesia.

Revitalisasi budaya bangsa dilakukan melalui perluasan dan pemerataan akses terhadap berbagai kegiatan kebudayaan. Di antaranya dengan pendidikan karakter, pengembangan dan revitalisasi museum dan taman budaya, fasilitasi komunitas budaya dan revitalisasi desa adat, serta penyelenggaraan berbagai pameran, festival, pagelaran seni dan film, baik di dalam maupun luar negeri.

Apresiasi terhadap budaya Indonesia yang beragam ini, menjadi faktor penting dalam menjaga persatuan nasional dan kerukunan antar umat beragama. ■

PLURALISME

Keberagaman adalah ciri khas sekaligus kekuatan Indonesia. Persatuan Indonesia dibangun di atas kontribusi merata berbagai suku bangsa dan Taman Budaya Nusantara.



REVOLUSI MENTAL

Menghadapi berbagai tantangan kemerosotan nilai moral, hilangnya identitas keindonesiaan dan sikap intoleran serta ketidaksiapan menghadapi persaingan global, Pemerintah mengandalkan intervensi berbagai program pendidikan dan budaya.



GERAKAN *Revolusi*
NASIONAL *Mental*

Instruksi Presiden No. 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental:

1. Program Gerakan Indonesia Melayani

2. Program Gerakan Indonesia Bersih

3. Program Gerakan Indonesia Tertib

4. Program Gerakan Indonesia Mandiri

5. Program Gerakan Indonesia Bersatu

PERLUASAN DAN PEMERATAAN AKSES KEBUDAYAAN

Menjadi bangsa yang tidak kehilangan jati diri, karena mampu menjaga nilai luhur budaya dan menyerap perkembangan yang terjadi di sekitarnya.



Jumlah pengunjung
Museum Nasional:
852.448 orang



Jumlah orang yang
mengakses cagar budaya:
360.440 orang



Jumlah orang yang terlibat
dalam pelestarian nilai budaya:
126.432 orang



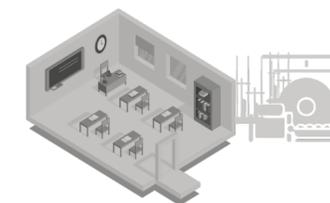
Jumlah pengunjung
Galeri Nasional:
565.494 orang



Desa adat yang direvitalisasi:
337 desa adat



Jumlah komunitas budaya
yang menerima fasilitasi:
847 komunitas



Jumlah sekolah yang menerima
fasilitasi alat-alat kesenian:
942 sekolah

Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

BUDAYA INDONESIA MENEMBUS EROPA

Pihak Europalia memandang Indonesia sebagai negara multi etnis dan multi agama yang sudah saatnya mendapat perhatian dari masyarakat Eropa yang makin majemuk.

Indonesia terpilih menjadi negara ke-4 di Asia, dan **negara Asia Tenggara pertama** yang menjadi negara tamu untuk **Festival Europalia.**



Europalia adalah sebuah asosiasi internasional yang berdiri sejak tahun 1969 di bawah naungan Raja Belgia. Festival ini diadakan selama 3 bulan di 7 negara Eropa yakni Belgia, Belanda, Perancis, Polandia, Austria, Inggris dan Jerman.

Festival Europalia berlangsung selama 4 bulan dari Oktober hingga Januari dengan konten pertunjukan kebudayaan dari *Guest Country*, yang tergambarkan dalam empat pilar: *heritage, contemporary, creations, dan exchange.*

Upacara pembukaan selalu dihadiri Raja Belgia dan Kepala Negara dari *Guest Country.*

**EUROPALIA
ARTS FESTIVAL
INDONESIA**





#kerja3ersama